



MERDEKA
BELAJAR **Kampus**
Merdeka
INDONESIA JAYA



Zona
Integritas
FISIP UNRI

RENCANA STRATEGIS

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS RIAU**

2024-2028

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia - Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ini dapat diselesaikan. Renstra ini merupakan bagian dari pelaksanaan manajemen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau yang menjadi pedoman utama untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (VMTS) fakultas. Dokumen Renstra Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau 2024 - 2028 dibuat sebagai upaya untuk menyusun dan mengimplementasikan Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau yang juga mengacu pada visi Universitas Riau.

Renstra ini dibuat merujuk pada perkembangan ketentuan Kemendikbudristek yang baru dan mengikuti perubahan pada Indikator Kinerja Utama (IKU). Kementerian mewajibkan seluruh perguruan tinggi untuk menyesuaikan Indikator Kinerja Utama yang menjadi tolak ukur, yaitu: 1) Persentase mahasiswa yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus, atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional; 2) Persentase jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen; 3) Persentase mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis *projek (team-based project)* sebagai sebagian bobot evaluasi; 4) Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja; 5) Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80; 6) Persentase lulusan yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta; 7) Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima)

tahun terakhir; 8) Persentase program studi yang melaksanakan kerja sama dengan mitra; dan 9) Persentase program studi yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.

Kami mengharapkan semoga dengan adanya Renstra 2024 – 2028 ini, seluruh target kinerja yang telah dibuat dapat terimplementasikan sehingga Visi Fakultas dapat terwujud. Namun demikian, perubahan Restra juga dapat dimungkinkan untuk dilakukan dengan memperhatikan perkembangan kebutuhan dan perubahan lingkungan yang mendesak.

Pekanbaru, Februari 2024
Dekan,

Dr. Meyzi Herianto, M.Si
NIP 19750831 199802 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI.....	III
DAFTAR TABEL	IV
DAFTAR GAMBAR	V
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. KONDISI UMUM	1
1.1.1 PROFIL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK.....	1
1.1.2 CAPAIAN SASARAN KINERJA TAHUN 2023	5
1.1.3 HARAPAN MASYARAKAT TERHADAP FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU.....	11
1.1.4 LANDASAN PENYUSUNAN RENSTRA FISIP 2024-2028 ..	20
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN.....	22
1.2.1. POTENSI.....	22
1.2.1.1. ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA	24
1.2.2. PERMASALAHAN	47
1.3. KONDISI EKSTERNAL	49
1.3.1. PELUANG	51
1.3.2. ANCAMAN	51
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS.....	54
2.1. VISI	54
2.2. MISI	54
2.3. TUJUAN.....	55
2.4. SASARAN STRATEGI	55
2.5. ARAH KEBIJAKAN	56
2.6. PROGRAM STRATEGIS	56
2.7. KERANGKA KELEMBAGAAN	60
2.7.1. STRUKTUR ORGANISASI	60
2.7.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	61
BAB III REFORMASI BIROKRASI.....	75
3.1. <i>GRAND DESIGN</i> REFORMASI BIROKRASI	75
3.2. MANAJEMEN RESIKO	77
3.3. PROGRAM PRIORITAS	94
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN SETIAP STRATEGI.....	97
4.1. TARGET KINERJA	97
4.2. PROYEKSI FISIP 2024-2028	104
4.3. KERANGKA PENDANAAN.....	119
BAB V PENUTUP.....	123

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2023	5
Tabel 1.2. Isu dan Program Strategis FISIP Universitas Riau 2023.....	16
Tabel 1.3. Data <i>Tracer Study</i> FISIP Tahun 2023.....	19
Tabel 1.4. Sarana dan Prasarana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau 2021, 2022 dan 2023	28
Tabel 1.5. Kerjasama FISIP Tahun 2024	29
Tabel 2.1. Daftar Nama Kelompok Jabatan Fungsional Dosen di FISIP...	66
Tabel 3.1. LAYANAN INTI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI	81
Tabel 3.2. LAYANAN PENDUKUNG	81
Tabel 3.3. LAYANAN PENUNJANG	87
Tabel 4.1. Target Kinerja Tahun 2024-2028	97
Tabel 4.2. Proyeksi Program Studi Baru.....	104
Tabel 4.3. Akreditasi Nasional Program Studi	105
Tabel 4.4. Akreditasi Internasional Program Studi.....	106
Tabel 4.5. Proyeksi Jumlah Mahasiswa.....	107
Tabel 4.6. Proyeksi Jumlah Mahasiswa Baru	108
Tabel 4.7. Proyeksi Jumlah Lulusan	109
Tabel 4.8. Proyeksi Macam dan Penerimaan Beasiswa	110
Tabel 4.9. Jumlah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Berdasarkan Jumlah Dana (juta).....	110
Tabel 4.10. Tabel Proyeksi Jumlah SDM.....	111
Tabel 4.11. Proyeksi Sarana dan Prasarana	112
Tabel 4.12. Proyeksi Pendapatan FISIP UNRI Tahun 2024-2028	114
Tabel 4.13. Proyeksi Belanja FISIP UNRI Tahun 2024-2028	115
Tabel 4.14. Prestasi Kemahasiswaan dan Mahasiswa Berprestasi.....	116
Tabel 4.15. Tracer Study Lulusan.....	117
Tabel 4.16. Sasaran Strategis dan Kerangka Pendanaan	119

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Jurusan dan Program Studi S-1 dan D-IV di FISIP	3
Gambar 1. 2 Dekan FISIP Universitas Riau sejak berdiri hingga sekarang	4
Gambar 1. 3 Sasaran kegiatan strategis fakultas yang tertuang didalam Rencana Strategis FISIP dan perjanjian kinerja fakultas	13
Gambar 1.4. Program Strategis FISIP Universitas Riau Tahun 2023	15
Gambar 1. 5 Jumlah Tenaga Pendidik Berdasarkan Jabatan Fungsional dan Status Kepegawaian	25
Gambar 1. 6 Jumlah Tenaga Kependidikan Berdasarkan dan Status Kepegawaian	26
Gambar 1. 7 sarana dan prasarana yang perlu dibenahi di FISIP Universitas Riau.....	47
Gambar 2. 1. Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	54
Gambar 2. 2 Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	55
Gambar 2. 3. Matrik Sinkronisasi Perencanaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tahun 2024	58
Gambar 2. 4 Pohon Kinerja Berdasarkan Masing-Masing Program Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tahun 2024-2025	59
Gambar 2. 5 Struktur Organisasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ...	60
Gambar 3.1 Proses Manajemen Risiko	79
Gambar 3.2 Rincian Proses Manajemen Risiko.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

1.1.1 PROFIL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Universitas Riau Nomor 02/KPTS/JUR/62, maka pada tanggal 25 September 1962 telah didirikan Universitas Riau disertai dengan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No.123 tanggal 20 September 1963. Universitas Riau didirikan pada tanggal 1 Oktober 1962 sehingga pada tahun 2020 ini telah berusia 58 tahun. Universitas Riau pada awalnya hanya terdiri dari Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan (FKK) dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Kemudian pada tahun 1963 telah dibuka dua fakultas lain, yaitu Fakultas Ekonomi dan Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam. Tahun 1964 didirikan satu fakultas lagi yakni Fakultas Perikanan sehingga Universitas Riau pada waktu itu mempunyai 5 (lima) fakultas. Selanjutnya pada tahun yang sama Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Riau memisahkan diri dan menjelma menjadi IKIP Jakarta Cabang Pekanbaru. Namun pada tahun 1968 bergabung lagi dengan Universitas Riau menjadi dua fakultas yakni Fakultas Keguruan dan Fakultas Ilmu Pendidikan. Tahun 1979 dirintis pula pendirian sebuah fakultas eksakta lainnya yaitu Fakultas Non Gelar Teknologi. Dengan demikian sampai tahun 1982 Universitas Riau memiliki tujuh fakultas.

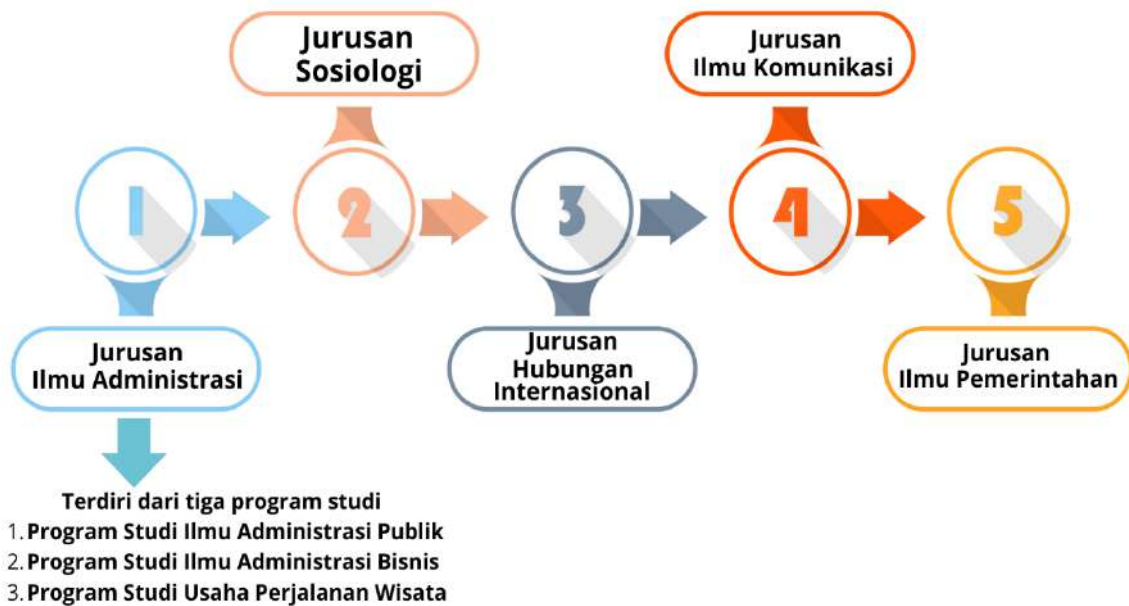
Universitas Riau memiliki beberapa kampus untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik. Kampus utama disebut Kampus Bina Widya seluas 345,617 hektar telah difungsikan sejak tahun 1983 dan terletak sekitar 12,5 km dari pusat Kota Pekanbaru. Kampus ini terdiri dari rektorat dan fakultas (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan, Fakultas Perikanan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas Kedokteran, Fakultas Hukum, Fakultas Keperawatan, dan Pascasarjana), Perpustakaan, lembaga-lembaga, Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi, rumah sakit pendidikan, masjid, dan lain-

lain. Kampus kedua, yakni Kampus Purnama terletak di Kota Dumai dengan luas hamparan 32,045 hektar untuk mendukung kegiatan akademik Program Studi Ilmu Kelautan. Sedangkan Kampus Pattimura di Jalan Pattimura Gobah Pekanbaru seluas 5,795 hektar dan Jalan Thamrin seluas 4 (empat) hektar. Kampus Pattimura dipergunakan oleh Fakultas Hukum (FH), Program Pasca Sarjana, Program D3 FE, Pusat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan (P2K2), dan lain-lain. Fakultas Kedokteran memiliki kampus di Jalan Diponegoro berdekatan dengan Rumah Sakit Umum Provinsi Arifin Ahmad. Di samping itu terdapat pula kampus eks Sekolah Guru Olahraga (SGO) untuk penyelenggaraan program studi yang terkait dengan keolahragaan.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) didirikan bersamaan dengan berdirinya Universitas Riau di Pekanbaru. Pendirian Universitas Riau berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Universitas Riau No. 02/KPTS/JUR/62, 25 September 1962 yang diperkuat oleh Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No.123 pada 20 September 1963 yang berlaku semenjak 1 Oktober 1963.

Fakultas tertua di Universitas Riau ini semula awal berdiri bernama Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan (FKK). Kemudian berubah nama menjadi Fakultas Sosial dan Politik atau disingkat Fak.SOSPOL yang terdiri dari dua jurusan yakni Jurusan Administrasi Negara dan Jurusan Administrasi Niaga.

Perkembangan Fak.SOSPOL selanjutnya berubah menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), memiliki lima jurusan dengan tiga program studi S1 dan D-IV yang sudah terakreditasi A. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

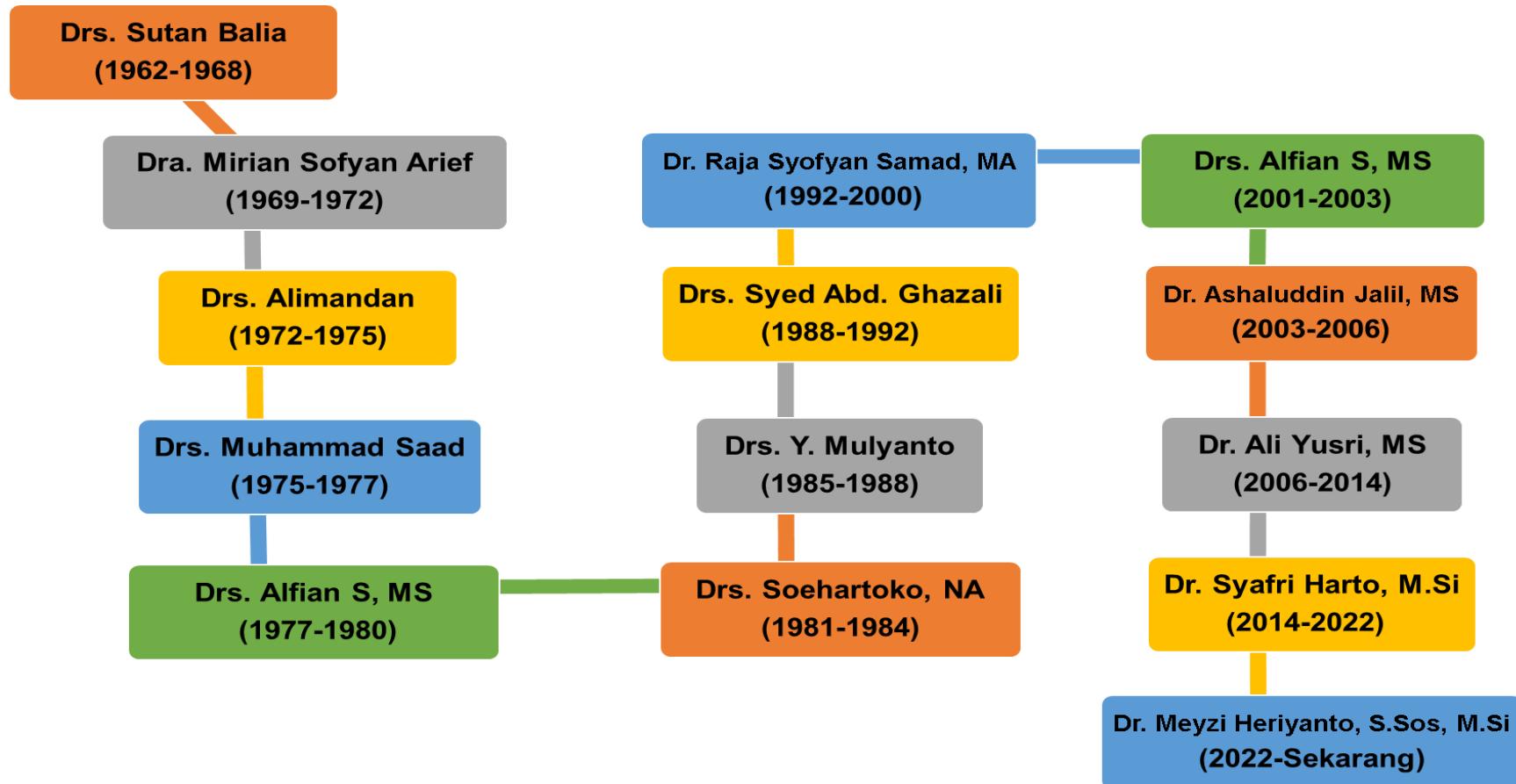


Gambar 1. 1 Jurusan dan Program Studi S-1 dan D-IV di FISIP Universitas Riau

FISIP Universitas Riau secara strategis dirancang dan dipersiapkan memberikan kontribusi yang optimal mewujudkan Universitas Riset (*Research University*) sebagaimana Visi Universitas Riau. FISIP telah berhasil pula untuk menjadikan Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Ilmu Pemerintahan menjadi Fakultas Hukum. Semenjak tahun 2001, FISIP telah memiliki Program Pascasarjana. Program Pascasarjana Strata Dua (S2) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ada empat (4) program studi, yaitu;

1. Program Studi Administrasi Publik (Akreditasi A)
2. Program Studi Ilmu Politik dengan konsentrasi Manajemen Pemerintahan Daerah dan Ilmu Hubungan Internasional (Akreditasi B)
3. Program Studi Sosiologi dengan konsentrasi Kajian Perkotaan dan Perencanaan Pembangunan Sosial (Akreditasi B)
4. Program Studi Ilmu Komunikasi dengan konsentrasi *Public Relations*, Komunikasi dan Media, Komunikasi Politik dan Pemerintahan (Akreditasi B)
5. Tahun 2021 berdiri pula Program Doktor Administrasi Publik FISIP Universitas Riau.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau mengalami banyak perubahan, baik struktur maupun pimpinannya. Awal berdirinya fakultas ini dipimpin oleh Drs. Sutan Balia (1962-1968). Selanjutnya nam-nama Dekan secara berurutan berdasarkan tahun jabatannya dapat dilihat pada grafis di bawah ini :



Gambar 1. 2 Dekan FISIP Universitas Riau sejak berdiri hingga sekarang

1.1.2 CAPAIAN SASARAN KINERJA TAHUN 2023

Dokumen ini disusun berpijak kepada Laporan Kinerja (LAKIN) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023. Hasil tersebut dijadikan sebagai *baseline* dalam penyusunan Renstra dan Rencana Operasional (Renop) FISIP UNRI. Perihal mendasar yang menjadi pijakan awal adalah capaian kinerja pada tahun 2023, yang meliputi 4 (empat) sasaran strategis yang diukur melalui instrument berupa Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian kinerja berdasarkan pencapaian 9 (sembilan) IKU sebagian besar melebihi target yang telah ditetapkan. Adapun capaian sasaran kinerja tahun 2023 diuraikan pada tabel 1.1.

Tabel 1.1. Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Realisasi	Persentase capaian (%)	
1	Tersedianya program studi yang berkualitas	1	IKU2	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi.	%	20%	18,63	93,15%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Realisasi	Persentase capaian (%)	
		2	IKU5	Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen.	Rasio	0,7	0,86	125,71%
		3	IKU7	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	%	60%	60%	100,00%
		4	IKU8	Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	%	0%	0,00%	#DIV/0!

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Realisasi	Persentase capaian (%)	
2	Terciptanya tata kelola berbasis Good University Governance /GUG	1	IKU4	Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industry	%	60%	39,83	66,38%
		2	IKU9	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	%	95%	97%	102,11%
3	Terciptanya Kemandirian dan Prestasi mahasiswa yang handal	1	IKU1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	%	60%	17,73%	29,55%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Realisasi	Persentase capaian (%)	
		2	IKU3	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	%	40%	62,18%	155,45%
4	Tersedianya sistem perencanaan dan Produk Inovasi yang unggul	1	IKU6	Jumlah kerjasama program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	%	100%	343%	343,00%

Capaian kinerja tahun 2023 sebagaimana diuraikan pada tabel 1.1 menjadi dasar pertimbangan bagi pimpinan fakultas menetapkan target capaian untuk Indikator Kinerja Utama (IKU). Evaluasi capaian target tahun 2023 dilakukan pada triwulan ke 4 (empat). Hasil evaluasi capaian kinerja tersebut menjadi basis penyusunan dan penetapan target capaian IKU tahun 2024. Namun, menjadi perhatian bersama bahwa hasil pencapaian kinerja tahun 2023 bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi penetapan target capaian kinerja tahun 2024 tetapi juga berdasarkan kesepakatan kemampuan pengelola program studi/jurusan. Tabel 1.1 menggambarkan hasil capaian kinerja tahun 2023 pada mencakup 4 (empat) sasaran kegiatan strategis, yakni; tersedianya program studi yang berkualitas; *Good University Governanace (GUG)* atau pengelolaan organisasi FISIP yang profesional dan pengelolaan anggaran berbasis kinerja atau *performance budgeting*; lulusan S1 dan D4 yang berhasil memiliki pekerjaan; jumlah lulusan melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta; dan terciptanya sistem perencanaan dan produk inovasi yang unggul.

Perwujudan capaian sasaran kegiatan “tersedianya program studi yang berkualitas” ditetapkan oleh pimpinan fakultas melalui 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja pada tahun 2023 yakni; target IKU2 (persentase lulusan S1 dan D4 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi dan atau meraih prestasi) sebesar 20%; target IKU5 (Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/ industri/ pemerintah per jumlah dosen) sebesar 0,7; target IKU7 (persentase mata kuliah S1 dan D4 yang menggunakan *case method* atau *team-based project*) sebesar 60%; dan target IKU8 (persentase program studi S1 dan D4 yang memiliki akreditasi BAN-PT atau internasional yang diakui pemerintah) sebesar 0,00%. **Hasil realisasi kegiatan pada tahun 2023**, menunjukkan capaian kinerja IKU2 sebesar 18,63% dan bermakna capaian realisasi target IKU2 sebesar 93,15%; capaian kinerja IKU5 sebesar 0,86 dan berarti capaian realisasi target sebesar 125,71%; capaian kinerja IKU7 sebesar 60,00% dan

bermakna capaian realisasi target sebesar 100,00%; dan capaian kinerja dan capaian target IKU8 masih 0,0% dikarenakan pimpinan fakultas belum menetapkan target kinerja utama untuk tahun 2023. Artinya bahwa capaian kinerja pada tahun 2023 masih terdapat realisasi yang tidak memenuhi target yang ditetapkan.

Pengejawantahan terciptanya tata kelola berbasis “Good University Governanace” (GUG) atau pengelolaan organisasi FISIP yang profesional dan anggaran berbasis kinerja sudah dirumuskan oleh pimpinan fakultas dengan menentukan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja yang harus diwujudkan setiap tahun, yakni IKU4 (Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri) dengan penetapan target sebesar 60,00%; IKU9 (Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80) dan target kinerja sebesar 95,00%. Berdasarkan data **capaian kinerja tahun 2023** menunjukkan capaian kinerja IKU4 sebesar 39,83% dan bermakna capaian realisasi target kinerja sebesar 66,38%. Capaian kinerja IKU9 sebesar 97 % dengan capaian realisasi 102,11%. Artinya bahwa capaian kinerja IKU4 perlu upaya bersama dalam rangka peningkatan mencapai target kinerja.

Pengukuran keberhasilan sasaran “terciptanya kemandirian dan prestasi mahasiswa yang handal” ditentukan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja yang akan dicapai setiap tahun, yakni target kinerja dari IKU1 (persentase lulusan S1 dan D4 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta) sebesar 80,00%; dan target kinerja IKU3 (persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi) sebesar 40,00%. Tabel 1.1 menunjukkan **realisasi kegiatan pada tahun 2023** menunjukkan capaian kinerja IKU1 sebesar 17,73% dan bermakna capaian realisasi target kinerja IKU1 sebesar 29,55%, dan capaian kinerja IKU3 sebesar 62,18% dan bermakna capaian realisasi target IKU3 sebesar 155,45%. Artinya

bahwa IKU1 menjadi perhatian penting pada tahun berikutnya dikarenakan pencapaian realisasi jauh dari target yang dicanangkan.

Perwujudan sasaran “terciptanya sistem perencanaan dan produk inovasi yang unggul” di FISIP, ditetapkan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi sasaran kegiatan, yakni IKU6 (Jumlah kerjasama program studi S1 dan D4) Tahun 2023, pimpinan menetapkan target IKU6 sebesar 100%, dan capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 343%, sehingga capaian target kinerja IKU6 sebesar 343%. Artinya realisasi pada sasaran ini melebihi target yang telah ditetapkan oleh pimpinan fakultas.

1.1.3 HARAPAN MASYARAKAT TERHADAP FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU

Ekspektasi masyarakat atas keberadaan FISIP Universitas Riau terus meningkat dari waktu ke waktu. Masyarakat berharap dengan berdirinya fakultas ini bisa memerankan dirinya sebagai *agent of education*. Perihal ini sudah mampu diwujudkan dan berusaha memenuhi harapan masyarakat sebagai *agent of research and development*. Harapan tersebut terus berlanjut sampai sekarang dimana masyarakat berharap FISIP Universitas Riau bisa memerankan dirinya sebagai *agent of knowledge transfer*, dan pada akhirnya bisa berperan sebagai *agent of economic development*.

Pesatnya perkembangan pembangunan di Provinsi Riau baik di tingkat kota maupun kabupaten semakin menuntut tersedianya sumber daya manusia yang dapat diandalkan sebagai subyek dari pembangunan. Untuk itu, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Riau mengharapkan peran FISIP Universitas Riau untuk meningkatkan dan memperkokoh daya saing sumber daya manusianya dengan mewujudkan program-program FISIP Universitas Riau yang lebih nyata, membumi, dan lebih dapat dirasakan langsung oleh civitas akademika dan masyarakat secara umum. Selain itu, FISIP Universitas Riau diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menjawab kebutuhan pengetahuan dalam bidang sosial dan politik di tingkat daerah maupun nasional,

membantu menciptakan lapangan kerja dengan basis keilmuan sosial dan politik, kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, menyiapkan rancang bangun yang dibutuhkan pemerintah, swasta, dan masyarakat dengan cara menyediakan model-model kebijakan mutakhir yang siap untuk dipakai sesuai dengan tantangan di lapangan.

FISIP Universitas Riau juga diharapkan dapat menyediakan dan mengatur pendanaan yang memadai bagi penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan standar minimum. Lebih lanjut, fakultas ini dituntut untuk mendorong pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan yang berasal dari institusinya. Pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat mengharapkan FISIP Universitas Riau untuk menyediakan model pembangunan berkelanjutan di bidang sosial kemasyarakatan, SDM yang terampil, dukungan untuk peningkatan produktivitas, dan *risk sharing*. Tambahan pula, masyarakat mengharapkan FISIP Universitas Riau berkontribusi menyiapkan rancang bangun model kebijakan yang tepat guna.

Lebih lanjut, masyarakat mengharapkan FISIP Universitas Riau dapat menjadi pusat unggulan, penganggaran yang lebih dapat dirasakan oleh civitas akademika, administrasi keuangan memperhatikan akuntabilitas, penataan kegiatan penelitian dan pengembangan yang lebih dapat diandalkan, kerjasama yang lebih nyata dengan instansi pemerintah maupun swasta untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangan SDM terampil dibidangnya, turut berperan serta dalam kegiatan transfer pengetahuan di bidang sosial dan politik dari luar negeri ke dalam negeri dan dalam negeri ke dalam negeri, mampu memobilisasi tenaga pendidik untuk turut serta dalam kegiatan penelitian dan pengembangan ke pemerintah, swasta dan masyarakat, dan mampu melakukan kegiatan komersialisasi hasil penelitian dan pengembangan.

Lebih jauh, fakultas juga dituntut mampu membuat instrumen kebijakan yang mengantar terjadinya penguatan kelembagaan di semua level, program beasiswa yang terintegrasi, perhatian terhadap HKI, penguatan

jaringan antara lembaga penelitian dan pengembangan, pemerintah, swasta, dan masyarakat, program penguatan kegiatan penelitian dan pengembangan, dan pendayagunaan ilmu pengetahuan di bidang sosial dan politik.

1.1.3.1 ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan maupun pelaksanaan kinerja fakultas dan hal ini memiliki dampak yang signifikan bagi entitas yang ada di FISIP pada masa yang akan datang. Isu-isu strategis hendaknya merujuk pada perkembangan ketentuan Kemendikbudristek yang baru, dengan mengikuti perubahan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) serta perkembangan lingkungan sekitar. Terdapat empat sasaran kegiatan strategis fakultas yang tertuang didalam Rencana Strategis FISIP dan perjanjian kinerja fakultas yakni;

- 1) Tersedianya program studi yang berkualitas;
- 2) Terciptanya tata Kelola berbasis *Good University Governance* (GUG)
- 3) Terciptanya kemandirian dan prestasi mahasiswa yang handal
- 4) Terciptanya system perencanaan dan produk inovasi yang unggul



Gambar 1. 3 Sasaran kegiatan strategis fakultas yang tertuang didalam Rencana Strategis FISIP dan perjanjian kinerja fakultas

Dalam merumuskan program prioritas, FISIP Universitas Riau merujuk pada 10 Program Strategis Universitas Riau Tahun 2022-2026, yaitu:

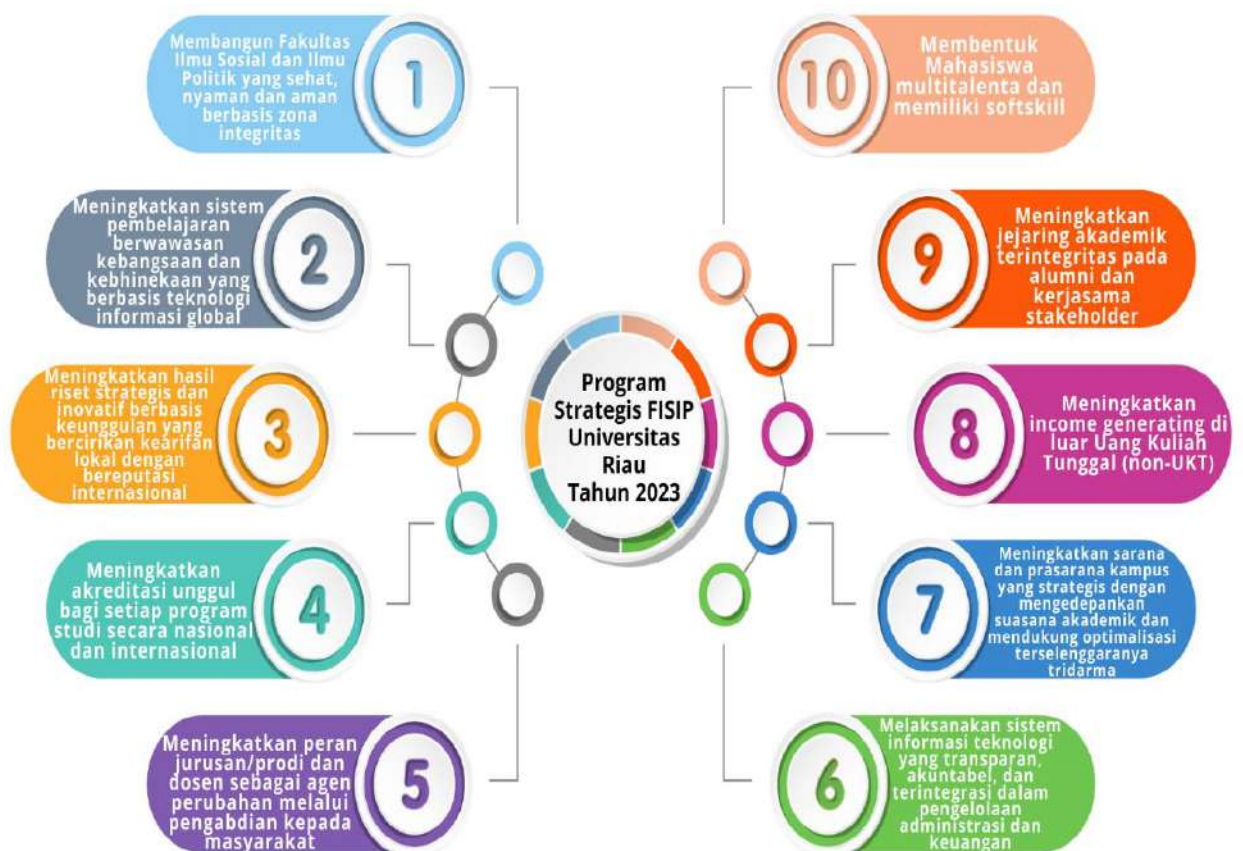
- 1) Universitas Riau sehat, nyaman dan aman
- 2) Transformasi sistem pendidikan dan pembelajaran berwawasan kebangsaan berbasis teknologi informasi global
- 3) Produktivitas riset strategis dan inovatif berbasis keunggulan lokal dengan publikasi bereputasi internasional
- 4) Peningkatan akreditasi internasional bagi program studi yang strategik
- 5) Meningkatkan peran lembaga/fakultas dan dosen sebagai *agent of change* melalui pengabdian masyarakat
- 6) Membangun sistem teknologi informasi terintegrasi, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan administrasi
- 7) Membangun infrastruktur kampus yang strategis dengan mengedepankan atmosfer akademik dan mendukung optimalisasi terselenggaranya tridharma
- 8) Peningkatan *income generating* non-UKT
- 9) Membangun jejaring akademik terintegrasi pada alumni dan stakeholders
- 10) Membentuk mahasiswa multitalenta dengan *softskill* tinggi

FISIP Universitas Riau kemudian merancang 10 program strategis, yakni:

- 1) Membangun FISIP yang sehat, nyaman dan aman berbasis zona integritas
- 2) Meningkatkan sistem pembelajaran berwawasan kebangsaan dan kebhinekaan yang berbasis teknologi informasi global
- 3) Meningkatkan hasil riset strategis dan inovatif berbasis keunggulan yang bercirikan kearifan lokal dengan bereputasi internasional
- 4) Meningkatkan akreditasi unggul bagi setiap program studi secara nasional dan internasional
- 5) Meningkatkan peran jurusan/prodi dan dosen sebagai agen perubahan melalui pengabdian kepada masyarakat.
- 6) Melaksanakan sistem informasi teknologi yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi dalam pengelolaan administrasi dan keuangan

- 7) Meningkatkan sarana dan prasarana kampus yang strategis dengan mengedepankan suasana akademik dan mendukung optimalisasi terselenggaranya tridarma
- 8) Meningkatkan *income generating* di luar Uang Kuliah Tunggal (non-UKT)
- 9) Meningkatkan jejaring akademik terintegritas pada alumni dan kerjasama *stakeholder*
- 10) Membentuk mahasiswa multitalenta dan memiliki *softskill*

Sepuluh program strategis FISIP Universitas Riau tersebut disusun berdasarkan identifikasi berbagai isu strategis di lingkungan FISIP Universitas Riau. Selanjutnya dalam kurun waktu 2022-2026 semangat integrasi di FISIP Universitas Riau harus diwujudkan melalui jalinan pemahaman, saling pengertian, kerjasama dan komunikasi yang semakin terbuka antar berbagai pemangku kepentingan di FISIP Universitas Riau. Adapun pemetaan isu strategis dan program prioritas dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1.4. Program Strategis FISIP Universitas Riau Tahun 2023

Kesepuluh program di atas menjadi *frame* atau bingkai dari kebijakan pimpinan fakultas hingga program studi/jurusan dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah dirumuskan. Adapun penjabaran isu strategis dan program Strategis FISIP Universitas Riau 2023 dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2 Isu dan Program Strategis FISIP Universitas Riau 2023

No	Isu Strategis	Program Strategis
(1)	(2)	(3)
1	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Biroktasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) yang belum optimal b. Belum tersedianya aturan turunan yang jelas terkait pencegahan perundungan, intoleransi dan kekerasan seksual c. Kurang optimalnya sinerigitas civitas akademika dalam memerangi tiga dosa besar Pendidikan d. Persoalan pengamanan, kebersihan dan keindahan yang tidak begitu diperhatikan dalam mewujudkan kampus yang asri dan nyaman 	Membangun FISIP yang sehat, nyaman dan aman berbasis Zona Integritas
2	<ul style="list-style-type: none"> a. Minimnya minat mahasiswa yang mengikuti pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada setiap Program Studi b. Pengembangan kurikulum yang berpedoman pada KKNi dan <i>Outcome Based Education</i> (OBE) belum berorientasi internasional c. Kualitas sistem pembelajaran belum berwawasan kebangsaan yang berbasis teknologi informasi d. Minimnya capaian Mata Kuliah yang menggunakan metode pembelajaran Pemecahan Kasus (<i>Case Method</i>) dan kelompok berbasis proyek (<i>Team Based Project</i>). 	Meningkatkan sistem pembelajaran berwawasan kebangsaan dan kebhinekaan yang berbasis teknologi informasi global
3	<ul style="list-style-type: none"> a. Minimnya penelitian yang berbasis keunggulan sumberdaya lokal provinsi Riau b. Minimnya jumlah publikasi penelitian yang berhasil mendapat rekognisi nasional dan internasional maupun yang diterapkan/bermanfaat untuk Masyarakat c. Minimnya Jumlah Sitasi Karya Ilmiah nasional dan internasional d. Minimnya <i>Prototipe</i> R&D 	Meningkatkan hasil riset strategis dan inovatif berbasis keunggulan yang bercirikan kearifan lokal dengan bereputasi internasional

No	Isu Strategis	Program Strategis
4	a. Belum optimalnya konversi Akreditasi Program studi A menjadi unggul b. Minimnya jumlah Lektor Kepala dan Guru Besar FISIP c. Minimnya jumlah dosen dengan kualifikasi S3 (dokter) d. Minimnya kelas internasional dan program visiting professor maupun pertukaran dosen	Meningkatkan akreditasi unggul bagi setiap program studi secara nasional dan internasional
5	Minimnya jumlah pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh Masyarakat	Meningkatkan peran jurusan/prodi dan dosen sebagai agen perubahan melalui pengabdian kepada masyarakat.
6	a. Ketidak tercapaian target penerimaan/ pengeluaran fakultas. b. Ketidakesesuaian atau kesalahan dalam pengelolaan keuangan, perhitungan pajak dan pencatatan disistem. c. Keterlambatan dalam pencairan maupun pengumpulan dari kwitansi/ bukti dukung pengeluaran. d. Keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan. e. Keterlambatan dalam tindak lanjut penanganan keluhan terkait keuangan.	Melaksanakan sistem informasi teknologi yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi dalam pengelolaan administrasi dan keuangan
7	a. Sarana dan prasarana pendukung dalam proses pembelajaran kurang memadai b. Kurang optimalnya proses layanan administrasi karena sarana prasarana yang tertinggal dari perkembangan teknologi	Meningkatkan sarana dan prasarana kampus yang strategis dengan mengedepankan suasana akademik dan mendukung optimalisasi terselenggaranya tridarma
8	Belum optimalnya pengelolaan aset menjadi aset produktif	Meningkatkan <i>income generating</i> di luar Uang Kuliah Tunggal (non-UKT)
9	Tindak lanjut Kerjasama fakultas yang belum optimal	Meningkatkan jejaring akademik terintegritas pada alumni dan kerjasama <i>stakeholder</i>
10	a. Minimnya tingkat serapan lulusan khususnya yang mendapat pekerjaan dalam rentang waktu 12 Bulan setelah lulus b. Minimnya lulusan bersertifikat kompetensi c. Minimnya mahasiswa yang berprestasi di tingkat nasional d. Rendahnya minat lulusan melanjutkan Studi S2 (Strata Dua) didalam maupun luar negeri selama rentang waktu 12 Bulan e. Minimnya mahasiswa dan lulusan yang berwirausaha	Membentuk Mahasiswa multitalenta dan memiliki <i>softskill</i>

1.1.3.2 PERAN STRATEGIS

Berdasarkan Rencana Strategis FISIP Tahun 2021-2024, terdapat beberapa peran strategis yang menentukan pencapaian dari visi dan misi fakultas selama 4 Tahun mendatang. Adapun peran strategis tersebut yaitu:

1. Pertama, peran strategis kepemimpinan (pemangku jabatan) dalam mewujudkan eksistensi tenaga pendidik dan kependidikan di FISIP.
2. Kedua, optimalisasi pengembangan potensi mutu dan situasi akademik (publikasi, pengembangan SDM dan *roadmap* penelitian). upaya ini dirancang dalam menyongsong tradisi meneliti dan menulis serta diskursus menjadi terlembaga di kalangan akademisi pada FISIP Universitas Riau serta mengaplikasikan kepada masyarakat yang mengedepankan digitalisasi;
3. Ketiga, pembangunan akademis yang berkelanjutan. Upaya ini menjadi hal yang krusial untuk diperhatikan karena menyangkut keberlangsungan proses belajar mengajar yang menjadi basis dalam pengembangan akademis dan tidak melupakan aspek kewirausahaan. Pembenahan kurikulum, SOP akademis dan buku petunjuk akademis (*software* atau perangkat lunak akademis) dan fisik akademis (*hardware* atau perangkat keras akademis) menjadi keniscayaan yang tidak boleh diabaikan. Ini disebabkan penyediaan sarana menunjukkan bahwa daya dukung proses belajar mengajar yang berbasis teknologi tersebut menjadi bagian integral.
4. Keempat, memandang penting terhadap infrastruktur non-akademis (SOP pimpinan, bidang layanan, akademik, transparansi anggaran dan keamanan). Hal ini disebabkan infrastruktur nonakademis merupakan bagian integral dalam mengoptimalkan keberadaan lembaga ini. Keupayaan terbangunnya Standar Operasi Prosedur (SOP) di antara pemangku jabatan menjadi krusial memperjelas (terdokumentasi) apa-apa saja yang menjadi kewajiban atau tugas (beban) kerja pemangku jabatan pimpinan yakni Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademis, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.

Tabel 1.3 Data *Tracer Study* FISIP Tahun 2023

No	Program Studi	Jumlah Responden	CAPAIAN IKU 1 52,28 %						
			Bekerja	(%)	Wiraswasta	(%)	Melanjutkan Studi	(%)	Capaian IKU 1 Prodi (%)
1	Administrasi Bisnis	112	71	61,43%	5	4,46%	0	0%	65,89%
2	Administrasi Publik	170	84	48,29%	8	4,71%	3	1,76%	54,76%
3	Ilmu Hubungan Internasional	168	95	53,21%	6	3,57%	5	2,98%	59,76%
4	Ilmu Komunikasi	102	47	44,31%	3	2,94%	2	1,96%	49,22%
5	Ilmu Pemerintahan	143	80	52,66%	6	3,85%	4	2,80%	59,30%
6	Sosiologi	101	33	29,50%	2	1,98%	4	3,96%	35,45%
7	Usaha Perjalanan Wisata	89	25	26,52%	1	1,12%	0	0,00%	27,64%

Sumber Data : Pusat *Tracer Study* LPPMP UNRI Tahun 2023

1.1.4 LANDASAN PENYUSUNAN RENSTRA FISIP 2024-2028

Penyusunan Rencana Strategis FISIP Universitas Riau mengacu pada landasan hukum dan regulasi yang berlaku. Landasan hukum dan peraturan yang berlaku yang dipedomani dalam penyusunan Rencana Strategis mencakup :

1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
7. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standard Akuntansi Pemerintahan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Penetapan Universitas Riau Pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Sebagai Badan Layanan Umum

13. Peraturan Menteri Keuangan No. 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum
14. Peraturan Menteri Keuangan No. 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Riau Pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
16. Peraturan Menteri Keuangan No. 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220 Tahun 2016 Tentang Sistem Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
19. Peraturan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Nomor 81 Tahun 2017 Statuta Universitas Riau.
20. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau.
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
22. Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek;
23. Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;

24. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
25. Keputusan Rektor Universitas Riau No. 240/UN19/KP/2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2023-2027.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.2.1. POTENSI

FISIP Universitas Riau yang memiliki kekhasan atau konsentrasi pada *social engineering* (rekayasa sosial), maka tentu saja fakultas ini wajib menjadi wadah untuk mengimplementasikan fungsi universitas kepada masyarakat Indonesia dan Riau pada khususnya. Keberadaan FISIP Universitas Riau sebagai perpanjangan tangan universitas dapat langsung dirasakan kehadirannya oleh masyarakat Riau.

Fakultas yang berkedudukan di Provinsi Riau, maka sudah seharusnya memiliki jati diri yang mencerminkan kearifan lokal (*local wisdom*) dari budaya Melayu. Pencerminan kearifan lokal Budaya Melayu tidak semata-mata tertuju kepada sajian kuliner, seni pantun ataupun seni tari, tetapi juga diposisikan dalam spektrum yang lebih luas.

Terkait dengan luasnya spektrum tersebut, maka FISIP Universitas Riau mengemban amanat untuk mampu mengimplementasikan dan mengembangkan hasil inovasi dalam berbagai aspek budaya lokal Melayu. Oleh sebab itu, potensi keilmuan dalam bidang rekayasa sosial dikemas dalam bentuk kegiatan-kegiatan Tri Dharma Pendidikan Tinggi.

Potensi lain yang merupakan peluang bagi implementasi kegiatan-kegiatan Tri Dharma Pendidikan Tinggi di FISIP Universitas Riau adalah potensi industri hilir, sumber daya perairan dalam hal ini kawasan pesisir yang membentang di Provinsi Riau. Potensi riset-riset yang dapat dikembangkan untuk mendukung pemerintahan dan masyarakat berbasis melayu serta kawasan pesisir. Turut sertanya FISIP Universitas Riau

dalam persiapan pengembangan infrastruktur (seperti bangunan, jalan, jembatan dan lain-lain) untuk mendukung pengembangan sektor wisata yang dikembangkan pada kota maupun kabupaten; kajian-kajian akademik bidang kesehatan, pangan, dan pemekaran daerah otonom baru atau pemekaran desa, pembentukan desa adat dan konflik agraria.

Lebih lanjut diharapkan bahwa akademisi yang ada di FISIP Universitas Riau dapat melahirkan produk kekayaan intelektual maupun rekayasa sosial yang mampu diimplementasikan dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat ataupun pemerintahan sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi pendidikan tinggi yang dijalankan oleh FISIP Universitas Riau dapat menyatu dalam mengembangkan atau mengimplementasikan konsep Tri Dharma, yang utuh dari hulu hingga hilir, yang pada akhirnya dapat dinikmati atau dimanfaatkan oleh masyarakat ataupun pemerintahan.

Berdasarkan letak geografis Provinsi Riau, maka terlihat bahwa Provinsi Riau memiliki pesisir pantai yang panjang, terletak di tengah pulau Sumatera, sebagiannya berbatasan langsung dengan selat Malaka, serta berbatasan langsung dengan Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga posisi inilah yang mengakibatkan Provinsi Riau memiliki potensi kemaritiman.

Potensi terbesar yang tidak dapat diabaikan adalah tersedianya Sumber Daya Manusia di institusi pendidikan tinggi khususnya di FISIP Universitas Riau. Potensi ini bisa diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

Pertama, sebagian besar tenaga pendidik berperan di berbagai lembaga luar yang berhubungan dengan sumber-sumber kemitraan dan sosial kemasyarakatan yang dapat mempermudah program kerjasama dengan pihak luar. Kesungguhan di kalangan civitas akademika untuk memajukan fakultas.

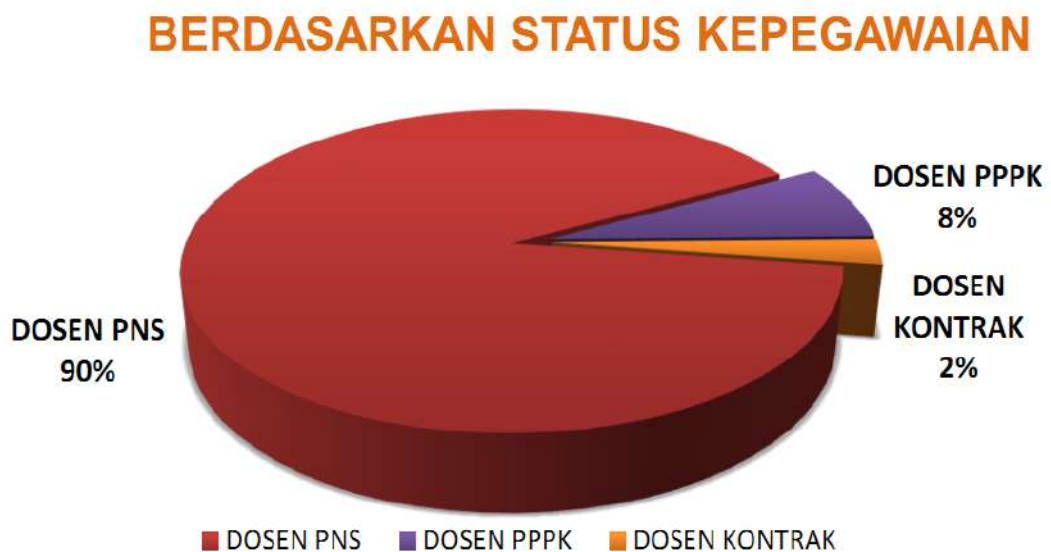
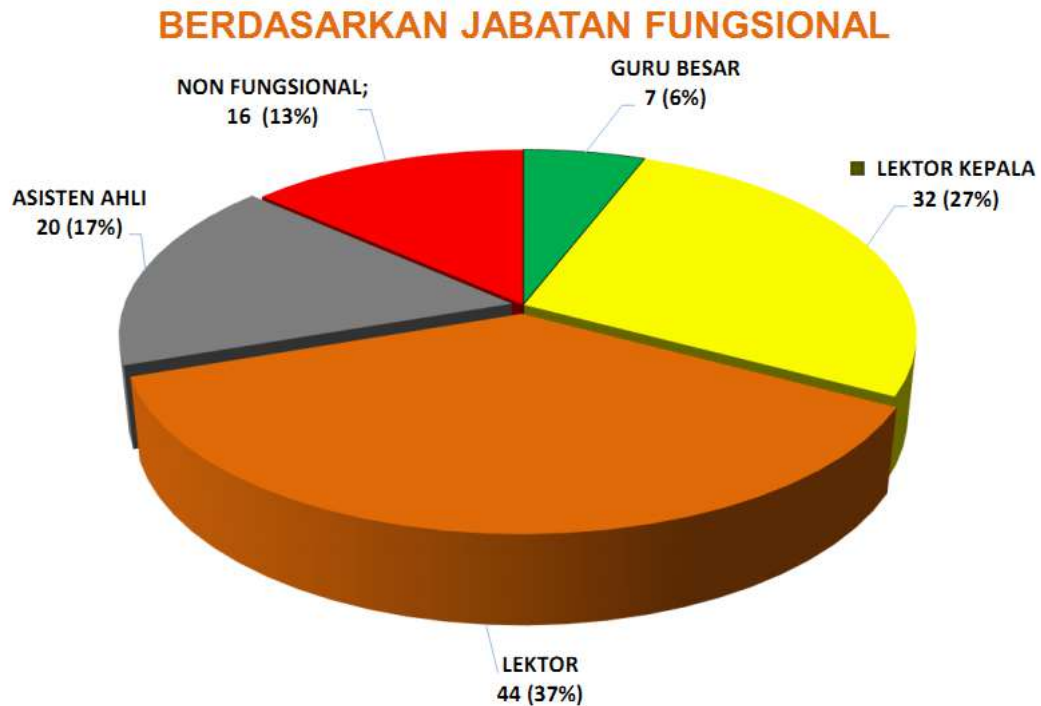
Kedua, Kerjasama yang baik antara universitas dengan instansi swasta dalam bidang pemberian bantuan dana beasiswa kepada mahasiswa di jurusan dan program studi.

Ketiga, Terjalin kerja sama dengan pemerintah daerah dan pihak swasta untuk memberikan bantuan beasiswa bagi tenaga pendidik untuk melanjutkan pendidikan S2 dan S3.

Keempat, Memiliki potensi lahan yang luas untuk pengembangan pembangunan fisik fakultas. Kelima, Gaya kepemimpinan fakultas yang cenderung berkarakter demokratis. Selain itu juga didukung oleh potensi lain, antara lain, pertama perkembangan teknologi yang berkembang pesat memberikan akses positif bagi komunikasi ilmiah di perguruan tinggi, Kedua, pembangunan ekonomi dan pertumbuhan industri di daerah Riau yang semakin menunjukkan peningkatan. Ketiga, perhatian dan dukungan yang besar dari pemerintah Provinsi Riau bagi pengembangan perguruan tinggi. Keempat, Semakin banyaknya tuntutan pemerintah terhadap keberadaan institusi ini dalam berbagai aktivitas pembinaan dan penelitian kemasyarakatan di daerah Riau. Kelima, Semakin besar sumber pendanaan yang ditawarkan pihak industri besar guna melaksanakan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

1.2.1.1. ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA

Kinerja kegiatan FISIP Universitas Riau dipimpin oleh seorang Dekan dan 3 (tiga orang) Wakil Dekan, yaitu Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, Wakil Dekan Bidang Akademik, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan. Sumber daya manusia yang ada di FISIP Universitas Riau terdiri dari Mahasiswa, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Jumlah tenaga pendidik pada FISIP Riau pada tahun akademik 2021/2022 adalah Sebanyak 119 orang dengan rincian:



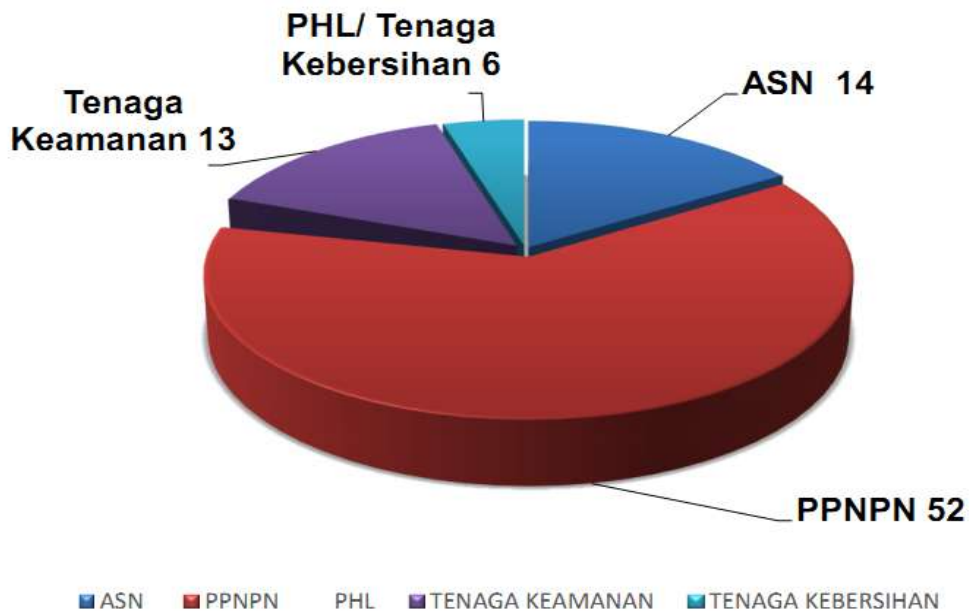
Gambar 1. 5 Jumlah Tenaga Pendidik Berdasarkan Jabatan Fungsional dan Status Kepegawaian

Sumber : Data Olahan Tim Renstra Tahun 2023

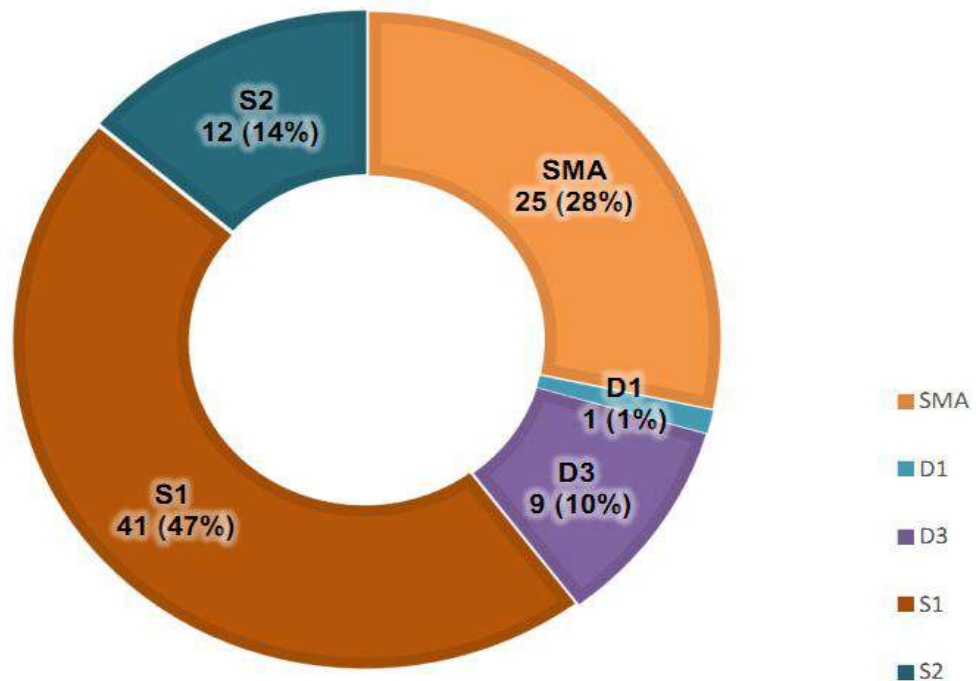
FISIP Universitas Riau dalam menyelenggarakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi memiliki tenaga pendidik sebanyak 119 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 107 orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 9 orang, dan Dosen Kontrak sebanyak 3 orang, dengan komposisi jabatan fungsional Guru Besar berjumlah 7

Orang, Lektor Kepala berjumlah 32 orang, Lektor berjumlah 44 orang, Asisten Ahli 18 orang dan non fungsional berjumlah 16 orang.

STATUS KEPEGAWAIAN



TINGKAT PENDIDIKAN



Gambar 1. 6 Jumlah Tenaga Kependidikan Berdasarkan dan Status Kepegawaian

Sumber : Data Olahan Tim Renstra Tahun 2023

FISIP Universitas Riau dalam menyelenggarakan kegiatan administrasi didukung oleh tenaga kependidikan yang membantu proses tata laksana organisasi. Jabatan tertinggi untuk pegawai di lingkungan FISIP Universitas Riau adalah Koordinator Tata Usaha. Terdiri dari empat Sub Koordinator yang masing-masing membawahi bidang Akademik, Keuangan dan Kepegawaian, Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama, serta Umum Sarana Prasarana Akademik. Jumlah tenaga kependidikan sebanyak 88 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 14 orang, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 55 orang, Tenaga Keamanan sebanyak 13 orang, dan Pegawai Harian Lepas (PHL) / Tenaga Kebersihan sebanyak 6 orang. Jenjang pendidikan tenaga kependidikan terdiri atas Magister sebanyak 12 orang, Sarjana sebanyak 41 orang, Diploma Tiga sebanyak 9 orang, Diploma Satu sebanyak 1 orang, SMA sebanyak 25 orang.

1.2.1.2. ASPEK SARANA DAN PRASARANA

Penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik FISIP Universitas Riau dibangun diatas lahan seluas 67.167 m² telah difungsikan sejak tahun 1962 berlokasi 12,5 km dari pusat kota Pekanbaru. Area kampus ini terdapat beberapa bangunan yang dapat dilihat pada Tabel. 3.5. Sarana dan Prasarana di FISIP Universitas Riau 2021,2022, dan 2023.

Tabel 1.4. Sarana dan Prasarana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau 2021, 2022 dan 2023

No	Uraian	Tahun											
		2021				2022				2023			
		Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan
1	Ruang Kelas	34	Ruang	3.336	M ²	34	Ruang	3.336	M ²	41	Ruang	2.929	M ²
2	Ruang Administrasi	17	Ruang	455	M ²	17	Ruang	455	M ²	17	Ruang	455	M ²
3	Ruang Laboratorium	30	Ruang	2.020	M ²	30	Ruang	2.020	M ²	30	Ruang	2.020	M ²
4	Ruang Pustaka	2	Ruang	200	M ²	2	Ruang	200	M ²	4	Ruang	291	M ²
5	Ruang IT	1	Ruang	9	M ²	1	Ruang	9	M ²	1	Ruang	9	M ²
6	Lahan	1	Lokasi	67.167	M ²	1	Lokasi	67.167	M ²	1	Lokasi	67.167	M ²
7	Gazebo	6	Unit	90	M ²	6	Unit	90	M ²	8	Unit	108	M ²
8	Kantin/Gerai Pend.	8	Ruang	420	M ²	8	Ruang	420	M ²	8	Ruang	420	M ²
9	Lapangan olah raga	2	Lokasi	900	M ²	2	Lokasi	900	M ²	2	Lokasi	900	M ²
10	Gedung KMH	1	Unit	415	M ²	1	Unit	415	M ²	1	Unit	415	M ²
11	Gedung Serbaguna	3	Unit	1.040	M ²	3	Unit	1.040	M ²	3	Unit	1.040	M ²
12	Musholla	1	Unit	319	M ²	1	Unit	319	M ²	1	Unit	319	M ²
13	Gudang	2	Unit	60	M ²	2	Unit	60	M ²	2	Unit	63	M ²
14	Pos Jaga	3	Unit	26	M ²	3	Unit	26	M ²	3	Unit	26	M ²
15	Taman	2	Unit	5.427	M ²	2	Unit	5.427	M ²	2	Unit	5.427	M ²
16	Parkiran	2	Unit	8.040	M ²	2	Unit	8.040	M ²	2	Unit	8.040	M ²

Sumber: Data Simak BNN Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tahun 2023

1.2.1.3. KERJASAMA DAN KEUNGGULAN LAINNYA YANG BERKAITAN DENGAN TRIDHARMA

Kerjasama merupakan salah satu komponen penting bagi dunia pendidikan era globalisasi dan penerapan MBKM di Perguruan Tinggi. Komponen ini menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pencapaian kinerja Fakultas khususnya IKU 6. FISIP hingga saat ini telah melakukan perjanjian payung (MoU) dan perjanjian pelaksana (PKS) dengan pelbagai lembaga pemerintah dan nonpemerintah sebanyak 53 (lima puluh tiga) perjanjian. Jumlah ini menunjukkan bahwa FISIP mempunyai potensi sebagai kekuatan yang bisa diandalkan mewujudkan kualitas pendidikan tinggi di level regional dan nasional. Perjanjian tersebut kedepannya akan dilakukan tindak lanjut secara intensif dan masif. Adapun rinciannya sebagai dijelaskan pada tabel. 1.5.

Tabel 1.5 Kerjasama FISIP Tahun 2024

No.	Prodi	Jenjang	Bentuk Kerjasama	Kriteria Mitra Kerjasama	Nama Mitra	Periode Kerjasama	Data Dukung (Nomor MoU)
1	Sosiologi	S-1	MoU	Pertukaran Kegiatan Dosen, Pertukaran Mahasiswa, Kolaborasi Seminar dan Publikasi, Pengembangan Tata Kelola, Penelitian, Lainnya Sesuai Kebutuhan Pengembangan	Sosiologi Se-Indonesia	5 Tahun	Nomor : 14.018/B-APSSI/V/2023
2	Sosiologi	S-1	MoU	Penyelenggaraan Program MBKM, Pertukaran Mahasiswa,	Universitas Padjadjaran	3 Tahun	Nomor : 1251/UN6.G/PKS/2023 Nomor : 13125/UN19.5.1.1.1/LP.00.01/2026

No.	Prodi	Jenjang	Bentuk Kerjasama	Kriteria Mitra Kerjasama	Nama Mitra	Periode Kerjasama	Data Dukung (Nomor MoU)
				Pertukaran Dosen, Kolaborasi Riset, Kolaborasi Pengabdian pada Masyarakat			
3	Administrasi Bisnis	S-1	MoU	Penyelenggaraan Program MBKM, Pertukaran Mahasiswa, Pertukaran Dosen, Kolaborasi Riset, Kolaborasi Pengabdian pada Masyarakat	Universitas Padjadjaran	3 Tahun	Nomor : 1254/UN6.G/PKS/2023 Nomor : 13371/UN19.5.1.1.1/LP.00.01/2023
4	Administrasi Bisnis	S-1	Perjanjian Kerjasama	Penyelenggaraan program merdeka belajar-kampus merdeka; Pertukaran mahasiswa; Pertukaran dosen; Kolaborasi riset; Kolaborasi pengabdian kepada Masyarakat	Administrasi Bisnis Universitas Dharmawangsa	3 Tahun	Nomor: 19303/UN19.5.1.1.1/LP.00.01/2023 Nomor: D.040.10.082023.222 B
5	Ilmu Pemerintahan	S-1	MoU	Penyelenggaraan Program MBKM, Pertukaran Mahasiswa, Pertukaran Dosen, Kolaborasi Riset, Kolaborasi Pengabdian pada Masyarakat	Universitas Padjadjaran	3 Tahun	Nomor : 1256/UN6.G/PKS/2023 Nomor : 13203/UN19.5.1.1.1/LP.00.01/2024

No.	Prodi	Jenjang	Bentuk Kerjasama	Kriteria Mitra Kerjasama	Nama Mitra	Periode Kerjasama	Data Dukung (Nomor MoU)
6	Ilmu Administrasi Publik	S-1	MoU	Penyelenggaraan Program MBKM, Pertukaran Mahasiswa, Pertukaran Dosen, Kolaborasi Riset, Kolaborasi Pengabdian pada Masyarakat	Universitas Padjadjaran	3 Tahun	Nomor : 1255/UN6.G/PKS/2023 Nomor : 13227/UN19.5.1.1.1/LP.00.01/2025
7	Ilmu Administrasi Publik	S-1	Perjanjian Kerjasama	Implementasi Kerjasama Proram Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Tahun 2023	Prodi Administrasi Negara Universitas Negeri Padang	1 Tahun	Nomor: 1889/UN35.6/TU/2023 Nomor:
8	Ilmu Administrasi Publik	S-1	Perjanjian Kerjasama	Penyelenggaraan program merdeka belajar-kampus merdeka; Pertukaran mahasiswa; Pertukaran dosen; Kolaborasi riset; Kolaborasi pengabdian kepada Masyarakat	Administrasi Publik Universitas Dharmawangsa	3 Tahun	Nomor: 19304/UN19.5.1.1.1/LP.00.01/2023 Nomor: D.040.10.082023.222 B
9	Ilmu Administrasi Publik	S-1	IA	Oubond mahasiswa dalam mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau	Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Maritim Raja Ali Haji Tg. Pinang	1 Tahun	Nomor: 16/UN19.5.1.1.1/TU.00/2023 Nomor: 951/UN53.5/TU/2023

No.	Prodi	Jenjang	Bentuk Kerjasama	Kriteria Mitra Kerjasama	Nama Mitra	Periode Kerjasama	Data Dukung (Nomor MoU)
				selama satu semester secara offline (tatap muka)			
10	Program Studi Ilmu Administrasi Publik; Jurusan Ilmu Pemerintahan; Jurusan Ilmu Komunikasi	S-1	Perjanjian Kerjasama	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	FISIP - Universitas Diponegoro	1 Tahun	Nomor: 172/UN7.F7/KS/III/2023 Nomor: 6368/UN19.5.1.1.1/LP.00.01/2023
11	Hubungan Internasional	S-1	MoU	Penyelenggaraan Program MBKM, Pertukaran Mahasiswa, Pertukaran Dosen, Kolaborasi Riset, Kolaborasi Pengabdian pada Masyarakat	Universitas Padjadjaran	3 Tahun	Nomor : 1251/UN6.G/PKS/2023 Nomor : 13125/UN19.5.1.1.1/LP.00.01/2026
12	Hubungan Internasional	S-1	Cooperation Agreement	Social Service Activities; Research Studies on Matters of Mutual Interest; Capacity Building and Training Activities; Academic Activities; Raising Awareness Activities	The International Organization for Migration (IOM)		

No.	Prodi	Jenjang	Bentuk Kerjasama	Kriteria Mitra Kerjasama	Nama Mitra	Periode Kerjasama	Data Dukung (Nomor MoU)
13	Hubungan Internasional	S-1	Perjanjian Kerjasama	Penyelenggaraan program merdeka belajar-kampus merdeka; Pertukaran dosen mengajar (Pertukaran mahasiswa;; Kolaborasi riset; Kolaborasi pengabdian kepada Masyarakat	Hubungan Internasional - Universitas Bangka Belitung	3 Tahun	Nomor: 1717/UN50/K/KS/2023 Nomor: 21445/UN19.5.1.1.1/LP.00.01/2023
14	Ilmu Komunikasi	S-1	MoU	Pelaksanaan Magang setara dengan 20 SKS, Pelaksanaan MBKM Khusus Media Online, Praktisi Mengajar, Seminar dan Lokakarya, Penyelenggaraan Penelitian Mahasiswa dan Dosen	RIAUONLINE.CO.ID	3 Tahun	Nomor : 14433/UN19/AK.00.07/2023 Nomor : 01/PKS/ROL/VI/2023
15	Ilmu Komunikasi	S-1	Perjanjian Kerjasama	Penyelenggaraan program merdeka belajar-kampus merdeka; Pertukaran mahasiswa; Pertukaran dosen; Kolaborasi riset; Kolaborasi pengabdian kepada Masyarakat	Ilmu Komunikasi Universitas Dharmawangsa	3 Tahun	Nomor: 19305/UN19.5.1.1.1/LP.00.01/2023 Nomor: D.040.10.082023.222 B

No.	Prodi	Jenjang	Bentuk Kerjasama	Kriteria Mitra Kerjasama	Nama Mitra	Periode Kerjasama	Data Dukung (Nomor MoU)
16	Ilmu Komunikasi	S-1	Nota Kesepahaman	Penyelenggaraan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat; Penyelenggaraan pertemuan dan diskusi ilmiah (Call for Paper, Perkuliahan Tamu, Seminar); Penyelenggaraan kerjasama publikasi jurnal ilmiah	FIKOM-BM Universitas Ciputra	3 Tahun	Nomor: 111/UC-SoC/MoU/II/2023 Nomor: 14680/UN19.5.1.1.1/LP.00.01/2023
17	Ilmu Komunikasi	S-1	Perjanjian Kerjasama	Penyelenggaraan program merdeka belajar - kampus merdeka; Pertukaran dosen mengajar (Dosen tamu/Kuliah umum); Penyelenggaraan penelitiin bersama/publikasi artikel/jurnal ilmiah bersama; Pengabdian masyarakat bersama; dan kegiatan lain yang disepakati	Ilmu Komunikasi - STIK-P Medan	3 Tahun	Nomor: 24400/UN19.5.1.1.1/LP.00.01/2023 Nomor: 003/MoU/YPAI-STIKP/VIII/2023

No.	Prodi	Jenjang	Bentuk Kerjasama	Kriteria Mitra Kerjasama	Nama Mitra	Periode Kerjasama	Data Dukung (Nomor MoU)
18	Ilmu Komunikasi	S-1	Perjanjian Kerjasama	Pelaksanaan program pendidikan dan pengajaran; Penelitian bersama; Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat; penyelenggaraan kegiatan merdeka belajar kampus merdeka (MBKM); dan kegiatan lainnya yang disepakati	FISIP - Universitas Mercu Buana	3 Tahun	Nomor: 01-3-4/166/MoA/VIII/2023 Nomor: 22013/UN19.5.1.1.1/LP.00.01/2023
19	Usaha Perjalanan Wisata	D-4	MoU	Penyelenggaraan Kuliah Tamu dan Kuliah Umum, Penyelenggaraan Seminar dan Lokakarya, Penyelenggaraan Penelitian Mahasiswa dan Dosen, Pelaksanaan Magang setara dengan 20 SKS, Pelaksanaan Pengabdian Mahasiswa dan Dosen, Pelaksanaan Kampus Merdeka Belajar (MBKM)	PT. Bentala Asri Perkasa (TRAVELIV)	5 Tahun	Nomor : 13300/UN19.5.1.1.1/LP.00.01/2023 Nomor : 036/B/BAP-MOU/VI/2023

No.	Prodi	Jenjang	Bentuk Kerjasama	Kriteria Mitra Kerjasama	Nama Mitra	Periode Kerjasama	Data Dukung (Nomor MoU)
20	Usaha Perjalanan Wisata	D-4	Perjanjian Kerjasama	Penyelenggaraan Kuliah Tamu dan Kuliah Umum, Penyelenggaraan Seminar dan Lokakarya, Penyelenggaraan Penelitian Mahasiswa dan Dosen, Pelaksanaan Magang setara dengan 20 SKS, Pelaksanaan Pengabdian Mahasiswa dan Dosen, Pelaksanaan Kampus Merdeka Belajar (MBKM)	Porta by the Ambarukmo	5 Tahun	Nomor: 17531/UN19.5.1.1.1/LP.00.01/2023 Nomor: 002/VIII/PKS/PbtA/HR/2023
21	Usaha Perjalanan Wisata	D-4	Perjanjian Kerjasama	Penyelenggaraan Kuliah Tamu dan Kuliah Umum, Penyelenggaraan Seminar dan Lokakarya, Penyelenggaraan Penelitian Mahasiswa dan Dosen, Pelaksanaan Magang setara dengan 20 SKS, Pelaksanaan Pengabdian Mahasiswa dan Dosen, Pelaksanaan Kampus Merdeka Belajar (MBKM)	Merapi Tour & Travel Yogyakarta	5 Tahun	Nomor: 17536/UN19.5.1.1.1/LP.00.01/2023 Nomor: 085/MTT/VII/2023

No.	Prodi	Jenjang	Bentuk Kerjasama	Kriteria Mitra Kerjasama	Nama Mitra	Periode Kerjasama	Data Dukung (Nomor MoU)
22	Usaha Perjalanan Wisata	D-4	Perjanjian Kerjasama	Penyelenggaraan Kuliah Tamu dan Kuliah Umum, Penyelenggaraan Seminar dan Lokakarya, Penyelenggaraan Penelitian Mahasiswa dan Dosen, Pelaksanaan Magang setara dengan 20 SKS, Pelaksanaan Pengabdian Mahasiswa dan Dosen, Pelaksanaan Kampus Merdeka Belajar (MBKM)	PT. Werkudara Nirwana Sakti Yogyakarta	5 Tahun	Nomor: 17533/UN19.5.1.1.1/LP.00.01/2023 Nomor: WNS/DOC.SK/03.040.00/VII/2023
23	Usaha Perjalanan Wisata	D-4	Perjanjian Kerjasama	Penyelenggaraan Program Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian	Taman Sari Yogyakarta	1 Tahun	Nomor: 17536/UN19.5.1.1.1/LP.00.01/2023 Nomor: 30/KW.RK/Sura.VII/Jimawal.1957.2023
24	Usaha Perjalanan Wisata	S-1	Berita Acara Kesepakatan	Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)	Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X	5 Tahun	Nomor: 1743/UN19.5.1.1.1/LP.00.01/2023 Nomor: 2552/F7.12/HM.00.03/2023

No.	Prodi	Jenjang	Bentuk Kerjasama	Kriteria Mitra Kerjasama	Nama Mitra	Periode Kerjasama	Data Dukung (Nomor MoU)
28	Usaha Perjalanan Wisata	D-4	Perjanjian Kerjasama	Penyelenggaraan Kuliah Tamu dan Kuliah Umum, Penyelenggaraan Seminar dan Lokakarya, Penyelenggaraan Penelitian Mahasiswa dan Dosen, Pelaksanaan Magang setara dengan 20 SKS, Pelaksanaan Pengabdian Mahasiswa dan Dosen, Pelaksanaan Kampus Merdeka Belajar (MBKM)	PT. Riau Interzona Prima Tour & Travel	5 Tahun	Nomor: 18576/UN19.5.1.1.1/LP.00.01/2023 Nomor: 10/8/23
29	Usaha Perjalanan Wisata	D-4	Nota Perjanjian Kerjasama	Penyelenggaraan Kuliah Tamu dan Kuliah Umum, Penyelenggaraan Seminar dan Lokakarya, Penyelenggaraan Penelitian Mahasiswa dan Dosen, Pelaksanaan Magang setara dengan 20 SKS, Pelaksanaan Pengabdian Mahasiswa dan Dosen, Pelaksanaan Kampus Merdeka Belajar (MBKM)	PT. Govana Mandiri Sejahtera	5 Tahun	Nomor : 21447/UN19.5.1.1.1/LP.00.01/2023 Nomor : 035/GMS/PJ-KJS/VIII/2023

No.	Prodi	Jenjang	Bentuk Kerjasama	Kriteria Mitra Kerjasama	Nama Mitra	Periode Kerjasama	Data Dukung (Nomor MoU)
30	Ilmu Komunikasi	S-1	Perjanjian Kerjasama	Penyelenggaraan program merdeka belajar - kampus merdeka; Pertukaran mahasiswa; Pertukaran dosen; Kolaborasi riset; Kolaborasi pengabdian pada masyarakat.	Ilmu Komunikasi - Universitas Brawijaya	3 Tahun	
31	FISIP Universitas Riau	S-1, S-2, S3	Kesepakatan Kerjasama	Pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pengawasan partisipatif pemilu dan pemilihan serentak sesuai tri dharma perguruan tinggi berbasis MBKM; Pemantauan bersama; Pendidikan politik dan hukum kepada masyarakat serta peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;	BAWASLU Kabupaten Bengkalis	5 Tahun	Nomor: 69/PM.04/K.RA-01/3/2023; Nomor: 4948/UN19.5.1.1.1/LP.00.01/2023

No.	Prodi	Jenjang	Bentuk Kerjasama	Kriteria Mitra Kerjasama	Nama Mitra	Periode Kerjasama	Data Dukung (Nomor MoU)
32	FISIP Universitas Riau	S-1, S-2, S3	Perjanjian Kerjasama	Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Peraturan Daerah Kabupaten Layak Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu	5 Tahun	Nomor: 6.1/PKS/II/2023 Nomor: 16746/UN19.5.1.1.1/DT.03.02/2023
33	Administrasi Publik	S-1	Perjanjian Kerjasama	Penyelenggaraan program merdeka belajar-kampus merdeka; Pertukaran mahasiswa; Pertukaran dosen; Kolaborasi riset; Kolaborasi pengabdian kepada Masyarakat	Universitas Medan Area	3 Tahun	Nomor: 23004/UN19.5.1.1.1/LP.00.01/2023 Nomor: 1581/FIS.0/01/VIII/2023
34	Ilmu Pemerintahan	S-1	Perjanjian Kerjasama	Penyelenggaraan program merdeka belajar-kampus merdeka; Pertukaran mahasiswa; Pertukaran dosen; Kolaborasi riset; Kolaborasi pengabdian kepada Masyarakat	Universitas Medan Area	3 Tahun	Nomor: 23002/UN19.5.1.1.1/LP.00.01/2023 Nomor: 1580/FIS.0/01/VIII/2023

No.	Prodi	Jenjang	Bentuk Kerjasama	Kriteria Mitra Kerjasama	Nama Mitra	Periode Kerjasama	Data Dukung (Nomor MoU)
35	Ilmu Komunikasi	S-1	Perjanjian Kerjasama	Penyelenggaraan program merdeka belajar-kampus merdeka; Pertukaran mahasiswa; Pertukaran dosen; Kolaborasi riset; Kolaborasi pengabdian kepada Masyarakat	Universitas Medan Area	3 Tahun	Nomor: 23005/UN19.5.1.1.1/LP.00.01/2023 Nomor: 1582/FIS.0/01/VIII/2023
36	FISIP Universitas Riau	S-1, S-2, S3	Perjanjian Kerjasama	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	STISIP Persada Bunda	4 Tahun	Nomor: 047/A.1 STISIPPB/II/2023 Nomor: 14597/UN19.5.1.1.1/LP.00.01/2023
37	FISIP Universitas Riau	S-1	Perjanjian Kerjasama	Program magang dan pengembangan masyarakat; Program pengabdian kepada masyarakat; Sosialisasi, diskusi publik dan pengembangan kapasitas mahasiswa	LBH Pekanbaru	1 Tahun	Nomor: 21710/UN19.5.1.1.1/LP.00.01/2023
38	FISIP Universitas Riau	S-1	Perjanjian Kerjasama	Program merdeka belajar - kampus merdeka (MBKM), penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat	Bappeda Kabupaten Bengkalis	3 Tahun	Nomor: 9164/UN19.5.1.1.1/AK.00.07/2023

No.	Prodi	Jenjang	Bentuk Kerjasama	Kriteria Mitra Kerjasama	Nama Mitra	Periode Kerjasama	Data Dukung (Nomor MoU)
39	Ilmu Pemerintahan; Ilmu Komunikasi; Sosiologi; Ilmu Hubungan Internasional; Ilmu Administrasi Publik; Administrasi Bisnis	S-1	Perjanjian Kerjasama	Program Mardeka Belajar-Kampus Mardeka dan Kegiatan Akademik Lainnya pada Jurusan/Program studi	Universitas Lampung	3 Tahun	Nomor : 22394/IN19.5.1.1.1/LP.00.01/2023 NOMOR : 760/UN26.16/HK.01.03/2023
40	Usaha Perjalanan Wisata	S-1	Nota Perjanjian Kerjasama	Penyelenggaraan Kuliah Tamu dan Kuliah Umum, Penyelenggaraan Seminar dan Lokakarya, Penyelenggaraan Penelitian Mahasiswa dan Dosen, Pelaksanaan Magang setara dengan 20 SKS, Pelaksanaan Pengabdian Mahasiswa dan Dosen, Pelaksanaan Kampus Merdeka Belajar (MBKM)	PT. Jaya Utama Wisata Tour & Travel	5 Tahun	Nomor : 21475/UN19.5.1.1.1/LP.00.01/2023 Nomor : 012-VIII/JUW-SLK/2023

No.	Prodi	Jenjang	Bentuk Kerjasama	Kriteria Mitra Kerjasama	Nama Mitra	Periode Kerjasama	Data Dukung (Nomor MoU)
41	FISIP Universitas Riau	S-1, S-2, S3	Kesepakatan Kerjasama	Pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pengawasan partisipatif pemilu dan pemilihan serentak sesuai tri dharma perguruan tinggi berbasis MBKM; Pemantauan bersama; Pendidikan politik dan hukum kepada masyarakat serta peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; Kerjasama lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak.	BAWASLU Kabupaten Siak	5 Tahun	Nomor: 13124/UN19.5.1.1.1/LP.00.01/2023 Nomor: 071/HM.02.04/K.RA-09/06/2023
42	FISIP Universitas Riau	S-1	Perjanjian Kerjasama	Publikasi bersama dan pelaksanaan kegiatan pendukung merdeka belajar - kampus merdeka bagi mahasiswa dan dosen	Yayasan Pustaka Obor Indonesia	1 Tahun	
43	FISIP Universitas Riau	S-1	Nota Kesepahaman Kerjasama	Pengembangan Sumber Daya Manusia di Jurusan Hubungan Internasional Universitas Riau	PT. Henci arira Sata	2 Tahun	No.060/HAS-FISIP UNRI/X.2023 No.26406/UN19.5.1.1.1/LP.00.01/2023

No.	Prodi	Jenjang	Bentuk Kerjasama	Kriteria Mitra Kerjasama	Nama Mitra	Periode Kerjasama	Data Dukung (Nomor MoU)
44	FISIP Universitas Riau	S-1	Nota Kesepahaman Kerjasama	Pengembangan Sumber Daya Manusia di Jurusan Hubungan Internasional Universitas Riau	Al-Ahmadi Entrepreneurship Centre	2 Tahun	No. 18/MOU/AEC-FISIP UNRI/10/23 No. 26407/UN19.5.1.1.1/LP.00.01/2023
45	FISIP Universitas Riau	S-1, S-2	Nota Perjanjian Kerjasama	Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Riauterkini. Com		Nomor : 34200/UN19.5.1.1.1/LP.00.01/2023 NOMOR : 109/MOU/RTC/RTU/XI/2023
46	Program Studi Ilmu Administrasi Publik; Jurusan Ilmu Pemerintahan; Jurusan Ilmu Komunikasi; Prodi Magister Administrasi Publik; Prodi Magister Ilmu Komunikasi; Prodi Magister Ilmu Politik; Prodi Doktor Administrasi Publik	S-1, S-2, S3	Perjanjian Kerjasama	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Prodi Doktor Administrasi Publik; Prodi Doktor Ilmu Sosial; Prodi Magister Administrasi Publik; Prodi Maagister Ilmu Politik; Prodi Magister Ilmu Komunikasi; Prodi Magister Administrasi Bisnis; Prodi Administrasi Publik; Prodi Ilmu Pemerintahan; Prodi Ilmu Komunikasi; Prodi Administrasi Bisnis; Prodi Hubungan Internasional	1 Tahun	Nomor: 172/UN7.F7/KS/III/2023 Nomor: 6368/UN19.5.1.1.1/LP.00.01/2023
47	Ilmu Komunikasi	S-1	Perjanjian Kerjasama	Penyelenggaraan program merdeka belajar - kampus merdeka; Pertukaran mahasiswa; Pertukaran dosen; Kolaborasi riset; Kolaborasi pengabdian	Ilmu Komunikasi - Universitas Brawijaya	3 Tahun	

No.	Prodi	Jenjang	Bentuk Kerjasama	Kriteria Mitra Kerjasama	Nama Mitra	Periode Kerjasama	Data Dukung (Nomor MoU)
				pada masyarakat.			
48	Ilmu Komunikasi	S-1	Perjanjian Kerjasama	Penyelenggaraan program merdeka belajar - kampus merdeka; Pertukaran mahasiswa; Pertukaran dosen; Kolaborasi riset; Kolaborasi pengabdian pada masyarakat.	FISIP - Universitas Andalas	3 Tahun	
49	FISIP Universitas Riau	S-1, S-2	Nota Perjanjian Kerjasama	Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat	PT. Bumi Siak Pusako		
50	Ilmu Pemerintahan; Ilmu Komunikasi; Sosiologi; Hubungan Internasional; Ilmu Administrasi Publik; Administrasi Bisnis	S-1	Perjanjian Kerjasama	Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan Kegiatan Akademik Lainnya	Universitas Negeri Surabaya	3 Tahun	Nomor : 29203/UN19.5.1.1.1/LP.00.01/2023 NOMOR : 88992/UN38.4/KS.03.02/2023
51	Ilmu Pemerintahan; Ilmu Komunikasi; Sosiologi; Hubungan Internasional; Ilmu Administrasi Publik; Administrasi Bisnis	S-1	Perjanjian Kerjasama	Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan Kegiatan Akademik Lainnya pada Jurusan/Program studi	Universitas Airlangga	3 Tahun	Nomor : 29200/UN19.5.1.1.1/LP.00.01/2023 Nomor : 9551/UN3.FISIP/HK.07/2023

No.	Prodi	Jenjang	Bentuk Kerjasama	Kriteria Mitra Kerjasama	Nama Mitra	Periode Kerjasama	Data Dukung (Nomor MoU)
52	Administrasi Publik; Ilmu Pemerintahan; Ilmu Komunikasi; Magister Administrasi Publik; Magister Ilmu Komunikasi; Magister Ilmu Politik; Program Studi Doktor Administrasi Publik	S-1,S-2,S-3	Perjanjian Kerjasama	Penyelenggaraan kegiatan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat : Bidang Pendidikan, bidang penelitian, bidang pengabdian kepada masyarakat, publikasi bersama sesuai dengan bidang ilmu, penggunaan sumber daya bersama untuk pendidikan, bidang Kerjasama	Univrsitas ponegoro, semarang	1 Tahun	172/UN7.F7/KS/III/2023 6368/UN19.5.1.1.1./LP.00.01/2023
53	Usaha Perjalanan Wisata		Nota Perjanjian Kerjasama	Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat, Kuliah tamu dan kuliah umum, Seminar dan lokakarya, penyelenggara penelitian mahasiswa, pelaksanaan magang serta 20 SKS, pelaksanaan pengabdian mahasiswa dan dosen	Prime Park Hotel Pekanbaru	2 Tahun	24242/UN19.4.1.1.1/Lp.00.01/2023

1.2.2. PERMASALAHAN

Dalam rangka mewujudkan proses pembelajaran di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, masih ada beberapa sarana dan prasarana yang perlu dibenahi, diantaranya:



Gambar 1. 7 sarana dan prasarana yang perlu dibenahi di FISIP Universitas Riau

Publikasi ilmiah baik terakreditasi nasional dan internasional yang terindeks *scoop* terutama yang ber*impact factor* di kalangan dosen masih rendah. Hal ini berimplikasi terhadap lambatnya peningkatan kualitas dan kuantitas dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau untuk menjadi guru besar (profesor). Oleh sebab itu, perlu dilakukan peningkatan kinerja tim percepatan guru besar secara intensif, menambah kegiatan yang mendukung percepatan dan peningkatan kualitas publikasi jurnal.

Dosen berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional Lektor, perlu didukung untuk meningkatkan jumlah Doktor di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Doktor dengan jabatan Fungsional Lektor Kepala yang belum banyak, menjadi tuntutan bagi penjaminan mutu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

HKI atau paten (produk dan buku teks) di kalangan dosen masih belum terdata dengan baik sebab rendahnya motivasi dosen untuk mendaftarkan karya intelektualnya. Selain itu diperlukan pendampingan proses pendaftaran itu sendiri dan sosialisasi insentif yang disediakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik bagi HKI yang berhasil diterbitkan.

Jumlah alumni yang mengisi aplikasi *tracer study* sangat rendah dibandingkan jumlah alumni. Saat ini Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik belum mendapatkan data terkait alumni dikarenakan mahasiswa yang sudah lulus masih sedikit yang melaporkan atau mengisi data di aplikasi *tracer study* yang sudah disediakan. Program dan kegiatan kolaboratif antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau dengan alumni diharapkan bisa menjadi solusi untuk mendapatkan data ini.

Selain yang terdapat dalam perjanjian kinerja, terdapat permasalahan lain yang berkaitan dengan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Pengmas) yang tidak sesuai dengan Rencana Induk Penelitian Universitas Riau. Tema-tema yang ditentukan oleh Fakultas tidak selaras dengan yang disediakan oleh universitas meskipun dalam skema penelitian yang sama.

Sementara itu, pengelolaan Program Pascasarjana (S2) belum sepenuhnya efektif. Hal ini dilihat dari keadaan dimana Program Pascasarjana (S2) ini dikelola oleh dua lembaga yaitu fakultas dan program pascasarjana universitas, yang sebenarnya tidak lazim. Hakekatnya Program Studi Pascasarjana (S2 dan S3) dengan karakter monodisiplin menjadi bagian integral pengelolaan Fakultas.

1.3. KONDISI EKSTERNAL

Ekspektasi masyarakat atas keberadaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau terus meningkat dari waktu ke waktu. Pada saat pertama kali berdiri, masyarakat berharap fakultas ini bisa memerankan dirinya sebagai *agent of education*. Selanjutnya saat fakultas ini sudah mampu memerankan dirinya sebagai *agent of education*, masyarakat berharap lebih agar institusi ini bisa memerankan diri sebagai *agent of research and development*. Harapan tersebut terus berlanjut sampai sekarang dimana masyarakat berharap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau bisa memerankan dirinya sebagai *agent of knowledge transfer*, dan pada akhirnya bisa berperan sebagai *agent of economic development*.

Pesatnya perkembangan pembangunan di Provinsi Riau baik di tingkat kota maupun kabupaten semakin menuntut tersedianya sumber daya manusia yang dapat diandalkan sebagai subyek dari pembangunan. Untuk itu, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Riau mengharapkan peran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau untuk meningkatkan dan memperkuat daya saing sumber daya manusianya dengan mewujudkan program-program Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang lebih nyata, membumi, dan lebih dapat dirasakan langsung oleh civitas akademika dan masyarakat secara umum. Selain itu, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menjawab kebutuhan pengetahuan dalam bidang sosial dan politik di tingkat daerah maupun nasional, membantu menciptakan lapangan kerja dengan basis keilmuan sosial dan politik, kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, menyiapkan rancang bangun

yang dibutuhkan pemerintah, swasta, dan masyarakat dengan cara menyediakan model-model kebijakan mutakhir yang siap untuk dipakai sesuai dengan tantangan di lapangan.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau juga diharapkan dapat menyediakan dan mengatur pendanaan yang memadai bagi penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan standar minimum. Lebih lanjut, fakultas ini dituntut untuk mendorong pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan yang berasal dari institusinya. Pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat mengharapkan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau untuk menyediakan model pembangunan berkelanjutan di bidang sosial kemasyarakatan, SDM yang terampil, dukungan untuk peningkatan produktivitas, dan *risk sharing*. Tambahan pula, masyarakat mengharapkan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau berkontribusi menyiapkan rancang bangun model kebijakan yang tepat guna.

Lebih lanjut, masyarakat mengharapkan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau dapat menjadi pusat unggulan, penganggaran yang lebih dapat dirasakan oleh civitas akademika, administrasi keuangan memperhatikan akuntabilitas, penataan kegiatan penelitian dan pengembangan yang lebih dapat diandalkan, kerjasama yang lebih nyata dengan instansi pemerintah maupun swasta untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangan SDM terampil dibidangnya, turut berperan serta dalam kegiatan transfer pengetahuan di bidang sosial dan politik dari luar negeri ke dalam negeri dan dalam negeri ke dalam negeri, mampu memobilisasi tenaga pendidik untuk turut serta dalam kegiatan penelitian dan pengembangan ke pemerintah, swasta dan masyarakat, dan mampu melakukan kegiatan komersialisasi hasil penelitian dan pengembangan.

Lebih jauh, fakultas juga dituntut mampu membuat instrumen kebijakan yang mengantar terjadinya penguatan kelembagaan di semua level, program beasiswa yang terintegrasi, perhatian terhadap HKI, penguatan

jaringan antara lembaga penelitian dan pengembangan, pemerintah, swasta, dan masyarakat, program penguatan kegiatan penelitian dan pengembangan, dan pendayagunaan ilmu pengetahuan di bidang sosial dan politik.

1.3.1. PELUANG

1. Teknologi maju memberikan akses positif bagi komunikasi ilmiah di perguruan tinggi;
2. Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan industri di daerah Riau yang semakin menunjukkan peningkatan;
3. Perhatian dan dukungan yang besar dari pemerintah Provinsi Riau bagi pengembangan perguruan tinggi;
4. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap peran dan fungsi perguruan tinggi bagi pengembangan SDM di daerah Riau;
5. Semakin tingginya minat masyarakat kuliah di fakultas ini;
6. Perhatian dunia industri terhadap perkembangan fakultas ke depan melalui pemberian bantuan atau beasiswa;
7. Semakin besar sumber pendanaan yang ditawarkan pihak industri guna melaksanakan fungsi tridarma perguruan tinggi;
8. Semakin banyaknya tuntutan pemerintah terhadap keberadaan institusi ini dalam pelbagai aktivitas pembinaan dan penelitian kemasyarakatan di daerah Riau;
9. Sebagian tenaga pendidik memiliki kualifikasi pendidikan S2 dan S3.
10. Cukup tingginya rekrutmen oleh *stakeholders* terhadap alumni di Provinsi Riau.

1.3.2. ANCAMAN

1. Besarnya kompensasi yang ditawarkan institusi luar berbanding kompensasi yang diberikan perguruan tinggi (fakultas), sehingga menyebabkan kemungkinan terbatasnya waktu yang tersedia bagi kegiatan akademik di sejumlah jurusan dan program studi bagi tenaga pendidik;

2. Perkembangan pesat kemajuan sains dan teknologi (dampak globalisasi) yang seolah-olah menjadikan fakultas belum dapat memanfaatkan cenderung tertinggal;
3. Globalisasi mensyaratkan kualifikasi lulusan melebihi dari kondisi jurusan dan program studi yang ada;
4. Persaingan yang semakin ketat antar lembaga atau perguruan tinggi lainnya untuk mendapatkan sumber dana;
5. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas lulusan fakultas ini;
6. Dukungan dana langsung dari pemerintah daerah tidak segera diperoleh sesuai kebutuhan fakultas, jurusan dan program studi.

Berikut ini penjabaran dari kekuatan, kelemahan yang dimiliki Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau saat ini :

Kekuatan :

1. Sebagian besar tenaga pendidik berperan diberbagai lembaga luar yang berhubungan dengan sumber-sumber kemitraan dan sosial kemasyarakatan yang dapat mempermudah program kerjasama dengan pihak luar;
2. Kesungguhan di kalangan civitas akademik untuk memajukan fakultas;
3. Kerjasama yang baik antara universitas dengan instansi swasta dalam bidang pemberian bantuan dana beasiswa kepada mahasiswa di jurusan dan program studi;
4. Terjalin kerja sama dengan pemerintah daerah dan pihak swasta untuk memberikan bantuan beasiswa bagi tenaga pendidik untuk melanjutkan pendidikan S2 dan S3;
5. Memiliki potensi lahan yang luas untuk pengembangan pembangunan fisik fakultas;
6. Gaya kepemimpinan fakultas yang berkencenderungan berkarakter demokratis.

Kelemahan :

1. Sistem pengelolaan keuangan yang masih bersifat sentralistis;
2. Belum terciptanya suasana akademik yang kondusif di kalangan tenaga pendidik dan mahasiswa;
3. Interaksi tenaga pendidik dan mahasiswa masih satu arah dan belum berjalan efektif;
4. Komposisi jumlah tenaga pendidik dan mahasiswa belum proporsional;
5. Kemampuan dan kemahiran tenaga pendidik dalam berbahasa asing relatif rendah;
6. Karakteristik mahasiswa yang bersifat homogen menyebabkan suasana kompetitif rendah;
7. Proporsi dana fakultas yang terbagi dalam membiayai kegiatan akademis dan penyediaan infrastruktur fisik belum proporsional;
8. Jurusan dan program studi belum memiliki ruang tenaga pendidik yang representatif.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. VISI

Visi Universitas Riau adalah “Menjadi Universitas Riset Unggul Bermartabat di Bidang Sains dan Teknologi di Kawasan Asia Tenggara Tahun 2035”.

Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik adalah:



Gambar 2. 1. Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

2.2. MISI

Misi Universitas Riau adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan tri dharma perguruan tinggi yang unggul;
2. Melaksanakan tata kelola universitas yang bermartabat;
3. Mengembangkan potensi keunggulan mahasiswa;
4. Menciptakan sistem informasi yang handal dan menerapkan inovasi bagi kepentingan masyarakat.

Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik :



Gambar 2. 2 Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

2.3. TUJUAN

Tujuan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ialah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul di bidang sosial dan politik di Asia Tenggara.
2. Mewujudkan tata kelola Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang bermartabat.
3. Menghasilkan mahasiswa dan lulusan berkarakter yang baik dan kompeten dalam pengembangan sosial dan politik.
4. Mewujudkan sistem perencanaan dan kerjasama berbasis teknologi informasi.

2.4. SASARAN STRATEGI

Berikut ini Sasaran Strategis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik :

1. Terwujudnya program studi yang berkualitas di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Terbentuknya Tata Kelola Berbasis *Good Faculty Governance (GFG)*.
3. Terciptanya kemandirian dan prestasi mahasiswa yang berdaya saing tinggi.
4. Tersedianya sistem perencanaan, teknologi informasi yang unggul.

2.5. ARAH KEBIJAKAN

Arah Kebijakan Universitas Riau terdiri atas;

1. Peningkatan kualitas akreditasi perguruan tinggi dan prodi bertaraf internasional
2. Pengembangan system tata kelola perguruan tinggi yang baik
3. Pengembangan minat bakat dan kompetensi mahasiswa pada taraf nasional dan internasional
4. Pengembangan system inovasi dan informasi iptek.

Arah Kebijakan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik terdiri atas;

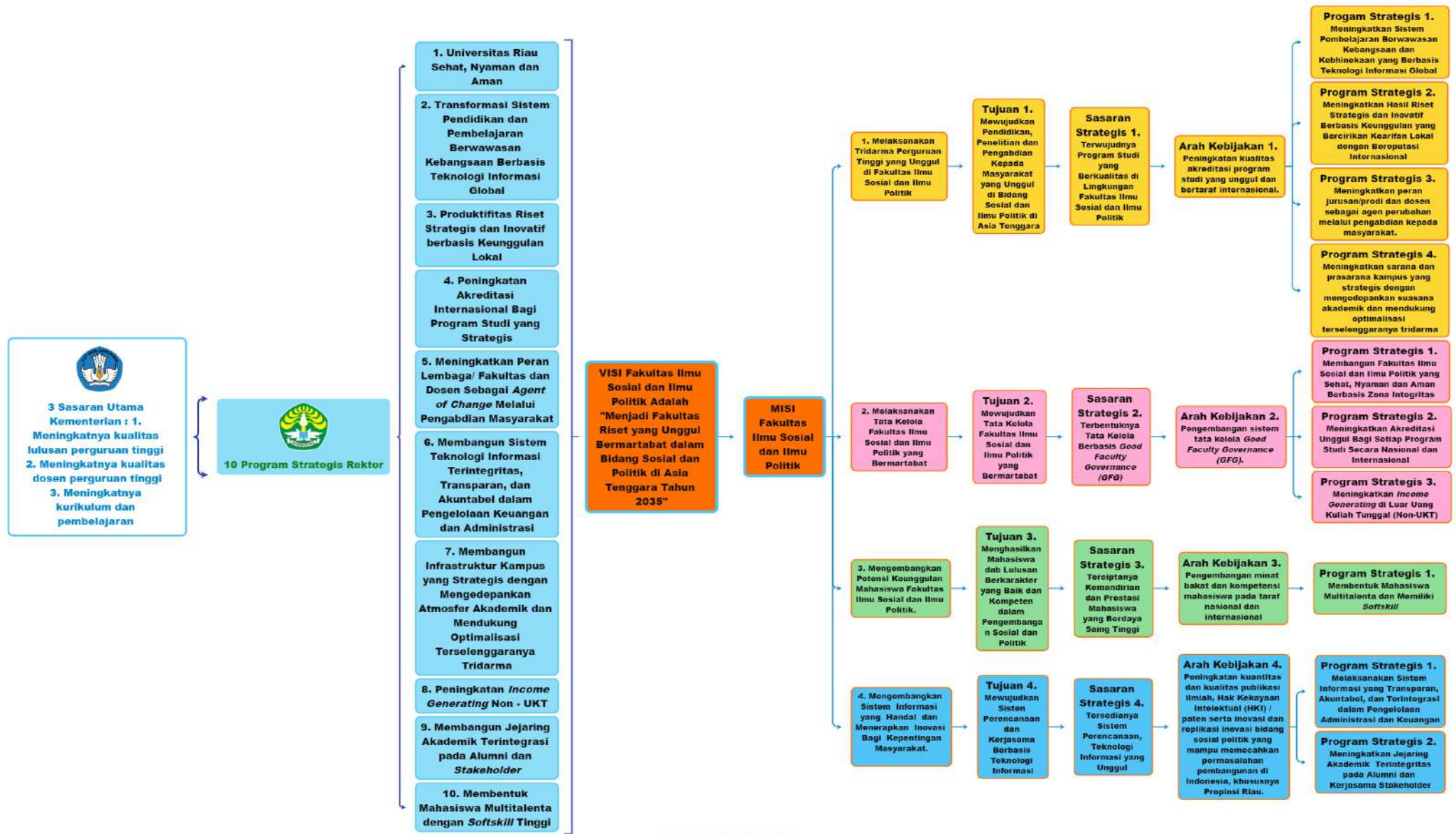
1. Peningkatan kualitas akreditasi program studi yang unggul dan bertaraf internasional.
2. Pengembangan sistem tata kelola *Good Faculty Governance (GFG)*.
3. Pengembangan sarana prasarana pendukung proses belajar mengajar.
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) / paten serta inovasi dan replikasi inovasi bidang sosial politik yang mampu memecahkan permasalahan pembangunan di Indonesia, khususnya Propinsi Riau.

2.6. PROGRAM STRATEGIS

Berikut ini Program Strategis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik :

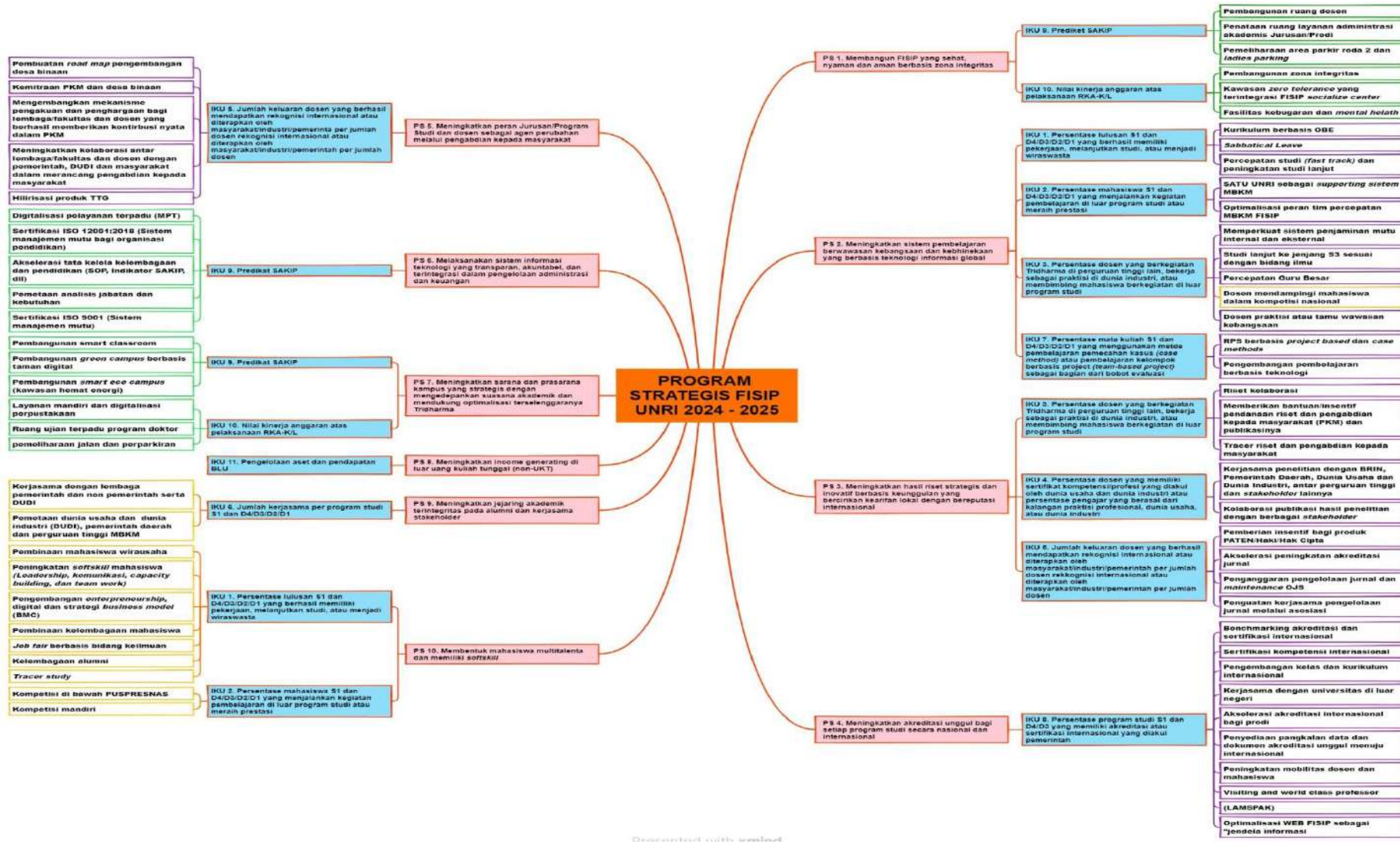
1. Membangun Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang sehat, nyaman dan aman berbasis zona integritas

2. Meningkatkan sistem pembelajaran berwawasan kebangsaan dan kebhinekaan yang berbasis teknologi informasi global
3. Meningkatkan hasil riset strategis dan inovatif berbasis keunggulan yang bercirikan kearifan lokal dengan bereputasi internasional
4. Meningkatkan akreditasi unggul bagi setiap program studi secara nasional dan internasional
5. Meningkatkan peran jurusan/prodi dan dosen sebagai agen perubahan melalui pengabdian kepada masyarakat.
6. Melaksanakan sistem informasi teknologi yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi dalam pengelolaan administrasi dan keuangan
7. Meningkatkan sarana dan prasarana kampus yang strategis dengan mengedepankan suasana akademik dan mendukung optimalisasi terselenggaranya tridarma
8. Meningkatkan *income generating* di luar Uang Kuliah Tunggal (non-UKT)
9. Meningkatkan jejaring akademik terintegritas pada alumni dan kerjasama *stakeholder*
10. Membentuk Mahasiswa multitalenta dan memiliki *softskill*



Presented with xmind

Gambar 2. 3. Matrik Sinkronisasi Perencanaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tahun 2024



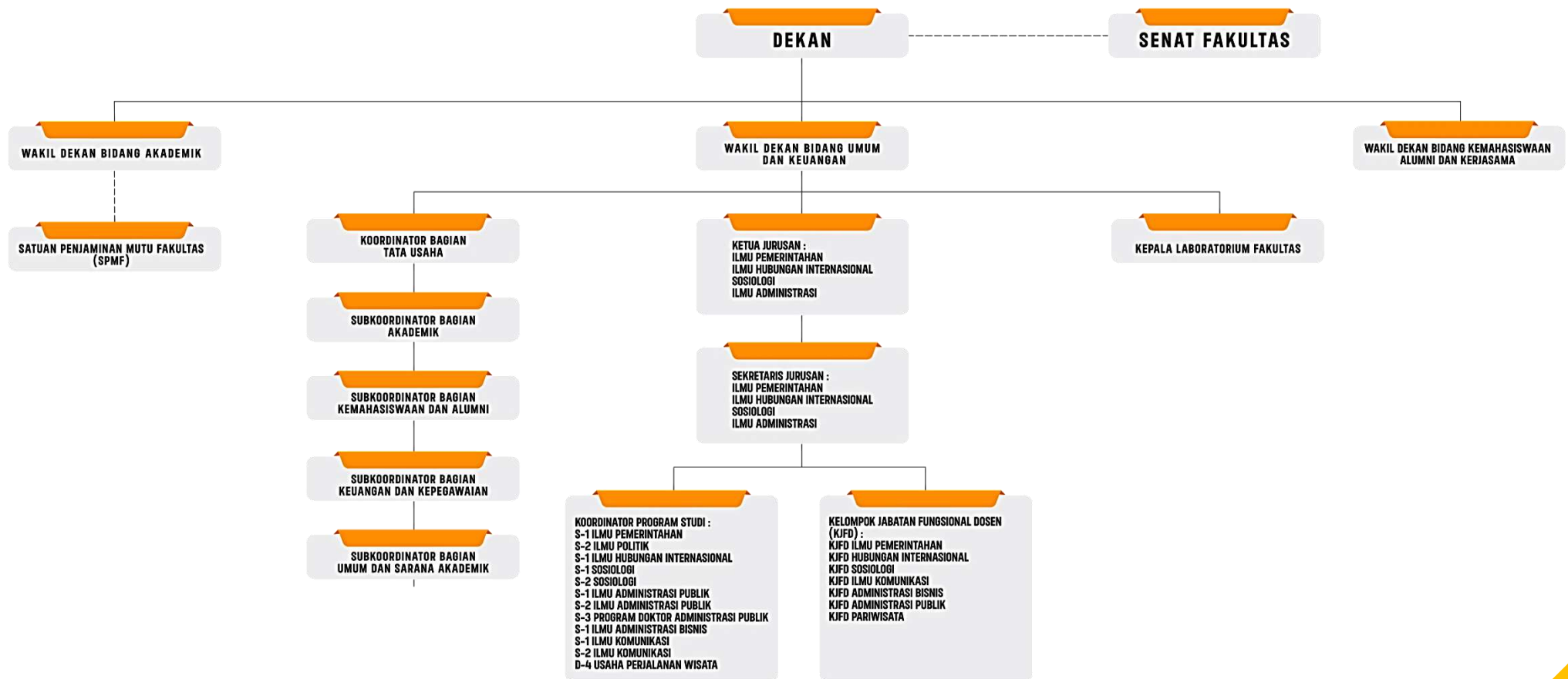
Gambar 2. 4 Pohon Kinerja Berdasarkan Masing-Masing Program Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tahun 2024-2025

Keterangan warna pada gambar :

	Bidang akademik
	Bidang umum dan keuangan
	Bidang kemahasiswaan alumni dan kerjasama

2.7. KERANGKA KELEMBAGAAN
2.7.1. STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK - UNIVERSITAS RIAU



Gambar 2. 5 Struktur Organisasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

2.7.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Riau dan Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau. Adapun penjabarannya sebagai berikut :

1) Tugas Pokok Dekanat

1. Dekan

- a. Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi fakultas.
- b. Dalam menjalankan tugas dekan bertanggung jawab kepada rektor.

2. Wakil Dekan Bidang Akademik, bertugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tugas tersebut terdiri dari :

- a. Mengkomunikasikan kegiatan di lingkungan fakultas di bidang akademik
- b. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengembangan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- c. Pembinaan dan peningkatan kualifikasi dosen dan peneliti
- d. Persiapan program pendidikan baru diberbagai tingkat dan bidang
- e. Mengelola data dan informasi pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- f. Pelaksanaan kegiatan di bidang pengabdian kepada masyarakat dalam rangka turut membantu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat
- g. Perencanaan, pemanfaatan sarana dan prasarana akademik secara optimal, efisiensi dan efektif .

3. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, bertugas membantu dekan dalam melaksanakan kegiatan di bidang kepegawaian, Keuangan, perlengkapan dan administrasi umum. Tugas tersebut terdiri dari :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan keuangan dan umum
- b. Perencanaan dan pengelolaan anggaran
- c. Perencanaan, pembinaan dan pemanfaatan tenaga administrative dan edukatif serta kesejahteraan dan pengelolaan perlengkapan
- d. Penataan kerumahtanggan dan pemeliharaan ketertiban, kebersihan, keindahan dan keamanan
- e. Pengelolaan ketatausahaan
- f. Pemantauan dan pengendalian pembangunan proyek fisik dan non fisik
- g. Pengelolaan dan publikasi data di bidang keuangan dan administrasi umum

4. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, bertugas membantu dekan dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan, perencanaan, pembinaan, kerjasama, system informasi dan pelayanan bagi mahasiswa/i dan alumni. Tugas tersebut terdiri dari :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan di lingkungan fakultas
- b. Perencanaan, pelaksanaan, pelayanan dan pengawasan kegiatan dalam bidang kemahasiswaan
- c. Perencanaan, pembinaan organisasi kemahasiswaan untuk pengembangan wawasan, integritas kepribadian dan kesejahetraan
- d. Pemberian bimbingan dan pelayanan dalam kegiatan ekstra kurikuler untuk pengembangan penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran serta penyesuaian diri dengan tuntutan situasi dan kondisi

- e. Pemberian bimbingan dan pelayanan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa secara terprogram
- f. Pengelolaan data yang menyangkut dengan bidang kemahasiswaan
- g. Pembinaan dan pengembangan bidang kerohanian kemahasiswaan
- h. Perencanaan, penggalan dan pendistribusian dana untuk beasiswa dan ikatan dinas

Selanjutnya para Wakil dekan menurut Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Universitas Riau yang disahkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau, dimana sebelumnya Pembantu Dekan berubah menjadi Wakil Dekan dengan penjabaran Wakil Dekan I (bidang akademik), Wakil Dekan II (bidang keuangan dan administrasi) dan Wakil Dekan III (kemahasiswaan, alumni dan kerjasama).

2) Tugas Pokok Senat Fakultas

Dalam menjalankan fungsinya Senat mempunyai tugas:

- a. Menetapkan kebijakan, norma/etika akademik, dan kode etik akademik;
- b. Melakukan pengawasan terhadap:
- c. Penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
- d. Penerapan ketentuan akademik;
- e. Pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
- f. Pelaksanaan kebebasan akademik,kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- g. Pelaksanaan tata tertib akademik
- h. Pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan

- i. Pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- j. Memberikan pertimbangan kepada Dekan atas usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- k. Memberikan pertimbangan kepada Dekan dalam pembukaan dan penutupan program studi;
- l. Memberikan pertimbangan kepada Dekan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
- m. Memberikan pertimbangan kepada Dekan dalam pengusulan kenaikan jabatan fungsional dosen dan;
- n. Memberikan rekomendasi kepada Dekan dalam hal penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika.

3) Tugas Ketua Jurusan/Program Studi.

Tugas ketua jurusan yang tidak memiliki program studi, merangkap tugas ketua program studi. Sedangkan jurusan yang memiliki program studi tugasnya meliputi sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan dalam pelaksanaan program kerja Jurusan/program studi baik kedalam maupun keluar.
- b. Melaksanakan monitoring kegiatan dan evaluasi pelaksanaan kerja jurusan/program studi.
- c. Membina hubungan kemitraan dan memperlakukan seluruh dosen, karyawan dan mahasiswa secara adil dan bijaksana dengan memperhatikan norma dan peraturan yang berlaku serta memperhatikan kinerja masing-masing.
- d. Memimpin dan memotivasi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban masing- masing dengan penuh rasa tanggung jawab, maupun

untuk mengembangkan kemampuan diri masing-masing dengan sebaik-baiknya.

- e. Memberikan otonomi seluas-luasnya kepada Koordinator Jabatan Fungsional Dosen (KJFD) untuk melaksanakan tugas dengan baik.
- f. Bertanggung jawab kepada Dekan.

4) Tugas Sekretaris Jurusan.

- a. Membantu mengkoordinasikan kegiatan administrasi akademik dan kesekretariatan Jurusan
- b. Membenahi manajemen perkantoran secara efisien dan profesional.
- c. Memberikan pelayanan administrasi akademik dengan sebaik-baiknya dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Mewakili Ketua Jurusan bila Ketua Jurusan berhalangan menjalankan tugasnya.
- e. Bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan

5) Tugas Pokok Kelompok Jabatan Fungsional Dosen (KJFD)

Kelompok Jabatan Fungsional Dosen (KJFD) merupakan pendidik professional dan ilmuan yang dibentuk serta bertanggung jawab kepada dekan menurut kompetensi dan kebutuhan jurusan/program studi untuk melaksanakan tugas mentransformasi, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi dosen mahasiswa melalui :

- a. Pendidikan
- b. Penelitian; dan
- c. Pengabdian Kepada Masyarakat.

Tabel 2.1 Daftar Nama Kelompok Jabatan Fungsional Dosen di FISIP

NO	JURUSAN	NAMA KJFD
1.	Ilmu Pemerintahan	KJFD Birokrasi
		KJFD Pemerintahan Desa
		KJFD Legislatif
		KJFD Tata Kelola Pemilu
		KJFD Analisis Kebijakan dan Kelembagaan
2.	Administrasi Publik	KJFD Kebijakan Publik dan Governansi
		KJFD Birokrasi dan Sumber Daya Manusia Sektor Publik
		KJFD Local Government dan Inovasi
		KJFD Administrasi Pembangunan
3.	Administrasi Bisnis	KJFD Administrasi dan Sumber Daya Manusia Bisnis
		KJFD Admnistrasi dan Keuangan Bisnis
		KJFD Administrasi dan Pemasaran Bisnis
		KJFD Administrasi dan Kebijakan Bisnis
4.	Usaha Perjalanan Wisata	KJFD Kepariwisata dan Pembangunan Masyarakat Berkelanjutan (<i>Suistanable Tourism and Society Development</i>)
5.	Ilmu Komunikasi	KJFD Komunikasi Sosial
		KJFD Media dan Politik
		KJFD Komunikasi Strategis
		KJFD Komunikasi Lingkungan dan Pariwisata
6.	Sosiologi	KJFD Masyarakat dan Kebudayaan Aquatic
		KJFD Pembangunan Berkelanjutan dan Kearifan Lokal
		KJFD Kemiskinan, Kebencanaan dan Pemberdayaan Masyarakat
		KJFD Masyarakat dan Lingkungan Hidup
7.	Ilmu Hubungan Internasional	KJFD Diplomasi dan Keamanan
		KJFD Ekonomi Politik Internasional
		KJFD Isu Kontemporer
		KJFD Pembangunan Ekonomi

6) Tugas Ketua Laboratorium Fakultas

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran laboratorium
- b. Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan bidang pendidikan dan pengajaran
- c. Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan bidang penelitian
- d. Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan bidang pengabdian kepada masyarakat
- e. Koordinasi pelaksanaan kegiatan laboratorium
- f. Pelaksanaan urusan administrasi laboratorium
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh dekan

7) Tugas Koordinator Program Studi

- a. Menyusun rencana dan program kerja Prodi sebagai pedoman kerja
- b. Membuat konsep rencana pengembangan Prodi sebagai bahan masukan Dekan (studi lanjut, pelatihan staf/pengajar, laboran, dan staf administrasi, pelatihan *soft skills*)
- c. Membimbing dan menilai kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Prodi untuk bahan pengembangan
- d. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan/akademik program sarjana dalam Prodi
- e. Mengkoordinasikan pembuatan Rencana Pembelajaran (RP), Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
- f. Menyusun/mengevaluasi beban tugas mengajar tenaga pendidik setiap semester
- g. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan perkuliahan untuk meningkatkan mutu Prodi
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan ujian dan pengumpulan soal ujian
- i. Mengajukan usul penugasan dosen wali atau Penasihat Akademik kepada Dekan
- j. Mengkoordinir pelaksanaan konsultasi mahasiswa/i dengan pembimbing akademis
- k. Menyusun rencana biaya operasional Prodi per tahun berdasarkan beban kerja Prodi dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran kegiatan perkuliahan
- l. Menyusun rencana kebutuhan dosen dan tenaga administrasi jurusan
- m. Mengkoordinir dosen untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan beban tugas dan keahliannya

- n. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Prodi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

8) Tugas Pokok Koordinator Bagian Tata Usaha dan Sub Koordinator Bagian:

- a. Koordinator Bagian Tata Usaha, bertugas mengkoordinir pelaksanaan administrasi akademik, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan kemahasiswaan.
- b. Sub Koordinator Bagian Akademis, bertugas melakukan administrasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Sub Koordinator Bagian Umum dan Perlengkapan, bertugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan.
- d. Sub Koordinator Bagian Keuangan dan Kepegawaian, bertugas melakukan administrasi keuangan dan kepegawaian.
- e. Sub Koordinator Bagian Kemahasiswaan, bertugas melakukan administrasi kemahasiswaan dan alumni.

Untuk membantu tugas Dekan tahun 2023 dibentuk unit-unit yang bertanggung jawab kepada dekan dan mempunyai garis koordinasi dengan para wakil dekan. Unit-unit yang ada di lingkungan FISIP Universitas Riau meliputi:

1. Tugas Satuan Penjaminan Mutu Fakultas (SPMF)

SPMF membantu fakultas dalam membuat kebijakan mutu akademik, penyelenggaraan layanan administrasi pendidikan, mengawasi dan mengevaluasi efektifitas penjaminan mutu di tingkat fakultas dan program studi serta melakukan pembentukan dokumen SPMI serta siklus penjaminan mutu internal Fakultas. Tugas satuan penjaminan mutu fakultas adalah membantu dekan (pimpinan fakultas) dalam meningkatkan mutu fakultas melalui :

- a. Menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
- b. Menyusun dokumen kebijakan sistem penjaminan mutu internal fakultas
- c. Melaksanakan audit internal sistem penjaminan mutu internal

2. Tugas Mal Pelayanan Terpadu (MPT)

MPT berada langsung di bawah sub koordinator umum sarana akademik (USA). Keberadaan MPT ini sekaligus menjawab tuntutan pembangunan Zona Integritas pada FISIP Universitas Riau. Dengan adanya MPT ini diharapkan dapat mendukung penuh untuk tercapainya modernisasi pelayanan publik di lingkungan FISIP Universitas Riau. Adapun rincian tugas MPT adalah sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasi dan memfasilitasi penyelenggaraan informasi publik di lingkungan FISIP Universitas Riau;
- b. Mempermudah pelayanan administrasi mahasiswa, tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan masyarakat;
- c. Mempermudah pengawasan dan pengendalian proses layanan administrasi akademik, umum, dan kemahasiswaan;

3. Tugas Unit Pengaduan, Pendampingan dan Kesehatan (P2K)

Unit ini merupakan inovasi dari FISIP guna menjawab permasalahan yang berkembang di lingkungan fakultas berkenaan dengan akaademik, non-akademik, dan kekerasan seksual yang dihadapi oleh civitas akademika. Adapun rincian tugas Unit Pengaduan, Pendampingan dan Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Penerimaan layanan pengaduan yang menghambat proses belajar mengajar
- b. Menerima pengaduan kasus kekerasan dan *bullying* di lingkungan akademik

- c. Melakukan advokasi permasalahan yang menghambat proses belajar mengajar
- d. Melakukan perujukan permasalahan kepada tenaga yang professional
- e. Menyediakan layanan kesehatan dasar/darurat
- f. Menyediakan layanan ruang laktasi yang aman dan nyaman

4. Tugas Unit Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

Unit ini dibentuk sebagai inovasi dalam akselerasi MBKM di tingkat fakultas dan program studi/jurusan serta memperkuat jejaring eksternal serta mengevaluasi pelaksanaan keberlanjutan MBKM dibawah supervise Wakil Dekan bidang Akademik. Adapun rincian tugas Unit Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah sebagai berikut:

- a. Membantu penyelenggaraan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM di tingkat Fakultas.
- b. Menjadi penghubung untuk setiap kegiatan MBKM dengan mitra strategis.
- c. Memberikan informasi dan sosialisasi terkait kegiatan MBKM kepada Fakultas, Program Studi, Dosen, dan mahasiswa.
- d. Mengelola pendataan dan administrasi kegiatan MBKM pada tingkat Fakultas.
- e. Menerima dan menindaklanjuti laporan permasalahan terkait pelaksanaan MBKM pada tingkat Fakultas.
- f. Membantu melaporkan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM di tingkat Fakultas pada tiap semester ke Unit Pengelola MBKM tingkat Universitas.
- g. Menyusun panduan teknis beserta SOP pelaksanaan MBKM pada tingkat Fakultas
- h. Membantu penyelenggaraan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM di tingkat Fakultas.

- i. Menjadi penghubung untuk setiap kegiatan MBKM dengan mitra strategis.
- j. Memberikan informasi dan sosialisasi terkait kegiatan MBKM kepada Fakultas, Program Studi, Dosen, dan mahasiswa.
- k. Mengelola pendataan dan administrasi kegiatan MBKM pada tingkat Fakultas.
- l. Menerima dan menindaklanjuti laporan permasalahan terkait pelaksanaan MBKM pada tingkat Fakultas.
- m. Membantu melaporkan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM di tingkat Fakultas pada tiap semester ke Unit Pengelola MBKM tingkat Universitas.
- n. Menyusun panduan teknis beserta SOP pelaksanaan MBKM pada tingkat Fakultas

5. Tugas *Election Corner (E- CORNER)*

Unit ini merupakan bentuk inovasi sebagai kontribusi terhadap pengembangan gagasan, diskursus, dan partisipasi aktif civitas akademika dalam mewujudkan demokrasi dan pemilihan yang berkualitas Adapun rincian tugas Unit *Election Corner (E-Corner)* adalah sebagai berikut:

- a. Mensosialisasikan pemilihan umum yang berkualitas kepada civitas akademika dan Masyarakat umum ;
- b. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk menciptakan pemilu yang berkualitas dan berasaskan luber jurdil dan transparan akuntabel;
- c. Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam hal pengawasan partisipatif;
- d. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat perihal pemilihan;
- e. Meningkatkan diskursus pemilihan bagi civitas akademika dan Masyarakat umum dalam bentuk kegiatan ilmiah;

- f. Memanfaatkan *big data* kepemiluan untuk peningkatan kegiatan akademik dan penguatan kapasitas internal civitas akademika.

Adapun agenda agenda yang telah disusun oleh Tim *Election Corner* (Pojok Pemilu) adalah sebagai berikut;

- a. Kuliah Praktisi dilaksanakan secara berkala
- b. Diskusi Publik dilaksanakan secara berkala
- c. Penelitian Sesuai Anggaran dan Kebutuhan (*Stakeholders*)
- d. Publikasi Hasil Penelitian Sesuai Kebutuhan
- e. Deklarasi Kampung Pemilu
- f. Pembentukan Relawan Pemilu

6. Tugas Hubungan Masyarakat (HUMAS)

Unit ini merupakan sebuah inovasi dari FISIP untuk menjalankan fungsi kehumasan dari sebuah organisasi. Fungsi kehumasan menjadi sebuah hal penting dan utama di era keterbukaan informasi publik dan digitalisasi pelayanan publik sektor pendidikan tinggi. Pimpinan fakultas memberikan kewenangan terhadap uniti ini untuk melaksanakan fasilitasi dan koordinasi bidang urusan kehumasan meliputi Kehumasan dan Publikasi, Bina Pengembangan Informasi serta Peliputan dan Dokumentasi. Adapun tugas pokok fungsi (tusi) dirincikan sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- e. Mengoordinasikan pengelolaan informasi dan media publik;
- f. Mengoordinasikan pengelolaan saluran komunikasi media;
- g. Mengoordinasikan hasil pengelolaan aduan masyarakat;
- h. Melakukan pendokumentasian dan pengklasifikasian informasi dan komunikasi publik;
- i. Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

7. Tugas Pokok Gugus Tugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (K3L)

Gugus Tugas Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) bertugas menyusun dan menjalankan kebijakan pengelolaan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) dalam rangka pengembangan protokol dan pedoman, pengelolaan risiko K3L, serta membuat langkah-langkah pencegahan kebakaran dan kesiapsiagaan menghadapi situasi darurat di lingkungan FISIP. Adapun rincian tugas sebagai berikut:

Tugas Gugus Tugas K3L FISIP Universitas Riau :

- a. Pembentukan struktur organisasi berdasarkan surat tugas dari dekan FISIP
- b. Pelatihan personil terkait K3L
- c. Membuat *Manual Book* K3L untuk civitas akademika
- d. Membuat *safety sign* gedung, jalur evakuasi, pemasangan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

Berdasarkan SK Rektor No 5 Tahun 2017 Pasal 70, Jurusan/Bagian terdiri atas:

1. Jurusan Pemerintahan
2. Jurusan Hubungan Internasional
3. Jurusan Sosiologi
4. Jurusan Ilmu Administrasi

Berdasarkan SK Rektor No. 5 Tahun 2017 Pasal 72, Program studi terdiri atas:

1. Prodi S-1 Ilmu Pemerintahan
2. Prodi S-1 Ilmu Hubungan Internasional
3. Prodi S-1 Sosiologi
4. Prodi S-1 Ilmu Administrasi Negara
5. Prodi S-1 Ilmu Administrasi Bisnis
6. Prodi S-1 Ilmu Komunikasi
7. Prodi D-4 Usaha Perjalanan Wisata
8. Prodi S-2 Ilmu Administrasi
9. Prodi S-2 Ilmu Politik
10. Prodi S-2 Sosiologi
11. Prodi S-2 Ilmu Komunikasi

Seiring perkembangan waktu terjadi perubahan nomenklatur pada beberapa Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara Menjadi Program Studi Ilmu Administrasi Publik berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 275/M/KPT/2017, Program Studi Magister Ilmu Administrasi berubah menjadi Program Studi Magister Administrasi Publik sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 272/E/O/2021 serta adanya penambahan Program Studi sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 459/E/O/2021 tentang Izin Pembukaan Program Studi Administrasi Publik Program Doktor pada tanggal 27 Oktober 2021.

BAB III

REFORMASI BIROKRASI

3.1. *GRAND DESIGN* REFORMASI BIROKRASI

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik merupakan salah satu institusi di Universitas Riau yang selalu berupaya memperkokoh posisi dan meningkatkan reputasi internasional melalui Visi “Menjadi Fakultas riset yang unggul bermartabat dalam bidang sosial politik di Asia Tenggara Tahun 2035. Pencapaian visi membutuhkan kerja keras luar biasa dan tentunya ditopang oleh tata kelola kelembagaan dan pendidikan yang baik sebagai salah satu tumpuan strategi. Tata kelola tersebut diejawantahkan melalui prioritas program berupa reformasi birokrasi. Sejatinya reformasi birokrasi merupakan amanat peraturan perundangan yang harus ada dan diterapkan di berbagai level pemerintah terkhusus Perguruan Tinggi. Reformasi birokrasi menekankan kepada tata kelola penyelenggaraan pemerintahan berorientasi pada *Good Governance*. Oleh karena itu level fakultas berupaya mencapai cita-cita besar pencapaian *Good University Governance* yang dicanangkan oleh rektor.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia sudah didesain sedemikian rupa yang termaktub dalam buku *Grand Design* Reformasi Birokrasi Indonesia yang menyebutkan bahwa guna mewujudkan birokrasi pemerintah berkelas dunia, maka dibutuhkan profesionalitas dan integritas birokrasi serta mampu memberikan pelayanan prima kepada Masyarakat. Perwujudan perihal tersebut pada tataran nasional, sudah dilakukan pengaturan melalui penerbitan peraturan yang sesuai dan penataan programnya. Demikian juga dengan Kemendikbud Ristek menyatakan tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat kementerian adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.

Berdasarkan tujuan nasional dari reformasi birokrasi dan pada lingkungan kementerian serta capaian kinerja reformasi birokrasi pada tingkat Universitas maka FISIP Universitas Riau merumuskan tujuan reformasi birokrasi 2024-2028 berupa: “Melaksanakan Tata Kelola

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang bermartabat”. Misi tersebut diterjemahkan ke dalam sasaran strategis “Terbentuknya Tata Kelola Berbasis *Good Faculty Governance*”.

FISIP Universitas Riau melaksanakan reformasi birokrasi sebagai titik awal dalam melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas birokrasi dan pelayanan publik. Pembenahan awal dimulai dari reformasi tata kelola kelembagaan dan pendidikan yang berorientasi efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan manajemen, pelayanan dan mengubah *mindset* aparatur. Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah transformasi dan akselerasi perubahan mental guna mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman serta mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berintegritas. Oleh sebab itu juga diatur penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan.

FISIP UNRI sudah menjalankan proses Reformasi Birokrasi melalui penguatan dari beberapa aspek, yaitu:

- 1) Restrukturisasi organisasi dan tata kerja;
- 2) Penguatan kerangka regulasi internal;
- 3) Efisiensi dan efektifitas kinerja; dan
- 4) Zona Integritas

Reformasi birokrasi yang telah dilakukan oleh FISIP Universitas Riau melingkupi aspek tri dharma yang meliputi :

1. Pelayanan akademik;
2. Pelayanan non-akademik;
3. Manajemen Kepegawaian;
4. Penyediaan Sarana dan Prasarana;
5. Pengelolaan Keuangan.

Pencapaian reformasi birokrasi di lingkungan Fakultas tidak bisa dilepaskan dari kerangka hierarki level pemerintah sehingga perlu penerjemahan dari setiap tingkatan, Kementerian/Lembaga menerjemahkan tingkat nasional, Universitas menerjemahkan tingkat Kemendikbud Ristek dan Fakultas menerjemahkan Universitas.

Berdasarkan hal tersebut terdapat tiga sasaran yang menjadi acuan dari *roadmap* Kementerian merujuk dari dokumen reformasi birokrasi, yaitu:

1. Terwujudnya Zona Integritas di lingkungan FISIP UNRI;
2. Terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan berintegritas; dan
3. Terselenggaranya pelayanan publik yang prima, berkualitas dan berbasis digital.

Ketiga sasaran ini berusaha diwujudkan melalui program yang dirumuskan pada dokumen rencana strategis FISIP Universitas Riau 2024-2028. Adapun bentuk programnya sebagai berikut:

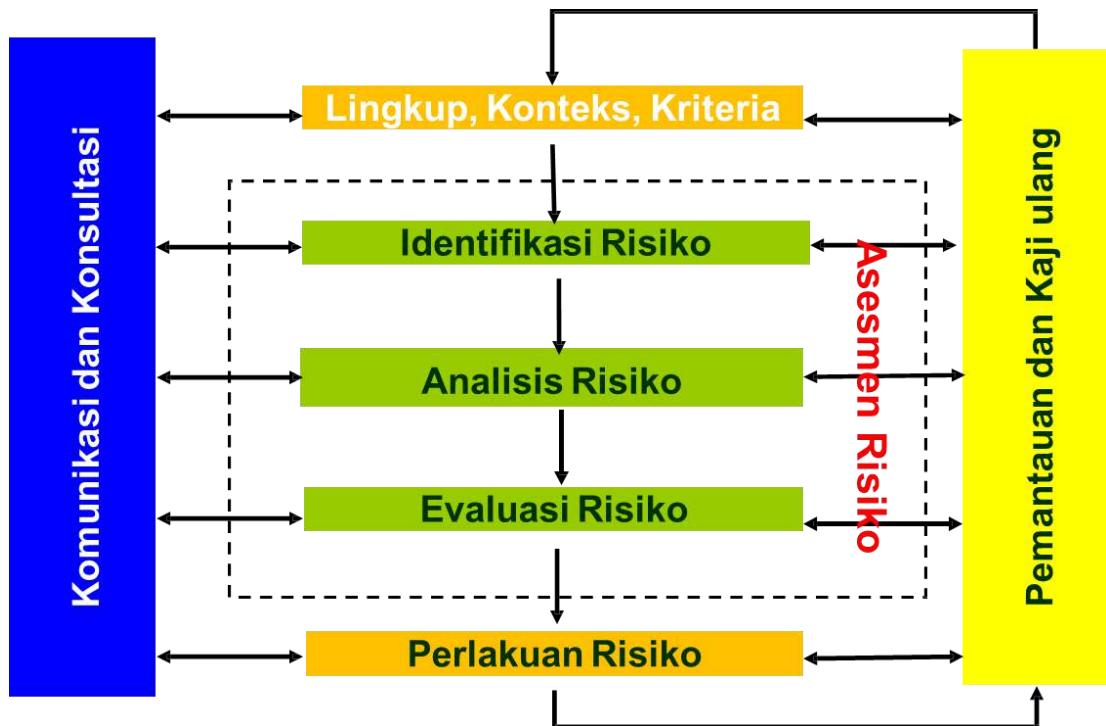
1. Pembangunan Zona Integritas (ZI);
2. Reformasi dan akselerasi pelayanan publik melalui Mall Pelayanan Terpadu (MPT);
3. Penguatan digitalisasi tata kelola kelembagaan dan pendidikan

3.2. MANAJEMEN RESIKO

Manajemen risiko merupakan inovasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) guna memastikan pelayanan publik dapat terselenggara dengan baik di pelbagai institusi pemerintah, khususnya Perguruan Tinggi Negeri. Renstra Fakultas yang merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan rencana lima tahun dari FISIP Universitas Riau, berisi visi, misi, tujuan, sasaran strategis, program strategis, program kegiatan dengan mempertimbangkan dinamika dilingkungan internal maupun eksternal, kondisi capaian saat ini, dan isu-isu strategis yang akan mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu diperlukan manajemen risiko untuk mengarahkan dan mengendalikan terkait ketidakpastian dan perubahan yang dapat berdampak pada kinerja Lembaga baik yang dapat dikontrol maupun yang tidak dapat dikontrol. Tujuan penerapan manajemen risiko Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau adalah;

1. Meningkatkan dan mempertahankan reputasi dan capaian kinerja terbaik Lembaga, serta percepatan perwujudan visi, misi, dan tujuan FISIP Universitas Riau.
2. Mengurangi kehilangan kesempatan dan/atau dampak dari risiko yang mempengaruhi pencapaian tujuan, sasaran strategis baik jangka Panjang, maupun operational yang timbul dari perubahan lingkungan external dan internal lembaga.
3. Meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas, kualitas dan transparansi manajemen FISIP Universitas Riau.
4. Mengoptimalkan tingkat kematangan dan ketahanan Lembaga melalui pengendalian risiko dan rencana tindak lanjut yang terukur dan berkelanjutan.
5. Menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan Lembaga baik ditingkat layanan umum, layanan pendukung dan layanan penunjang.

Menurut ISO 31000:2018 *Risk Management Guideline*, proses manajemen risiko adalah proses sistematis penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik terkait aktivitas komunikasi dan konsultasi risiko, penetapan cakupan, konteks, dan kriteria risiko, pelaksanaan penilaian risiko (*risk assessment*) yang terdiri dari identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko, perlakuan risiko (*risk treatment*), pemantauan dan peninjauan, perekaman, dan pelaporan sebagaimana terlihat pada gambar 3.1 berikut:



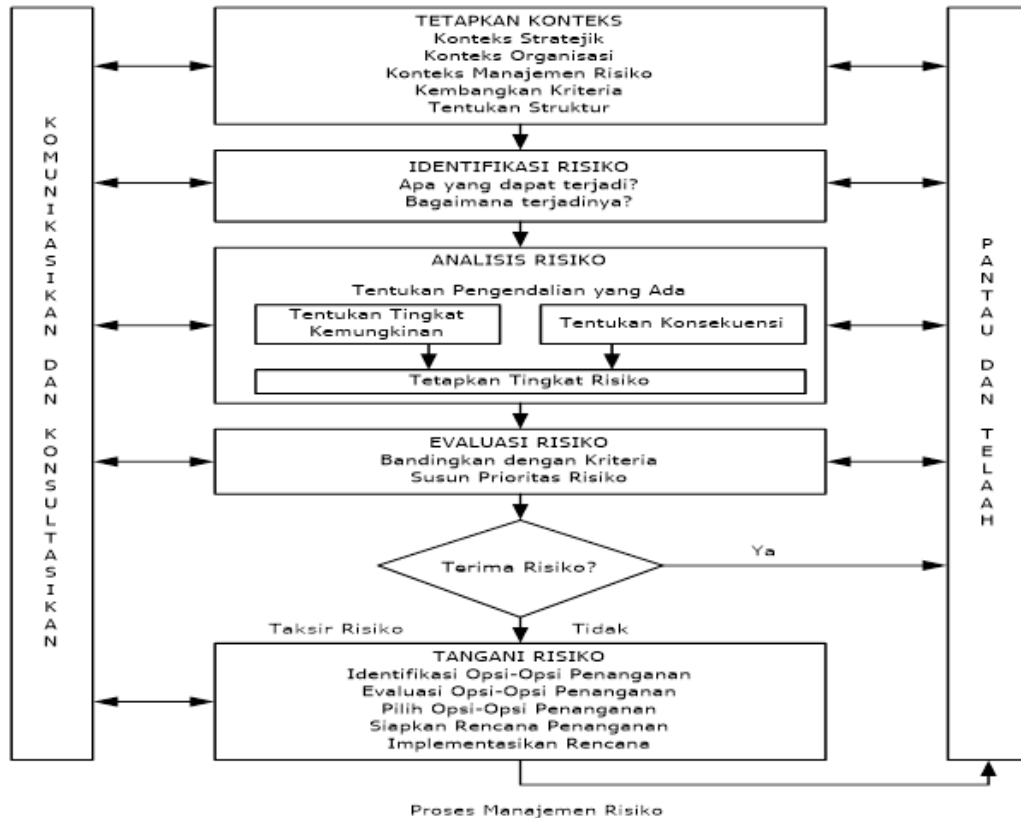
Gambar 3.1 Proses Manajemen Risiko

Sumber: ISO 31000

Penyusunan Manajemen Risiko dapat mengacu Visi Misi, Rencana Bisnis, Rencana Strategis, IKU, SOTK, SWOT dan lainnya yang memberikan dampak terhadap organisasi (Keuangan/Non Keuangan). Manajemen Risiko juga perlu melakukan penilaian atas frekuensi dan dampak, sehingga dapat menentukan prioritas risiko yang perlu ditangani atau tidak ditangani/diabaikan. Penetapan lingkup kegiatan Manajemen Risiko dapat diterapkan pada level strategis, operasional, program, proyek, aktivitas lainnya. Konteks dapat dilihat dari lingkungan eksternal, lingkungan internal, stakeholder, aktifitas layanan inti, aktifitas layanan pendukung. Kriteria Analisa Risiko (Kriteria Kemungkinan, Kriteria Dampak, Kriteria keefektifan pengendalian risiko saat ini dan Kriteria tingkat risiko). Sedangkan penetapan kriteria evaluasi risiko yang mencakup:

- Kriteria selera risiko (*risk appetite*)
- Kriteria toleransi risiko (*risk tolerance*)
- Kriteria proritas risiko (*risk priority*).

Dan diakhir baru dibuat keputusan prioritas atas risiko (prioritas dalam pemberian tanggapan & perlakuan). Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada gambar 3.2 berikut;



Gambar 3.2 Rincian Proses Manajemen Risiko

Sumber: ISO 31000

Pedoman manajemen risiko berdasarkan ISO 31000:2018 dan telah disesuaikan dengan informasi maupun data dukung mengenai kondisi FISIP secara komprehensif serta dilakukannya penilaian secara kuantitatif. Komponen layanan pada manajemen risiko diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) layanan, yaitu layanan inti, pendukung dan penunjang. Hasil penilaian manajemen risiko diberikan identifikasi warna merah, jingga, kuning dan biru. Identifikasi tersebut merupakan personifikasi dari tingkat risiko dari tinggi ke paling rendah. Identifikasi warna merah menjadi landasan bagi pimpinan Fakultas untuk dijadikan sebagai urutan prioritas utama dalam pembuatan program kegiatan yang dianggarkan dalam kerangka pendanaan RKA/KL. Adapun rincian manajemen risiko FISIP dijelaskan pada tabel 3.1

Tabel 3.1. LAYANAN INTI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

No.	Kategori Layanan	No.	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	UC/C	Dampak Risiko	Pengendalian Risiko yang Ada (Existing)	Tingkat Kemungkinan	Tingkat Dampak	Skore Risiko	Urutan Prioritas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
LAYANAN INTI (TRI DARMA PT)											
	Layanan Pendidikan dan Pengajaran	1	Belum optimalnya konversi Akreditasi Program studi A menjadi unggul dan reakreditasi	Belum optimalnya konversi peringkat akreditasi dengan menggunakan instrument supplement konversi akreditasi atau instrumen yang berlaku lainnya	UC/C	Usulan konversi akreditasi ditolak atau peringkat akreditasi tidak dapat dikonversi sesuai dengan instrument terbaru	1. Penyesuaian instrumen penilaian akreditasi 2. Pendampingan dan Workshop Penyusunan Kurikulum OBE dan Instrumen	3	5	22	

Tabel 3.2. LAYANAN PENDUKUNG

No.	Kategori Layanan	No.	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	UC/C	Dampak Risiko	Pengendalian Risiko yang Ada (Existing)	Tingkat Kemungkinan	Tingkat Dampak	Skore Risiko	Urutan Prioritas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
LAYANAN PENDUKUNG											
SUBBAGIAN AKADEMIK											
		1	tidak terlaksananya daftar ulang mahasiswa	1. belum terintegrasinya pendaftaran ulang ke dalam portal akademik 2. keterbatasan informasi terkait daftar ulang dan kalender akademik	C	1. bertambahnya jumlah mahasiswa yang Non Aktif 2. Berkurangnya Pendapatan Uang Kuliah Tunggal 3. Masa studi mahasiswa menjadi lama	1. Memberi informasi jadwal pembayaran UKT 2. menginformasikan ke masing-masing mahasiswa di portal akademik 3. Menginformasikan di mading jurusan dan prodi	5	4	23	

No.	Kategori Layanan	No.	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	UC/C	Dampak Risiko	Pengendalian Risiko yang Ada (Existing)	Tingkat Kemungkinan	Tingkat Dampak	Skore Risiko	Urutan Prioritas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2	Mahasiswa non aktif kuliah	1. Tidak membayar UKT/SPP 2. Tidak mengisi KRS 3. Berhenti studi sementara tanpa keterangan 4. Kurang optimalnya komunikasi lembaga dengan orang tua mahasiswa	C	1. Mahasiswa tidak bisa mengikuti perkuliahan 2. terlambatnya penyelesaian masa study mahasiswa	1. Memberikan informasi pembayaran UKT/SPP 2. Memberikan surat rekomendasi pembayaran UKT/SPP 3. Prodi/Jurusan menghubungi Mahasiswa	4	5	23	
		3	sistem akademik yang belum terintegrasi dan belum komprehensif	1. SIA belum menyesuaikan kebutuhan akademik 2. SDM dalam mengoperasikan SIA terbatas 3. Kapasitas jaringan internet terbatas 4. Belum terintegrasi database SIA dengan SISTER (BKD)	C	1. Tidak sinkronnya data mahasiswa 2. Penilaian mahasiswa terhambat 3. Kegiatan akademik akan terhambat 4. Capaian IKU tidak maksimal 5. Penilaian akreditasi tidak maksimal 6. Pengisian BKD tidak terpenuhi	1. Membuat sistem informasi akademik terpadu (satu) UNRI 2. Menyiapkan SOP akademik	4	4	19	
		4	keterlambatan dalam pengisian KRS	1. tidak membayar UKT 2. Mahasiswa tidak menindak lanjuti jadwal pengisian KRS 3. Sistem informasi belum berjalan maksimal	C	1. Terganggunya sistem Perkuliahan 2. Keterlambatan dalam menginput nilai 3. Nilai tidak bisa dilaporkan di PDDIKTI 4. Penilaian akreditasi Program studi tidak akan maksimal	1. Sistem informasi akademik (SIA) 2. Pengawasan Kajur/Kaprodi untuk selalu mengingatkan 3. Pelaksanaan peran dosen penasihat akademis (PA)	3	4	17	

No.	Kategori Layanan	No.	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	UC/C	Dampak Risiko	Pengendalian Risiko yang Ada (Existing)	Tingkat Kemungkinan	Tingkat Dampak	Skore Risiko	Urutan Prioritas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5	revisi penjadwalan mata kuliah	1. Keterlambatan dalam penyerahan draf jadwal mata kuliah	C	1. Terlambatnya penginputan jadwal di SIA 2. Terlambatnya penerbitan SK mengajar	1. Menginformasikan kepada Program study lebih awal dan berkala 2. menyesuaikan ruang kuliah dengan jumlah kelas dengan mahasiswa	3	4	17	
		6	Lambatnya mahasiswa dalam menyelesaikan Skripsi/Tugas akhir	1. Lambatnya pengajuan judul proposal 2. Lamanya pengumpulan data penelitian di lapangan 3. Dosen pembimbing dan penguji sulit ditemui 4. Tidak dikerjakan skripsi dan tugas akhir 5. lamanya penjadwalan seminar proposal dan ujian skripsi/ tugas akhir	C	1. Terlambat ujian skripsi/ tugas akhir 2. Mahasiswa bisa terjaring DO 3. PIN Ijazah tidak keluar 4. Penilaian akreditasi tidak maksimal	1. Kajar/Prodi mengevaluasi mahasiswa yang belum menyelesaikan proposal agar bisa ujian diseminari, Skripsi/tugas akhir 2. Menghubungi mahasiswa yang belum selesai skripsi/tugas akhir 3. Mengoptimalkan tugas PA dan Pembimbing	4	3	16	
SUBBAGIAN KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN											
		1	Proses Permohonan SPPD dan Surat Tugas kebagian keuangan yang kasib waktunya	Antri dan banyaknya pekerjaan di bagian umum/kepegawaian	UC/C	Mendadak dikerjakan dan diburu-buru	Follow up apakah ada Surat Tugas SPPD	4	4	17	
SUBBAGIAN UMUM DAN SARANA AKADEMIK											
	Sarana dan prasarana	1	Sering adanya keluhan kerusakan AC dari Dosen, mahasiswa dan pegawai.	Rata-rata AC banyak yang sudah dimakan usia dan	C	Tingginya biaya yang harus dianggarkan untuk pemeliharaan	Perlunya pengadaan AC baru untuk pengganti AC lama yang sering rusak.	4	4	19	

No.	Kategori Layanan	No.	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	UC/C	Dampak Risiko	Pengendalian Risiko yang Ada (Existing)	Tingkat Kemungkinan	Tingkat Dampak	Skore Risiko	Urutan Prioritas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				sudah ketinggalan teknologi.		AC					
		2	Lambannya penanganan jika terjadi kerusakan AC di ruang kelas dan ruang administrasi kantor	Servis AC hanya mengandalkan vendor servis AC karena tidak adanya teknisi yang terampil memperbaiki kerusakan AC di Sub Bagian Umum dan Sarana Akademik FISIP	C	1. Terganggunya kenyamanan belajar mengajar di ruangan kelas 2. Terganggunya kenyamanan pegawai dalam melaksanakan tugas administrasi perkantoran	1. Perlunya program pelatihan Teknisi servis AC bagi Staff Umum dan Sarana Akademik 2. Perlunya Pegadaan peralatan servis AC yang memadai di Sub Bagian Umum dan Sarana Akademik	4	4	19	
		3	Kurang memadainya dan kualitas dan kuantitas Infocus sebagai salah satu peralatan pendukung pembelajaran	1. Infocus yang ada banyak yang sudah ketinggalan teknologi 2. Kuantitas infocus tidak sebanding dengan padatnya jadwal perkuliahan	C	1. Sering komplain dari dosen dan mahasiswa disebabkan infocus yang tidak berfungsi dengan baik 2. Kualitas gambar yang dihasilkan infocus yang dipakai dosen dan mahasiswa kurang jelas 3. Sering molornya waktu dimulainya perkuliahan karena lamanya penyetelan infocus	1. Perlunya pengadaan Infocus yang cukup dan berkualitas serta didukung teknologi terkini 2. Perlunya dipermanenkan pemasangan infocus ruangan kelas	4	4	19	

No.	Kategori Layanan	No.	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	UC/C	Dampak Risiko	Pengendalian Risiko yang Ada (Existing)	Tingkat Kemungkinan	Tingkat Dampak	Skore Risiko	Urutan Prioritas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4	PC Komputer dan Printer yang dipakai pegawai rata-rata sudah ketinggalan teknologi	Perencanaan Pengadaan PC dan Printer yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas	C	1. Terkendalanya pegawai dalam menyelesaikan tugas-tugasnya 2. Tidak maksimalnya pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan 3. Sering terjadi penumpukan pekerjaan disebabkan komputer dan printer sering rusak	Perlu pengadaan Komputer PC dan Printer yang berkualitas dan didukung teknologi terkini	4	4	19	
		5	Kurangnya SDM Penata Usahaan Barang Milik Negara pada Sub Bagian Umum dan Sarana Akademik	Hanya satu orang staf yang terampil dibidang penatausahaan barang milik negara melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN)	C	1. Sering terlambatnya input data pada Aplikasi SAKTI dan SIMAN 2. Terlambatnya pemberian label pada barang milik negara hasil pengadaan barang	Penambahan 1 orang staff yang mengerti penatausahaan barang milik negara melalui aplikasi SAKTI dan SIMAN	4	4	19	
		6	Rawannya kehilangan aset fakultas akibat kemalingan	1. Terbatasnya personil pengamanan kampus khususnya di area yang rawan kemalingan. 2. Belum semua area kampus terpantau CCTV	C	1. Terkesan kampus tidak aman 2. Menyebabkan kerugian negara karena hilangnya aset	1. menambah personil pengamanan khususnya di area rawan kemalingan 2. Memperbanyak titik CCTV terutama di area rawan kemalingan 3. Memasang kunci/gembok untuk pengamanan aset	4	4	19	

No.	Kategori Layanan	No.	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	UC/C	Dampak Risiko	Pengendalian Risiko yang Ada (Existing)	Tingkat Kemungkinan	Tingkat Dampak	Skore Risiko	Urutan Prioritas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
JURUSAN/PRODI											
		1	Belum ada prodi yang memenuhi akreditasi unggul dan reakreditasi	1. Belum lengkapnya dokumen ISK 2. Tidak semua prodi memiliki kurikulum OBE 3. Tidak semua prodi menerapkan kurikulum OBE 4. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai	C	1. Belum tercapainya persyaratan PTNBH Universitas dan akreditasi unggul untuk institusi universitas 2. tidak bisa terlaksana program fast track 3. Penurunan minat calon mahasiswa baru 4. Peluang mendapatkan beasiswa yang terhambat	1. workshop penyusunan kurikulum OBE 2. workshop penilaian akreditasi/ISK 3. pembentukan taskforce kurikulum OBE dan akreditasi internasional 4. Fasilitasi sertifikasi kompetensi dosen	4	5	24	

Tabel 3.3. LAYANAN PENUNJANG

No.	Kategori Layanan	No.	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	UC/C	Dampak Risiko	Pengendalian Risiko yang Ada (Existing)	Tingkat Kemungkinan	Tingkat Dampak	Skore Risiko	Urutan Prioritas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
LAYANAN PENUNJANG											
PERPUSTAKAAN											
		1	Tidak tersedianya sarana prasarana layanan OPAC (On-line Public Access Catalog)	1. Belum tersedianya <i>personal computer</i> (PC) di Perpustakaan Cabang FISIP 2. Belum tersedianya aplikasi yang terkoneksi ke perpustakaan pusat	C	1. Pelayanan administrasi masih dilakukan secara manual 2. Pelayanan administrasi menjadi lama	Mengusulkan ke pimpinan agar menyediakan PC yang terbaru	5	4	23	
		2	Kurang memadai sarana prasarana dalam menunjang layanan perpustakaan	Belum memadai komputer dan printer yang menunjang pekerjaan di perpustakaan	C	Pelayanan perpustakaan terhenti	Mengusulkan pengadaan sarana prasarana penunjang layanan perpustakaan	5	4	23	
		3	Mahasiswa yang berkumpul di depan akses masuk perpustakaan sehingga menghalangi pemberian layanan	Pemustaka yang kerap dan sering langsung bertanya pada pintu masuk menyebabkan antrian	C	Pemustaka harus menunggu, hal ini terjadi karena Petugas menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari Pemustaka yang	Pemustaka dipersilahkan masuk ke perpustakaan terlebih dahulu	4	4	19	

No.	Kategori Layanan	No.	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	UC/C	Dampak Risiko	Pengendalian Risiko yang Ada (Existing)	Tingkat Kemungkinan	Tingkat Dampak	Skore Risiko	Urutan Prioritas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						hendak masuk					
		4	Kerusakan koleksi buku perpustakaan	Belum tersedianya perawatan bahan pustaka buku	C	Banyak buku yang masih rusak	Tersediannya anggaran dalam perbaikan buku	4	4	19	
		5	Sistem pengelolaan perpustakaan yang masih manual (peminjaman, pengembalian dan pembuatan kartu anggota)	Belum adanya peralatan untuk koneksitas perpustakaan secara on-line	C	Masih belum bisa menuju koneksitas antar perpustakaan cabang fakultas	Menyediakan peralatan yang menunjang perpustakaan pelayanan koneksitas terpadu	4	4	19	
		6	Belum tersedianya SOP bagi pengguna layanan perpustakaan yang akan mengakses layanan	Merencanakan SOP	C	Agar pekerjaan di perpustakaan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan	Pembuatan SOP yang direncanakan	4	4	19	
		7	Kehilangan Buku	Terbatasnya staf dalam memantau kehilangan buku	C	Adanya pengamanan buku di ruangan perpustakaan	Mengusulkan agar menyediakan camera-cctv	4	4	19	
HUMAS											

No.	Kategori Layanan	No.	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	UC/C	Dampak Risiko	Pengendalian Risiko yang Ada (Existing)	Tingkat Kemungkinan	Tingkat Dampak	Skore Risiko	Urutan Prioritas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1	Tidak berjalannya struktur dan fungsi kelembagaan kehumasan	1. Belum tersedianya SOP tugas pokok dan fungsi kehumasan 2. Tidak terdistribusinya pekerjaan	C	1. Fungsi Humas tidak maksimal 2. Penyebaran informasi tidak berjalan dengan baik	Peninjauan ulang struktur dan fungsi humas	5	5	25	
		2	Budaya kerja yang tidak optimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kehumasan	1. Tidak tersedianya sarana dan prasarana; peralatan dan kantor khusus kehumasan 2. Tidak jadi prioritas kerja fakultas untuk kehumasan	C	1. Tidak tercapainya tujuan kehumasan lembaga 2. Motivasi kerja yang rendah dibidang kehumasan	1. Koordinasi dengan WD III dalam hal kehumasan sesuai dengan kebutuhan	4	4	19	
		3	Kegiatan kehumasan tidak terpola/tersistematis dengan baik	1. Tidak tersedia program kerja 2. Tidak ada anggaran pertemuan/rapat 3. Tidak ada pertemuan rutin 4. Tidak tersusunnya visi misi dan program kerja 5. Tidak		1. Tidak tersistematisnya kegiatan	1. Melakukan pertemuan secara insidental	4	4	19	

No.	Kategori Layanan	No.	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	UC/C	Dampak Risiko	Pengendalian Risiko yang Ada (Existing)	Tingkat Kemungkinan	Tingkat Dampak	Skore Risiko	Urutan Prioritas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				tersedianya sistem yang mudah diakses dan juga akses untuk mengetahui kegiatan2 di lingkungan kampus							
GUGUS TUGAS K3L											
		1	Kebakaran	1. Tidak tersedianya instalasi pendeteksi asap dalam gedung dan alarm kebakaran 2. Tidak adanya hydrant 3. Instalasi listrik tidak sesuai SNI		1. Api yang menimbulkan asap tidak cepat terdeteksi 2. Sulit mencari sumber air memadamkan api 3. Rentan terjadi arus pendek/korsleting	1. Instalasi pendeteksi asap dalam gedung dan alarm kebakaran 2. Mencari sumber mata air/membuat sumur bor 3. Instalasi listrik harus sesuai SNI	3	4	17	
		2	Banjir	1. Tersumbatnya saluran drainase 2. Tingginya curah hujan di musim hujan		1. Air tidak dapat mengalir sehingga meluap ke jalan 2. Genangan air	1. Membersihkan saluran drainase sebelum memasuki musim hujan 2. Membuat lubang-lubang biopori	3	4	17	

No.	Kategori Layanan	No.	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	UC/C	Dampak Risiko	Pengendalian Risiko yang Ada (Existing)	Tingkat Kemungkinan	Tingkat Dampak	Skore Risiko	Urutan Prioritas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3	Gempa	1. Letak geografis yang berbatasan langsung dengan provinsi yang memiliki gunung berapi aktif dan patahan lempeng bumi		1. Kerusakan fisik, korban luka-luka dan korban jiwa	1. Membuat bangunan dengan struktur tahan gempa	3	4	17	
		4	Gangguan Hewan Buas dan Hewan Liar	1. Tidak tersedianya habitat hewan tersebut seiring pembangunan gedung yang masif		1. Rentan terjadi kontak langsung dengan hewan buas dan liar (dikejar, digigit, disengat, dsb)	1. Melepasiarkan hewan buas dan liar di habitatnya	3	4	17	
		5	Huru-Hara	1. Tersumbatnya saluran komunikasi pihak-pihak yang bertikai 2. Adanya provokator		1. Proses lobbying, bargaining dan negotiation terhambat 2. Massa mudah terprovokasi	1. Mediasi pihak-pihak yang bertikai 2. Tangkap provokator	3	4	17	
		6	Keadaan lainnya yang dikategorikan sebagai keadaan darurat	1. Adanya penyebaran paham radikal dan terorisme		1. Terjadinya aksi terorisme (percobaan merakit bahan peledak)	1. Melakukan edukasi yang benar tentang agama dan nilai-nilai Pancasila	3	4	17	

No.	Kategori Layanan	No.	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	UC/C	Dampak Risiko	Pengendalian Risiko yang Ada (Existing)	Tingkat Kemungkinan	Tingkat Dampak	Skore Risiko	Urutan Prioritas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7	Keselamatan kerja bagi Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa dan Pihak luar lainnya	1. Tidak tersedianya petunjuk keselamatan 2. Tidak tersedianya sarana prasarana keselamatan yang memadai untuk mengantisipasi kondisi darurat		1. Berisiko lebih besar terjadi kecelakaan akibat kecerobohan (human error) di lingkungan kampus 2. Terlambatnya penanganan kondisi darurat	1. Menyediakan petunjuk keselamatan 2. Menyediakan sarana prasarana keselamatan yang memadai untuk mengantisipasi kondisi darurat	3	4	17	
		8	Bencana Kabut Asap	1. Masyarakat membuka lahan (perkebunan) dengan cara membakar 2. Kurangnya edukasi 3. Rendahnya curah hujan pada musim kemarau		1. Meluasnya kebakaran hutan/lahan 2. Masyarakat tidak mengetahui hukuman bagi pelaku pembakar hutan/lahan, dampak jangka panjang kabut asap terhadap kesehatan 3. Terjadi kekeringan	1. Membuka lahan dengan menggunakan alat berat 2. Memberikan edukasi terkait cara membuka hutan/lahan yang sesuai aturan 3. Melakukan proses pembuatan hujan buatan	3	4	17	
SPMF											

No.	Kategori Layanan	No.	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	UC/C	Dampak Risiko	Pengendalian Risiko yang Ada (Existing)	Tingkat Kemungkinan	Tingkat Dampak	Skore Risiko	Urutan Prioritas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1	Belum dipahami secara optimal standar mutu pembelajaran, pengabdian dan penelitian	Kurangnya koordinasi dan kolaborasi dalam perancangan standar mutu pembelajaran, pengabdian dan penelitian dengan tataran pimpinan		masih banyak hasil penelitian dan pengabdian dosen yang belum dipakai oleh pihak eksternal	peningkatan kerjasama dengan pihak internal	3	4	17	
		2	Masih banyak dosen yang tidak tertib dalam jadwal perkuliahan dan ujian	Kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan perkuliahan dan ujian		pelaksanaan ujian dan perkuliahan yang tidak tertib sesuai aturan yang ada	Peningkatan pengawasan (monev) pelaksanaan ujian dan perkuliahan	3	4	17	
		3	RPS tidak sesuai dengan standar kurikulum terbaru	Masih banyak dosen yang enggan memperbaharui RPS sesuai standar kurikulum terbaru		Materi perkuliahan kurang diperbaharui	workshop peninjauan kurikulum	3	4	17	

Tabel 3.1 menunjukkan bahwa terdapat 7 (tujuh) *very high risk* yang ditandai warna merah dan terdistribusi pada layanan inti, pendukung dan penunjang. Layanan inti berupa layanan pendidikan dan pengajaran, layanan pendukung terletak pada subbagian akademik dengan 2 (dua) risiko dan jurusan/prodi 1 (satu) risiko. Layanan penunjang indikator merah terletak pada perpustakaan dengan 2 (dua) risiko dan humas 1 (satu) risiko. Data di atas juga menguraikan *high risk* yang ditandai dengan warna jingga yang tersebar pada 3 (tiga) layanan dan muncul pada setiap unit di FISIP. Keseluruhan risiko dengan indikator warna jingga berjumlah **29 (dua puluh sembilan)**. Kedua tipologi risiko di atas menjadi pijakan pimpinan fakultas dan prodi/jurusan dalam merumuskan atau membuat perencanaan hingga kerangka pendanaan. Artinya terdapat **36 (tiga puluh enam)** program prioritas dekan periode 2023-2027 yang harus masuk dalam **perencanaan program beserta kerangka pendanaannya**.

3.3. PROGRAM PRIORITAS

Perencanaan dan pelaksanaan kinerja FISIP Universitas Riau disesuaikan dengan 10 program strategis Universitas Riau yang diturunkan menjadi 10 Program strategis FISIP Universitas Riau. Sepuluh program strategis FISIP Universitas Riau tersebut disusun berdasarkan identifikasi berbagai isu strategis dan manajemen risiko di lingkungan FISIP Universitas Riau. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau pada tahun 2023 fokus untuk melaksanakan 6 program dari 10 program strategis FISIP Universitas Riau yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta standar pelayanan minimal. Adapun 6 program prioritas di Tahun 2023 yang menjadi fokus kinerja FISIP Universitas Riau diantaranya:

1. Membangun Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang sehat, nyaman dan aman berbasis zona integritas. Beberapa hal yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan program ini adalah dengan membentuk tim Zona Integritas FISIP. pembangunan fisik seperti tangga dan parkir disabilitas, Pojok P2K, Mal Pelayanan

Terpadu (MPT). Untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan di FISIP melalui penambahan jumlah CCTV di lingkungan FISIP serta pemasangan *barrier gate* parkir motor. Selain itu FISIP juga melakukan sosialisasi program Dikti mengenai tiga dosa besar Pendidikan (Kekerasan seksual, Perundungan/kekerasan, dan Intoleransi);

2. Meningkatkan hasil riset strategis dan inovatif berbasis keunggulan yang bercirikan kearifan lokal dengan bereputasi internasional. Pelaksanaan program ini diawali dengan menjalin kerjasama penelitian dan pengabdian dengan pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis melalui Kelompok Jabatan Fungsional Dosen (KJFD) FISIP. Selain itu, FISIP Universitas Riau memfasilitasi diseminasi hasil riset dengan mengadakan Seminar internasional, kegiatan *workshop* dan *coching clinic* penulisan naskah artikel scopus bagi dosen dan mahasiswa pasca sarjana di lingkungan FISIP;
3. Meningkatkan peran jurusan/prodi dan dosen sebagai agen perubahan melalui pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui pengabdian masyarakat berbasis Kelompok Jabatan Fungsional Dosen se lingkungan FISIP tahun 2023 secara terintegrasi di Kabupaten Bengkalis;
4. Melaksanakan sistem informasi teknologi yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi dalam pengelolaan administrasi dan keuangan serta mengarah kepada digitalisasi perencanaan. Program ini dilaksanakan melalui penggunaan aplikasi SINDE (Sistem Naskah Dinas Elektronik) sebagai media persuratan. Selain itu juga meningkatkan akses internet di berbagai titik di lingkungan FISIP;
5. Meningkatkan jejaring akademik terintegritasi pada alumni dan kerjasama *stakeholder*. FISIP Universitas Riau membangun jejaring dengan alumni melalui berbagai kegiatan seperti temu alumni FISIP. Selain itu juga dilaksanakan FISIP Ekspo yang bekerjasama dengan alumni dan beragam *stakeholder*;

6. Membentuk Mahasiswa multitalenta dan memiliki *softskill*. Dalam prioritas ini dilakukan kegiatan yang melibatkan kelembagaan mahasiswa di lingkungan FISIP Universitas Riau. FISIP juga memberikan apresiasi bagi mahasiswa berprestasi multitalenta seperti tim wirausaha P2MW FISIP, *winner category behind the scene of the effect progress* Tik Tok edisi Ramadhan, dsb.

Selain keenam program prioritas yang didasarkan kepada 10 program strategis rektor, terdapat pula tambahan program prioritas merujuk pada hasil penilaian manajemen risiko fakultas. Tambahan program prioritas disesuaikan dengan urutan prioritas *risk register* (warna merah dan jingga). Keseluruhan urutan prioritas pada kuartal pertama sebanyak **36 (tiga puluh enam)** dan dibagi menjadi **9 (sembilan)** program prioritas setiap tahunnya. Rumusan program prioritas tersebut tidak dapat dilepaskan dari komitmen seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan pimpinan FISIP Universitas Riau dalam mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Utama.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN SETIAP STRATEGI

4.1. TARGET KINERJA

Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada periode 2024-2028 dan manajemen risiko serta merujuk VMTS yang telah disusun maka ditetapkan juga Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) untuk menggambarkan tingkat ketercapaian indikator Sasaran Strategis (SS) tersebut. Indikator kinerja disusun secara SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant dan Timebound). Lebih rinci IKSS Kemenristekdikti dan target yang akan dicapai pada periode 2024-2028 diuraikan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1. Target Kinerja Tahun 2024-2028

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	TARGET					
				2024	2025	2026	2027	2028	
1	Tersedianya program studi yang berkualitas	1 IKU2	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	$\frac{n}{T} \times 100$	6%	6%	7%	8%	8%
			n = jumlah mahasiswa S1 dan Diploma yang menjalankan paling sedikit 20 SKS diluar kampus atau berprestasi dalam kompetisi lomba paling rendah tingkat nasional = Mahasiswa		304	325	359	384	420

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	TARGET					
				2024	2025	2026	2027	2028	
			t = total jumlah mahasiswa S1 dan Diploma =Mhs Aktif	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	
			a. menghabiskan paling sedikit 20 sks di luar kampus = ... mahasiswa	281	302	336	361	395	
			b. meraih prestasi paling rendah tingkat nasional = Mahasiswa	23	23	23	23	25	
		2 IKU5	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	$\frac{n}{x+y} \times 100$	112%	127%	143%	160%	181%
			n = jumlah keluaran penelitian yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh industry/masyarakat/pemerintah	134	152	172	192	217	
			x = jumlah dosen dengan NIDN (1096 orang)	116	116	116	116	116	
			y = jumlah dosen dengan NIDK (159 orang)	4	4	4	4	4	
			Penelitian mendapat rekognisi internasional = Org	36	44	52	62	71	
			Penelitian digunakan oleh industry/masyarakat/pemerintah = Org	44	51	60	70	79	
			HKI (Paten) = ... Org	68	73	80	86	93	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	TARGET				
				2024	2025	2026	2027	2028
3	IKU7	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>) sebagai sebagian bobot evaluasi.	$\frac{n}{T} \times 100$	74%	78%	86%	96%	111%
			n = jumlah mata kuliah yang menggunakan <i>case method</i> atau <i>team-based project</i> sebagai bagian dari bobot evaluasi = Mata kuliah	305	323	356	398	460
			t = total jumlah mata kuliah = mata kuliah	413	413	413	413	413
			Jumlah Mata Kuliah menggunakan <i>Case Method</i> = mata kuliah	244	253	268	290	331
			Jumlah Mata Kuliah menggunakan <i>team-based project</i> = mata kuliah	61	70	88	108	129
			Jumlah Mata Kuliah menggunakan <i>Case Method & team-based project</i> =	305	323	356	398	460
							
4	IKU8	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	$\frac{n}{(x+y)} \times 100$	29%	29%	29%	86%	100%
			n = jumlah prodi S1 dan diploma yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	2	2	2	6	7

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	TARGET						
				2024	2025	2026	2027	2028		
			x = jumlah prodi S1 (53) di Fakultas = Prodi	6	6	6	6	6		
			y = jumlah prodi diploma (8) di Fakultas = Prodi	1	1	1	1	1		
			Prodi S1 dan Diploma akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah							
2	Terciptanya tata kelola berbasis Good University Governance /GUG	1	IKU4	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	$n \times 100$	106 %	118 %	136 %	148 %	156 %
				(x+y)						
				n = jumlah dosen yang berkualifikasi S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi, atau berpengalaman kerja sebagai praktisi = org	127	142	163	177	187	
				x = jumlah dosen dengan NIDN (1096 orang) di Fakultas = org	116	116	116	116	116	
				y = jumlah dosen dengan NIDK (159 orang) di Fakultas = org	4	4	4	4	4	
				a. berkualifikasi akademik S3 NIDK = ... dosen dan NIDN = dosen	69	69	70	70	70	
				b.memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja	39	49	59	68	74	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	TARGET					
				2024	2025	2026	2027	2028	
			= dosen						
			c. berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja = dosen	17	22	31	36	40	
			2 IKU Tambahan Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	$\frac{n \times 100}{t}$	95%	95%	95%	95%	95%
			n = Total Realisasi Anggaran (penyerapan anggaran) = t = Total Pagu Anggaran =						
3	Terciptanya Kemandirian dan Prestasi mahasiswa yang handal	1 IKU1 Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	$\frac{n \times 100}{t}$	88%	103%	114%	129%	142%	
			n = lulusan S1 dan Diploma yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta = Orang	921	1.075	1.194	1.348	1.480	
			t = total jumlah lulusan S1 dan Diploma H-1 = orang	1.043	1.043	1.043	1.043	1.043	
			a. mendapatkan pekerjaan <6 Bln (Lulusan H-1) = lulusan	316	368	422	474	527	
			b. melanjutkan studi (Lulusan H-1) =	121	150	164	203	230	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	TARGET					
				2024	2025	2026	2027	2028	
		 lulusan						
			c. menjadi wiraswasta (Lulusan H-1) = Lulusan	484	557	608	671	723	
		2 IKU3	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir	$\frac{n}{x+y} \times 100$	67%	72%	78%	87%	95%
			n = jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di perguruan tinggi lain, berkegiatan tridarma di (QS100 by subject), atau bekerja sebagai praktisi di dunia industry dalam 5 tahun terakhir = Orang	80	86	93	104	114	
			x = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) (1096 orang)	116	116	116	116	116	
			y = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) (159 orang)	4	4	4	4	4	
			a. jumlah dosen yang berkegiatan tridarma diperguruan tinggi lain = Dosen						
			b. jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di QS100 berdasarkan bidang ilmu = dosen						
			c. jumlah dosen yang bekerja sebagai praktisi di dunia industri = ... dosen						

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Formula	TARGET					
					2024	2025	2026	2027	2028	
				d. jumlah dosen yang membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional = dosen						
4	Tersedianya sistem perencanaan dan Produk Inovasi yang unggul	1	IKU6	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	$\frac{n}{x+y} \times 100$	100	100	100	100	100
				n = jumlah prodi S1 dan Diploma yang melaksanakan kerjasama dengan mitra = 7 Prodi	7	7	7	7	7	
				x = jumlah prodi S1 (53) di Fakultas = 6 Prodi	6	6	6	6	6	
				y = jumlah prodi diploma (8) di Fakultas = 1 Prodi	1	1	1	1	1	
		2	IKU Tambahan	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB		Prediket	Prediket	Prediket	Prediket	Prediket

4.2. Proyeksi FISIP 2024-2028

1. Bidang Akademik

Tabel 4.2 Proyeksi Program Studi Baru

Jenjang	2024	2025	2026	2027	2028
D4	-	Perhotelan	-	-	-
S1	-	Ilmu Politik	Pariwisata	-	-
S2	Adm. Bisnis	-	Hub. Int.	-	-
S3	Sosiologi	-	Ilmu Politik	-	-
Profesi	-	-	-	-	-

Tabel di atas menunjukkan bahwa FISIP UNRI memproyeksikan pendirian program studi baru sejak tahun 2024 hingga 2026. Pendirian program studi baru sangat bergantung pada kebutuhan dan tujuan dari Fakultas maupun Universitas diantaranya menjawab permintaan pasar, tren pendidikan dan pengembangan profesionalitas, kekhasan dan inovasi kurikulum, diversifikasi, keunggulan bersaing, dan tuntutan perubahan sosial dan ekonomi masyarakat. Penambahan program studi tersebut pada level D4 hingga S3. Namun tidak dilakukan untuk profesi. Alasan pendirian program studi baru berdasarkan kebutuhan pangsa pasar dan memperluas kohesifitas dengan DUDI. Ketika mempertimbangkan pendirian program studi baru, institusi pendidikan harus memperhitungkan secara seksama alasan-alasan ini serta memastikan bahwa program yang diusulkan akan memenuhi kebutuhan mahasiswa, industri, dan masyarakat secara efektif. Terkhusus tahun 2027 dan 2028 sama sekali tidak terdapat proyeksi pendirian prodi baru tetapi lebih memperkuat kualitas dan tata kelola kelembagaan masing-masing prodi yang sudah ada di FISIP UNRI.

Tabel 4.3 Akreditasi Nasional Program Studi

Prodi/Jurusan	2024	2025	2026	2027	2028
S1 Ilmu Pemerintahan	A/Unggul	A/Unggul	A/Unggul	A/Unggul	Unggul
S1 Sosiologi	A/Unggul	A/Unggul	Unggul	Unggul	Unggul
S1 Komunikasi	A	A/Unggul	A/Unggul	Unggul	Unggul
S1 Hubungan Internasional	A/Unggul	A/Unggul	Unggul	Unggul	Unggul
S1 Administrasi Bisnis	A/Unggul	A/Unggul	Unggul	Unggul	Unggul
S1 Administrasi Publik	A/Unggul	A/Unggul	A/Unggul	Unggul	Unggul
D4 Usaha Perjalanan Wisata	A/Unggul	A/Unggul	A/Unggul	Unggul	Unggul
S2 Ilmu Politik	B	Unggul	Unggul	Unggul	Unggul
S2 Ilmu Komunikasi	B	B	Baik Sekali	Unggul	Unggul
S2 Sosiologi	B	A/Unggul	A/Unggul	A/Unggul	A/Unggul
S2 Administrasi Publik	A/Unggul	A/Unggul	Unggul	Unggul	Unggul
S3 Administrasi Publik	Baik Sekali	Baik Sekali	Baik Sekali	Baik Sekali	Unggul

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa mayoritas program studi (prodi) di lingkungan FISIP UNRI mulai level D4 hingga S2 mengejar akreditasi unggul. Akreditasi unggul skala nasional untuk program studi berguna untuk memastikan bahwa program tersebut memenuhi standar yang ditetapkan diantaranya menjamin kualitas pendidikan, meningkatkan akuntabilitas, meningkatkan transparansi, mendorong peningkatan berkelanjutan, mengakui standar yang diakui secara nasional, memfasilitasi mobilitas mahasiswa dan permenuhan persyaratan pengakuan internasional. Prodi yang diproyeksikan meraih akreditasi unggul adalah yang sudah meraih akreditasi A sehingga hanya melalui tahapan konversi menjadi unggul dengan menggunakan instrumen ISK. Selain menggunakan pola otomatisasi, prodi-prodi menargetkan akreditasi unggul melalui LAM-SPAK. Terkhusus S3 Administrasi publik hanya menargetkan akreditasi baik sekali dikarenakan merupakan salah satu prodi baru di FISIP UNRI.

Tabel 4.4 Akreditasi Internasional Program Studi

Prodi/Jurusan	2024	2025	2026	2027	2028
S1 Ilmu Pemerintahan	-	-	-	FIBAA/AQAS	FIBAA/AQAS
S1 Sosiologi	-	-	-	FIBAA/AQAS	FIBAA/AQAS
S1 Komunikasi	-	-	-	FIBAA/AQAS	FIBAA/AQAS
S1 Hubungan Internasional			FIBAA/AUN-QA	FIBAA/AUN-QA	FIBA-A/AUN-QA
S1 Administrasi Bisnis	-	-	-	FIBAA/AQAS	FIBAA/AQAS
S1 Administrasi Publik	-	-	-	FIBAA/AQAS	FIBAA/AQAS
D4 Usaha Perjalanan Wisata	-	-	-	-	-
S2 Ilmu Politik	-	-	-	-	-
S2 Ilmu Komunikasi	-	-	-	-	-
S2 Sosiologi					
S2 Administrasi Publik	-	-	-	-	-
S3 Administrasi Publik	-	-	-	-	-

Akreditasi internasional bertujuan untuk meningkatkan reputasi global dari program studi dengan standar kualitas yang diakui secara internasional. Selain itu akreditasi internasional juga dapat memfasilitasi mobilitas mahasiswa dan pengakuan gelar, meningkatkan kolaborasi/akses ke sumber daya global, perluasan jaringan kerjasama, meningkatkan standar kualitas pendidikan, dan pengakuan keunggulan akademik. Proyeksi akreditasi internasional difokuskan kepada prodi yang sudah meraih akreditasi A/Unggul, yakni S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Sosiologi, S1 Komunikasi, S1 Hubungan Internasional, S1 Administrasi Bisnis dan S1 Administrasi Publik. Keberanian untuk mencanangkan akreditasi internasional sejak tahun 2026-2028 didasarkan pada raihan akreditasi sebelumnya dan juga sebagai langkah untuk menapaki tahap *world class faculty*. Raihan akreditasi internasional ini akan berdampak positif terhadap civitas akademika, fakultas dan universitas.

Tabel 4.5 Proyeksi Jumlah Mahasiswa

Prodi/Jurusan	2024	2025	2026	2027	2028
S1 Ilmu Pemerintahan	843	900	900	900	900
S1 Sosiologi	836	900	920	960	960
S1 Komunikasi	970	1000	1000	1000	1000
S1 Hubungan Internasional	770	760	750	740	740
S1 Administrasi Bisnis	150	200	200	250	250
S1 Administrasi Publik	600	700	700	700	700
D4 Usaha Perjalanan Wisata	340	500	500	600	600
S2 Ilmu Politik	61	71	75	85	95
S2 Ilmu Komunikasi	115	122	134	141	141
S2 Sosiologi	63	83	83	83	83
S2 Administrasi Publik	117	120	120	120	120
S3 Administrasi Publik	57	77	97	117	137
Total	4922	5433	5479	5696	5726

Proyeksi jumlah mahasiswa memiliki urgensi yang signifikan dalam perencanaan strategis dan operasional lembaga. proyeksi tersebut tidak hanya terkait dengan perencanaan keuangan lembaga saja tetapi juga berkaitan dengan pengadaan dan pengelolaan fasilitas dan sumber daya yang dimiliki, selain itu proyeksi jumlah mahasiswa juga berkaitan dengan pengembangan kurikulum, strategi perekrutmen tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan dan pemasaran, serta berkaitan dengan pengambilan keputusan strategis. jumlah mahasiswa juga merupakan unsur penunjang dalam pengakuan dan persyaratan akreditasi. lembaga dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan kesinambungan operasional, kualitas pendidikan, dan pertumbuhan strategis dengan melakukan proyeksi terhadap jumlah mahasiswa. Proyeksi jumlah mahasiswa pada tabel di atas memperlihatkan bahwa setiap tahun terjadi kenaikan jumlah mahasiswa. Kenaikan ini bisa disebabkan oleh 2 (dua) hal yaitu jumlah mahasiswa yang lambat lulus dan mahasiswa baru setiap program studi. Ilmu Komunikasi menjadi prodi dengan jumlah terbanyak proyeksi tahunan sebagaimana disajikan pada tabel di atas. Terkhusus S2 dan S3 proyeksi terlihat sedikit dikarenakan mahasiswa baru sebagai input awal sedikit.

Tabel 4.6 Proyeksi Jumlah Mahasiswa Baru

Prodi/Jurusan	2024	2025	2026	2027	2028
S1 Ilmu Pemerintahan	160	160	160	160	160
S1 Sosiologi	180	224	224	224	232
S1 Komunikasi	160	160	160	160	160
S1 Hubungan Internasional	160	160	150	150	150
S1 Administrasi Bisnis	150	200	200	250	250
S1 Administrasi Publik	160	160	160	160	160
D4 Usaha Perjalanan Wisata	120	150	200	200	200
S2 Ilmu Politik	7	20	30	40	40
S2 Ilmu Komunikasi	40	40	40	40	40
S2 Sosiologi	20	20	20	20	20
S2 Administrasi Publik	30	30	30	30	30
S3 Administrasi Publik	20	20	20	20	20
Total	1207	1344	1394	1454	1462

Peningkatan jumlah mahasiswa baru menjadi tujuan strategis bagi lembaga, baik dilihat sebagai indikator pertumbuhan institusi, peningkatan pendapatan bagi lembaga, peningkatan diversitas dan keterwakilan mahasiswa dari berbagai latar belakang, peningkatan reputasi dan daya tarik, berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat dan peningkatan daya saing. Proyeksi jumlah mahasiswa baru untuk level D4-S1 tidak terlampau jauh, Dimana berkisar antara 120 hingga 200an mahasiswa setiap tahunnya. Sedangkan untuk S2 dan S3 di bawah 100 karena mekanisme seleksi penerimaan mahasiswa baru berbeda dengan tingkat S1. Apabila dilihat dari total per tahunnya jumlah mahasiswa diproyeksikan mengalami kenaikan hingga pada akhir masa kepemimpinan Dekan di tahun 2028 berjumlah 1.462 mahasiswa baru.

Tabel 4.7 Proyeksi Jumlah Lulusan

Prodi/Jurusan	2024	2025	2026	2027	2028
S1 Ilmu Pemerintahan	160	160	160	160	160
S1 Sosiologi	180	190	200	200	210
S1 Komunikasi	175	175	175	175	175
S1 Hubungan Internasional	170	170	160	160	150
S1 Administrasi Bisnis	150	150	150	150	150
S1 Administrasi Publik	160	160	160	160	160
D4 Usaha Perjalanan Wisata	120	120	120	120	120
S2 Ilmu Politik	10	26	30	30	30
S2 Ilmu Komunikasi	33	28	32	33	40
S2 Sosiologi	10	10	10	10	10
S2 Administrasi Publik	30	30	30	30	30
S3 Administrasi Publik	2	6	12	18	24
Total	1200	1225	1239	1246	1259

Proyeksi jumlah lulusan dari program studi tertentu merupakan langkah penting dalam perencanaan strategis Lembaga, memastikan kualitas pendidikan, relevansi program kegiatan, dan keberlanjutan keuangan. Proyeksi lulusan yang dicanangkan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Jumlah mahasiswa yang lulus ini diasumsikan jumlah mahasiswa baru sama dengan kelulusan ataupun berbeda tidak terlalu jauh. Tingkatan S2 dan S3 proyeksi lulusan kecil dikarenakan mahasiswa baru setiap tahunnya juga sedikit. S3 Administrasi publik merupakan prodi yang proyeksi lulusannya kecil dikarenakan prodi baru yang didirikan di FISIP UNRI.

Tabel 4.8 Proyeksi Macam dan Penerimaan Beasiswa

No	Uraian	2024	2025	2026	2027	2028
1	Penerima Beasiswa (Orang)					
a	Dana Pemerintah Pusat	1250	1300	1350	1400	1450
b	Dana Swasta	75	80	85	95	100
c	Dana Pemerintah Daerah	255	275	300	325	350
	Total	1580	1655	1735	1820	1900
2	Dana Beasiswa (Juta Rp.)					
a	Dana Pemerintah Pusat	7 M	7.2 M	7.4 M	7.5 M	7.6M
b	Dana Swasta	435JT	465JT	485JT	500JT	525 JT
c	Dana Pemerintah Daerah	525JT	545JT	565JT	585JT	600JT
d	Dana Pemerintah Pusat	7,960M	8.210M	8.450M	8.585M	8.720M
	Total	1250	1300	1350	1400	1450

Penerapan program-program beasiswa pendidikan dapat membantu program studi dalam menarik calon mahasiswa berkualitas, mendukung pencapaian akademis mahasiswa, dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan dinamis. Proyeksi macam dan penerimaan mahasiswa yang disajikan pada tabel di atas menunjukkan bahwa macam dan penerimaan mahasiswa berasal dari dana pemerintah pusat dengan jumlah per tahun lebih dari 1000 mahasiswa. FISIP UNRI masih menggantungkan dana pemerintah pusat untuk beasiswa. Dana swasta menjadi yang paling sedikit setiap tahunnya. Oleh sebab itu dibutuhkan aksi nyata dari tindak lanjut kerjasama. Apabila didasarkan pada jumlah dananya, FISIP membuat proyeksi paling banyak dari dana pemerintah pusat dengan besaran paling rendah 7.960.000.000 hingga target tahun 2028 menyentuh angka 8.720.000.000, -

Tabel 4.9 Jumlah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Berdasarkan Jumlah Dana (juta)

Sumber Pendanaan	2024	2025	2026	2027	2028
Universitas	350	350	400	500	500
Fakultas	250	250	250	250	250
Eksternal	340	440	590	640	640
Kolaborasi	282	332	332	382	382
Total	2122	2272	2472	2672	2672

Peningkatan jumlah dana penelitian dapat menjadi tujuan strategis yang penting lembaga. hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi roadmap dan prioritas penelitian, membangun kemitraan dengan pihak-pihak yang potensial serta pengguna hasil penelitian, mendorong kolaborasi dan proyek-proyek penelitian multidisiplin, meningkatkan kualitas proposal penelitian, penelitian juga menjadi media promosi dan jejaring serta dilakukannya evaluasi dan penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat. Proyeksi berdasarkan table diatas menekankan adanya diversifikasi sumber pendanaan baik berasal dari internal maupun external dan peningkatan setiap tahunnya berdampak pada rekognisi dari hasil penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan. Diproyeksi kenaikan jumlah dana penelitian mencapai puluhan atau ratusan juta serta disesuaikan dengan roadmap dan skema penelitian yang ditawarkan.

2. Bidang Umum dan Keuangan

Tabel 4.10 Tabel Proyeksi Jumlah SDM

Jenjang	2024	2025	2026	2027	2028
Tenaga Pendidik					
ASN	127	145	161	171	171
PPPK	12	19	19	19	20
Kontrak	2	-	-	-	-
Total	141	164	180	190	190
Tenaga Kependidikan					
ASN	13	14	15	16	16
PPNPN	53	52	52	52	52
PHL	6	7	7	7	7
<i>Outsourcing</i>	-	-	-	-	-
Total	72	73	74	75	76

Dalam pengelolaan SDM tidak hanya berkaitan dengan peningkatan jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan saja namun juga berkaitan dengan optimalisasi sumber daya manusia (sdm) yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas pendidikan. terdapat beberapa hal yang mempengaruhi pengembangan SDM yaitu pengkajian kebutuhan dan mekanisme perekrutan yang berkualitas serta dilakukan secara transparan dan adil, dilakukannya pengembangan kompetensi dan profesionalitas SDM, mendorong partisipasi aktif seluruh pihak, memberikan reward dan punishment, serta adanya penilaian dan evaluasi kinerja berkelanjutan. Proyeksi

jumlah SDM setiap tahunnya akan meningkat namun tidak signifikan, hal ini juga dipengaruhi oleh kebutuhan dan analisis jabatan termasuk jumlah pegawai yang akan berakhir masa kerjanya, jumlah mahasiswa, dan jenis layanan yang diberikan.

Tabel 4.11 Proyeksi Sarana dan Prasarana

No	Uraian	2024	2025	2026	2027	2028
1	<i>Smart classroom</i>					√
2	<i>Green Campus</i> Berbasis Taman Digital		√			
3	<i>Smart Eco Campus</i>			√		
4	Fasilitas kebugaran dan <i>mental health</i>					√
5	Pemeliharaan Area Parkir Roda 2 dan <i>ladies parking</i>		√			
6	Kawasan Zero Tolerance terintegrasi FISIP <i>socialize center</i>	√				
7	Penataan Ruang Administrasi Prodi	√				
8	Ruang Dosen	√				
9	<i>Sport Center</i>					√
10	Ruang ujian promosi	√				
11	Gazebo	√				
12	<i>Co working space</i>	√				
13	<i>Sawit center</i>					√
14	Digitalisasi layanan perpustakaan	√				
15	Revitalisasi gerai pendidikan				√	
16	<i>Green Campus</i> (Solar Sel)				√	
17	Bank Sampah					√
18	Peremajaan penunjang perkantoran		√	√	√	
19	Ruang rapat digital				√	

Proyeksi sarana dan prasarana pendidikan merupakan langkah penting dalam perencanaan strategis lembaga guna memastikan bahwa sarana prasarana dan fasilitas memadai dan sesuai dengan kebutuhan pendidikan serta sesuai dengan perkembangan zaman. Melalui proyeksi yang akurat dan terperinci tentang kebutuhan infrastruktur pendidikan memungkinkan lembaga untuk mengalokasikan sumber daya dengan efisien dan memastikan bahwa fasilitas yang ada dapat mendukung visi misi lembaga secara optimal setiap tahunnya. Proyeksi sarana prasarana yang terlihat pada table diatas berorientasi terhadap pencapaian visi dan misi fakultas serta program strategis setiap tahunnya. Pada tahun 2024 ditargetkan telah terpenuhinya sarana prasarana seperti kawasan zero tolerance terintegrasi

FISIP socialize center, penataan ruang administrasi prodi, ruang dosen, sport center, ruang ujian promosi, gazebo, co working space dan digitalisasi layanan perpustakaan. Sedangkan ditahun-tahun berikutnya berorientasi terhadap pengembangan dan pengoptimalan fungsi dari sarana prasana yang dimiliki dan berorientasi terhadap pemenuhan persyaratan akreditasi internasional.

Tabel 4.12 Proyeksi Pendapatan FISIP UNRI Tahun 2024-2028

Jenis Pendapatan	2024	2025	2026	2027	2028
BOPTN	2.795.910.000	2.795.910.000	2.795.910.000	2.795.910.000	2.795.910.000
PNBP	28.071.653.233	30.745.953.233	30.958.453.233	31.170.953.233	31.383.453.233
Dana Masyarakat	27.831.281.233	30.495.581.233	30.698.081.233	30.900.581.233	31.103.081.233
Layanan Pendidikan	240.372.000	250.372.000	260.372.000	270.372.000	280.372.000
Kerjasama Tri Dharma	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
Jumlah	30.867.563.233	33.541.863.233	33.754.363.233	33.966.863.233	34.179.363.233

Proyeksi sumber pendapatan fakultas melibatkan penilaian dan estimasi potensial dari berbagai sumber pendapatan yang dapat diperoleh oleh dalam jangka waktu tertentu. Pembuatan proyeksi pendapatan yang realistis dan terukur dapat mengembangkan strategi yang efektif untuk meningkatkan dan mengoptimalkan sumber pendapatan, yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan program kerja dan pengembangan fakultas. Pendapatan Fakultas berasal dari BOPTN dan PNBP yang diprediksi tidak mengalami peningkatan yang signifikan, Selain BOPTN dan PNBP, terdapat juga sumber pendapatan dari dana Masyarakat, layanan Pendidikan dan kerjasama tridarma dengan pihak lainnya.

Tabel 4.13 Proyeksi Belanja FISIP UNRI Tahun 2024-2028

No.	Belanja	2024	2025	2026	2027	2028
A	Belanja Pegawai	Domain Universitas				
1	Belanja Pegawai Sumber Dana BOPTN					
2	Belanja Honorarium					
3	Belanja Tunjangan					
4	Belanja Uang Makan					
5	Belanja Remunerasi					
B	Belanja Barang dan Jasa					
1	Belanja Gaji dan Tunjangan 525111 (BLU)	849.733.000	849.733.000	849.733.000	849.733.000	849.733.000
2	Belanja Barang 525112 (BLU)	786.510.000	786.510.000	786.510.000	786.510.000	786.510.000
3	Belanja Jasa 525113 (BLU)	95.900.000	95.900.000	95.900.000	95.900.000	95.900.000
4	Belanja Pemeliharaan 525114 (BLU)	796.183.000	796.183.000	796.183.000	796.183.000	796.183.000
5	Belanja Perjalanan 525115 (BLU)	1.072.869.000	1.072.869.000	1.072.869.000	1.072.869.000	1.072.869.000
6	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU lainnya 525119 (BLU)	2.093.590.000	2.093.590.000	2.093.590.000	2.093.590.000	2.093.590.000
7	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU lainnya 525112 (BLU) Konsumsi	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
8	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (521811) BOPTN	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000
9	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111) BOPTN	177.300.000	177.300.000	177.300.000	177.300.000	177.300.000
10	Belanja Bahan (521211) BOPTN	1.147.210.000	1.147.210.000	1.147.210.000	1.147.210.000	1.147.210.000
11	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel (521252) BOPTN	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
C	Belanja Modal					
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (537112)	225.415.000	225.415.000	225.415.000	225.415.000	225.415.000
2	Belanja Gedung dan Bangunan (525163)	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111) BOPTN	579.900.000	579.900.000	579.900.000	579.900.000	579.900.000
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan (533111) BOPTN	341.500.000	341.500.000	341.500.000	341.500.000	341.500.000
	Jumlah	8.745.110.000	8.745.110.000	8.745.110.000	8.745.110.000	8.745.110.000

3. Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni

Pelayanan Kemahasiswaan

Tabel 4.14 Prestasi Kemahasiswaan dan Mahasiswa Berprestasi

No	Uraian	2024	2025	2026	2027	2028
1	Jumlah Prestasi Mahasiswa					
a	Provinsi	5	7	10	13	15
b	Wilayah/regional	7	10	12	15	18
c	Nasional	25	28	30	33	35
d	Internasional	2	3	4	5	7
	Total	39	48	56	66	75
2	Jumlah Mahasiswa Berprestasi					
a	Provinsi	5	10	15	20	25
b	Wilayah/regional	10	15	20	25	30
c	Nasional	40	50	65	80	100
d	Internasional	3	5	7	10	12
	Total	58	80	107	135	167

Proyeksi kemahasiswaan dan mahasiswa berprestasi merupakan estimasi pencapaian prestasi non akademik mahasiswa baik ditingkat local, regional, nasional bahkan internasional. Berdasarkan table diatas, diproyeksi peningkatan prestasi mahasiswa mengalami peningkatan setiap tahunnya hal ini didukung oleh suasana dan iklim akademik yang mendukung penguatan kapasitas mahasiswa untuk berkompetisi serta adanya dukungan kolaborasi dan mentoring oleh dosen pembimbing untuk penguatan gagasan maupun kreatifitas mahasiswa. Prestasi kemahasiswaan tidak hanya menunjang pendapaian indicator kinerja utama Lembaga namun juga menjadi tujuan Pendidikan tinggi untuk mahasiswa mendapatkan kesempatan mengasah skill dan daya saingnya dengan dunia luar.

Tabel 4.15 Tracer Study Lulusan

No	Uraian	2024	2025	2026	2027	2028
1	Tracer Study					
a	Presentase mahasiswa yang mengisi form tracer study (dari lulusan t-1)	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kualitas lulusan					
a	Jumlah lulusan yang mendapatkan pekerjaan yang layak (< 6 bulan dan penghasilan > 1,2x UMR)	55%	57%	60%	62%	65%
b	Jumlah lulusan yang melanjutkan studi (<=12 bulan setelah terbitnya ijazah)	6%	7.2%	8.3%	9.5%	10%
c	Jumlah lulusan yang menjadi wiraswasta	7%	10%	15%	20%	25%

Kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan peminfaat lulusan dapat ditinjau dari beberapa aspek seperti peninjauan kurikulum, metode pembelajaran berbasis IT dengan pendekatan student center learning (SCL) hingga kerjasama. Untuk mengetahui kesesuaian kompetensi tersebut dilakukan studi pelacakan (tracer study) melalui pemberian angket untuk diisi oleh alumni baik melalui website Universitas Riau maupun sosial media. Pelacakan dilakukan pada saat pertemuan formal baik seminar, kuliah umum maupun lokakarya dan secara informal melalui kunjungan alumni kekampus. Hasil isian kuisisioner tersebut kemudian diolah hingga muncul skor yang dijadikan input bagi pengelola program studi dalam pengembangan program studi. Hasil pelacakan menjadi input untuk perbaikan di beberapa aspek seperti proses pembelajaran, performance program studi, peluang penggalangan dana, informasi pekerjaan dan membangun jaringan. Sebaran alumni juga bervariasi namun sebagian besar diproyeksikan telah sesuai dengan kompetensi lulusan yang ditargetkan. Proyeksi tracer study tidak hanya capaian jumlah yang mengisi saja namun juga mengukur kualitas lulusan yang

dilihat dari Jumlah lulusan yang mendapatkan pekerjaan yang layak (< 6 bulan dan penghasilan $> 1,2x$ UMR), Jumlah lulusan yang melanjutkan studi (≤ 12 bulan setelah terbitnya ijazah) serta Jumlah lulusan yang menjadi wiraswasta. Hal ini diproyeksikan terus meningkat sejalan dengan pengembangan kurikulum, layanan pendidikan serta pelaksanaan program MBKM yang berorientasi terhadap peningkatan kualitas lulusan baik dari kemampuan akademik dan non akademik.

4.3. KERANGKA PENDANAAN

FISIP dalam melaksanakan program dan kegiatan setiap tahunnya sebagaimana diuraikan sebelumnya mendapatkan pendanaan yang bersumber dari Rupiah Murni (baik yang berupa anggaran rutin yang dialokasikan bagi gaji pegawai, anggaran operasional rutin, dan anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri yang termaktub dalam skema Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Disamping itu juga dilakukan pengelolaan dana yang bersumber dari masyarakat (PNBP). Dana yang bersumber dari masyarakat tersebut dapat berupa uang kuliah yang dipungut dari mahasiswa baik yang berupa Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) maupun Uang Kuliah Tunggal (UKT). Selain itu, sumber pembiayaan tersebut dapat berasal kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan tarif non-UKT. Anggaran-anggaran tersebut menopang 2 (dua) fungsi institusi yakni fungsi pendidikan dan fungsi layanan umum. Adapun penjelasannya dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.16 Sasaran Strategis dan Kerangka Pendanaan

NO	SASARAN STRATEGIS	IK U	PROGRAM STRATEGIS	KRO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
1	Terwujudnya program studi yang berkualitas di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.	IKU 2	1. Meningkatkan sistem pembelajaran berwawasan kebangsaan dan kebhinekaan yang berbasis teknologi informasi global	4471.DBA.001.060.K	Unit Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan	35.200.000
		IKU 4	2. Meningkatkan hasil riset strategis dan inovatif berbasis keunggulan yang bercirikan kearifan lokal dengan bereputasi internasional	4471.DBA.001.060.D	Pemberian Beasiswa	240.000.000

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	PROGRAM STRATEGIS	KRO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
				4471.DBA.001.060.N	Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik	458.116.000
		IKU 3	3. Meningkatkan peran jurusan/prodi dan dosen sebagai agen perubahan melalui pengabdian kepada masyarakat.	4471.DBA.001.060.M	Kompetisi/Lomba Mahasiswa	69.400.000
		IKU 9	4. Meningkatkan sarana dan prasarana kampus yang strategis dengan mengedepankan suasana akademik dan mendukung optimalisasi terselenggaranya tridarma	4470.BEI.001.004.B	Renovasi Gedung Pendukung Pembelajaran	459.000.000
				4470.BEI.004.004.A	Pengadaan Peralatan/Meubelair Pendukung Pembelajaran	768.600.000
				4471.CBJ.001.051.B	Renovasi Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran	50.000.000
2	Terbentuknya Tata Kelola Berbasis <i>Good Faculty Governance (GFG)</i> .	IKU 6	Membangun Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang sehat, nyaman dan aman berbasis zona integritas	4471.DBA.001.060.H	Kerjasama Berbasis Pendidikan	222.570.000
		IKU 8	Meningkatkan akreditasi unggul bagi setiap program studi secara nasional dan internasional	4471.CAA.002.051.A	Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran	268.351.000
				4471.DBA.003.053.B	Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Kependidikan	257.694.000

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	PROGRAM STRATEGIS	KRO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
				4471.DBA.003.051.A	Operasional Perkantoran	1.637.908.000
				4471.DBA.003.051.E	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	749.463.000
				4471.DBA.001.060.G	Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik	212.023.000
		IKU 5	Meningkatkan <i>income generating</i> di luar Uang Kuliah Tunggal (non-UKT)	4471.DBA.004.051.D	Seminar dan Publikasi Penelitian	374.960.000
				4471.DBA.004.051.E	Penerbitan Jurnal	90.400.000
				4471.DBA.004.051.F	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	17.400.000
				4471.DBA.004.052.A	Seleksi dan Penilaian Proposal Pengabdian kepada Masyarakat	3.000.000
				4471.DBA.004.052.B	Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat	200.000.000
				4471.DBA.004.051.A	Seleksi dan Penilaian Proposal Penelitian	8.400.000
				4471.DBA.004.051.B	Pelaksanaan Penelitian	700.000.000
3	Terciptanya kemandirian dan prestasi mahasiswa yang berdaya saing tinggi.	IKU 2	Membentuk Mahasiswa multitalenta dan memiliki <i>softskill</i>	4470.BEI.002.004.N	Pengelolaan Unit Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan	400.000.000
4	Tersedianya sistem perencanaan, teknologi informasi yang unggul.	IKU 9	Melaksanakan sistem informasi teknologi yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi dalam pengelolaan administrasi dan keuangan	4471.DBA.001.060.A	Penerimaan Mahasiswa Baru	68.150.000
				4470.BEI.001.004.A	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	2.190.240.000

NO	SASARAN STRATEGIS	IK U	PROGRAM STRATEGIS	KRO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
		IKU 1	Meningkatkan jejaring akademik terintegritas pada alumni dan kerjasama <i>stakeholder</i>	4471.DBA.001.060.J	Kegiatan Kemahasiswaan	2.530.000
				4470.BEI.002.004.Q	Keikutsertaan Mahasiswa dalam Lomba/Kompetisi Mahasiswa	11.000.000
				4471.DBA.001.060.L	Kegiatan Kewirausahaan Mahasiswa	10.500.000
				4470.BEI.002.004.R	Kegiatan Kewirausahaan Mahasiswa	30.000.000
				4470.BEI.002.004.T	Peningkatan Keterampilan Berwirausaha	30.000.000
				4470.BEI.002.004.O	Operasional Kegiatan Kemahasiswaan	135.000.000
				4470.BEI.002.004.V	Pemberdayaan Alumni	59.715.000
				4471.DBA.001.060.E	Pembinaan Karir Mahasiswa	2.400.000
				4471.DBA.001.060.C	Wisuda dan Yudisium	33.000.000

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tahun 2024 - 2028 ini adalah produk kebijakan yang merupakan bagian integral dari sebuah proses kepemimpinan. Dokumen ini menjadi pedoman atau acuan utama bagi pimpinan fakultas, unit, dan program studi/jurusan dalam menyusun perencanaan kinerja dan penganggaran dimensi menengah dan tahunan.

Implementasi produk kebijakan memiliki *output* dan *outcome* yang bermanfaat pada pengembangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik lebih maju dan mengarah kepada sasaran utama kementerian dan program strategis rektor serta *Good Faculty Governance*. Selain itu program, kegiatan, subkegiatan dan pendanaan merupakan hilirisasi dari VMTS Fakultas 4 (empat) tahun kedepan dan tugas institusi (TUSI) organisasi. Namun apabila terdapat sesuatu hal yang mendesak dan mempunyai urgensi tinggi akan dipertimbangkan untuk tetap diprogramkan dengan menyesuaikan skala prioritas dan ketersediaan anggaran atau pembiayaan.

Dokumen ini menjadi dasar evaluasi perencanaan dan penganggaran semua kegiatan fakultas dan sinkronisasi serta harmonisasi dengan setiap unit hingga program studi/jurusan. Setiap awal tahun, renstra ini dijabarkan lebih lanjut dalam suatu *Performance Plan* (rencana kerja) dan pada akhir tahun, pencapaian kinerja dilaporkan melalui Laporan Kinerja (LAKIN) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

Pekanbaru, Februari 2024
Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau,

Dr. Meyzi Heriyanto, S.Sos, M.Si
NIP 19750831 199802 1 001